MODERASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PENGARUH UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG), DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2020-2024

Oleh:

ERNIS PRASETIYO WATI
NIM 501240003

PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

2026

MODERASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PENGARUH UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG), DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2020-2024

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

ERNIS PRASETIYO WATI
NIY 501240003

PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Ernis Prasetiyo Wati**, NIM 501240003, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,

Ernis Prasetiyo Wati
NIM 501240003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Ernis Prasetiyo Wati**, NIM 501240003 dengan judul: " Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 15 Juni 2026

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI.	**Dr. Ridho Rokamah, MSI.**
NIP. 197202111999032003	NIP.197412111999032002

Mengetahui,

Kaprodi Magister Ekonomi Syariah

Dr.Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI.
NIP. 197202111999032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website : www.pasca.uinponorogo.ac.id email : pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Ernis Prasetiyo Wati, NIM 501240003, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul : "Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada 4 Mei 2026 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji :

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I.** NIP 197801122006041002 Ketua Sidang		17/6 2026
2	**Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.** NIP 197412111999032002 Sekretaris Sidang		17/6 2026
3	**Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak.** NIP 197905252003122002 Penguji Utama		17/6 2026
4	**Dr. Ely Masykuroh, S.E., MSI.** NIP 197202111999032003 Anggota Penguji		15/6 · 26

Ponorogo, 15 Juni 2026

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 19730801199803100

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis alhasil dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: ”Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024” ini yang membahas isu kajian tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi dan sosial kepada tingkat kemiskinan di Indonesia serta peran lembaga keuangan syariah dalam memoderasi hubungan tersebut.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.) pada Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini bisa diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Setiyo Widodo dan ibu saya Dwi Erna Wati atas semangat dan pengertian mereka. Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Dr.Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI., dan Dr. Ridho Rokamah, MSI., yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag., dan Wakil Direktur Dr. Sugiyar, M.Pd.I., Ketua Program Studi Dr. Ely Masykuroh, S.E., MSI., beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis alhasil selesainya tesis ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul pada penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat, masyarakat, dan bangsa, amin.

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ernis Prasetiyo Wati
NIM	:	501240003
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis	:	Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024

Menyebutkan naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang diakses di https://etheses.iainponorogo.ac.id/. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 April 2026

Pembuat Pernyataan,

Ernis Prasetiyo Wati

NIM 501240003

ABSTRAK

Wati, Ernis Prasetiyo, 2026. Moderasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024, Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing 1 : Dr.Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI., Pembimbing 2 : Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

Kata Kunci : Kemiskinan, UMP, Pendidikan, IPG, Pengangguran Terbuka, Lembaga Keuangan Syariah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia yang tidak selalu sejalan dengan peningkatan indikator ekonomi. Meskipun terjadi kenaikan upah minimum, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan tidak selalu menurun secara konsisten. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu memperkuat akses ekonomi masyarakat juga belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menekan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, serta menguji peran lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi pada periode 2020–2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel dari 33 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan OJK, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel *Random Effect Model* (REM) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan pengujian melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPG dan pengangguran terbuka berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan dengan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 75,39%. Namun, jumlah lembaga keuangan syariah tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan kemiskinan.

ABSTRACT

Wati, Ernis Prasetiyo, 2026. *The Moderating Role of Islamic Financial Institutions in the Effects of the Minimum Wage, Education, the Gender Development Index (GDI), and Open Unemployment on Poverty in Indonesia, 2020–2024, Master's Program in Islamic Economics, Postgraduate School, Kiai Ageng Muhammad Besari State Islamic University (UIN) Ponorogo. Supervisor* 1*:* Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI.*., Supervisor* 2*:* Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

Keywords: *Poverty, Provincial Minimum Wage, Education, The Gender Development Index, Open Unemployment, The Number of Islamic Financial Institutions*

Poverty remains a major issue in Indonesia, one that does not always align with improvements in economic indicators. Despite increases in the minimum wage, education levels, and the Gender Development Index (GDI), as well as a decline in unemployment, poverty rates have not consistently decreased. Furthermore, the role of Islamic financial institutions, which are expected to strengthen the public's economic access, has not yet yielded optimal results in reducing poverty. This study aims to analyze the effects of the Provincial Minimum Wage (UMP), education, the Gender Development Index (GDI), and open unemployment on poverty, as well as to examine the role of Islamic financial institutions as a moderating variable for the period 2020–2024.

This study employs an explanatory quantitative approach using panel data from 33 provinces in Indonesia. The data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Manpower, and the Financial Services Authority (OJK), and were analyzed using Random Effects Model (REM) panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA), with tests conducted via the t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2). The results show that the Minimum Wage (UMP) and education have a negative and significant effect on poverty, while the Islamic Financial Institution Index (IPG) and open unemployment have a negative but insignificant effect on poverty. Simultaneously, all independent variables have a significant effect with an Adjusted R-Squared value of 75.39%. However, the number of Islamic financial institutions is unable to moderate the relationship between the independent variables and poverty.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Pembatasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Manfaat Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 15
H. BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**
A. Kajian Teori 17
1. Deskripsi Teori Kemiskinan 17
2. Indikator Kemiskinan 18
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 19
a. Pendapatan (Upah) 19
b. Kesempatan Kerja dan Pengangguran 20
c. Pendidikan atau Keterampilan 23
d. Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar 26
e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 27
f. Kondisi Geografis dan Lingkungan 29

g. Ketidakstabilan Ekonomi 30
4. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan .30
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....33
C. Kerangka Berfikir.....50
D. Hipotesis Penelitian.....52
BAB III METODE PENELITIAN.....69
A. Desain Penelitian.....69
1. Pendekatan Penelitian.....69
2. Jenis Penelitian.....69
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....70
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....70
1. Populasi Penelitian.....70
2. Sampel Penelitian.....71
D. Data dan Sumber Data.....71
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....72
F. Teknik Pengumpulan Data.....75
G. Uji Pemilihan Model.....75
H. Uji Asumsi Klasik.....77
1. Uji Normalitas.....77
2. Uji Autokorelasi.....77
3. Uji Multikolinearitas.....78
4. Uji Heteroskedastisitas.....78
I. Uji Hipotesis dan Teknik Analisis.....79
1. Uji Hipotesis.....79
a. Uji T (Parsial).....79
b. Uji F (Simultan).....79
c. Koefisien Determinasi (R^2).....79
2. Teknik Analisis.....80
a. *Moderated Regression Analysis* (MRA).....80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....83
A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....83
B. Analisis Statistik Deskriptif.....97

C. Statistik Inferensial 99
1. Analisis Pemilihan Model 99
2. Analisis Uji Asumsi Klasik 101
a. Uji Normalitas 101
b. Uji Autokorelasi 102
c. Uji Multikolinieritas 103
d. Uji Heteroskedastisitas 104
3. Uji Hipotesis dan Interpretasi 106
a. Uji T (Parsial) 106
b. Uji F (Simultan) 108
c. Uji Determinasi (R^2) 110
d. Moderated Regression Analysis (MRA) 111
D. Pembahasan 114
1. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024 114
2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 115
3. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 117
4. Pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 118
5. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender, dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 120
6. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi 121
7. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi 124
8. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi 127

9. Pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi....130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....133

A. Kesimpulan....133

B. Saran....135

DAFTAR PUSTAKA....138

DAFTAR RIWAYAT HIDUP....150

LAMPIRAN....151

Lampiran 1 : Data Panel Variabel Penelitian Tahun 2020-2024....151

Lampiran 2 : Output Pengolahan Data Menggunakan *E-Views* 12....171

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Data Pertumbuhan PDB dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024	1
Tabel 1.2	Data Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024	3
Tabel 1.3	Data Jumlah Lembaga Keuangan Syariah dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	72
Tabel 4.1	Data Kemiskinan di Indonesia	83
Tabel 4.2	Data Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia	85
Tabel 4.3	Data Pendidikan (Rerata Lama Sekolah) di Indonesia	89
Tabel 4.4	Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia	91
Tabel 4.5	Data Pengangguran Terbuka di Indonesia	93
Tabel 4.6	Data Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	95
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif	97
Tabel 4.8	Hasil Uji Chow	99
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman	100
Tabel 4.10	Hasil Uji *Lagrange Multiplier*	101
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi	103
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas	104
Tabel 4.13	Hasil Uji T (Parsial)	106
Tabel 4.14	Hasil Uji F (Simultan)	109
Tabel 4.15	Hasil Uji Determinasi (R^2)	110
Tabel 4.16	Hasil Uji Regresi Berganda	111
Tabel 4.17	Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas	102
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu kepada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilaksanakan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	’	سأل	*sa’ala*
ب	b	بدل	*badala*
ت	t	تمر	*tamr*
ث	th	ثورة	*thawrah*
ج	j	جمال	*jamal*
ح	h	حديث	*hadith*
خ	kh	خالد	*khalid*
د	d	ديوان	*diwan*
ذ	dh	مذهب	*madhhab*
ر	r	رحمن	*rahman*
ز	z	زمزم	*zamzam*
س	s	سلام	*salam*
ش	sh	شمس	*shams*
ص	s	صبر	*sabr*

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ض	d	ضمير	*damir*
ط	t	طاهر	*tahir*
ظ	z	ظهر	*zuhr*
ع	‘	عبد	*‘abd*
غ	gh	غيب	*ghayb*
ف	f	فقه	*fiqh*
ق	q	قاضي	*qadi*
ك	k	كأس	*ka’s*
ل	l	لبن	*laban*
م	m	مزمار	*mizmar*
ن	n	نوم	*nawm*
هـ	h	هبط	*habata*
و	w	وصل	*wasala*
ى	y	يسار	*yasar*

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
◌َ	a	فعل	*fa‘ala*
◌ِ	i	حسب	*hasiba*
◌ُ	u	كتب	*kutiba*

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا , ى	a	كاتب, قضى	*katib, qada*
ي	i	كريم	*karim*
و	u	حروف	*huruf*

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
وْ	aw	قول	*qawl*
يْ	ay	سيف	*sayf*
يّ	iyy (*shiddah*)	غنيّ	*ghaniyy*
وّ	uww (*shiddah*)	عدوّ	*ʻaduww*
ي	i (*nisbah*)	الغزالي	*al-Ghazali*

E. Pengecualian

Pengecualian ketentuan di atas berlaku pada:

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ’a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan *’akbar*.
2. Huruf Arab (*ta’ marbutah*) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزاة التعليم, transliterasinya: *Wizar’at al-Ta‘lim*, bukan *Wizarah al-Ta‘lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal ataupun perkataan terakhir, *ta’ marbutah* ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

a. المكتبة المنيرية — *al-Maktabah al-Muniriyyah*
b. قلعة — *qal‘ah*
c. دار وهبة — *Dar Wahbah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi isu penting yang sering dialami oleh negara berkembang. Negara yang dinilai berkembang umumnya diidentifikasi melalui keterbatasan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi oleh masyarakat, besarnya pengangguran, serta minimnya pendapatan perkapita. Dalam konteks ini, negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk melakukan upaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masif guna meningkatkan taraf hidup penduduknya.[1] Pertumbuhan ekonomi memegang peranan strategis dalam menanggulangi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi berpihak pada penduduk miskin.[2] Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan pendapatan nasional yakni dengan PDB, dimana nilai barang serta pelayanan yang diciptakan masyarakat suatu negara dalam periode khusus atau dalam setahun.[3] Kondisi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mulai tahun 2019 sampai tahun 2024 dapat diamati pada tabel di bawah ini :

---

[1] Siti Nur Aini and Ris Yuwono Yudo Nugroho, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 4, no. 1 (2023).

[2] The World Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank, 2007), 142.

[3] Bambang Widjajanta and Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Bandung: Citra Praya, 2007), 100.

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan PDB dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	PDB *Growth*	Kemiskinan
2019	5,02	9,41
2020	-2,07	9,78
2021	3,7	10,14
2022	5,31	9,54
2023	5,05	9,03
2024	5,03	8,47

Sumber : Badan Pusat Statistik[4]

Berdasarkan data diatas periode 2019-2024, jika dilihat pada tahun 2019 kondisi ekonomi Indonesia stabil sebelum adanya pandemi. Menariknya, saat 2021 disaat PDB mengalami kenaikan, angka kemiskinan justru mencapai titik tertinggi. Saat 2020, PDB turun tajam dan kemiskinan langsung mengalami kenaikan. Pada saat 2022-2024, PDB mulai tumbuh stabil di atas 5% sehingga kemiskinan mengalami penurunan.[5] Kondisi di tahun 2021, bertolak belakang dengan teori pertumbuhan ekonomi mengungkapkan peningkatan *output* nasional seharusnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Perihal ini juga menampilkan manfaat capaian pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan distribusi yang merata di seluruh kelompok masyarakat. Fenomena tersebut, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Terutama di periode 2020-2024, karena pada masa tersebut Indonesia mengalami dinamika ekonomi yang cukup signifikan, mulai dari

---

[4] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Laju Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2019-2024," *BPS*, last modified 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0IzI=/pertumbuhan-ekonomi--tahun-2025.html; Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah Tahun 2019-2024," *BPS*, last modified 2024, accessed February 15, 2026, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah--persen-.html.

[5] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Laju Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2019-2024"; Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah Tahun 2019-2024."

terjadinya pandemi Covid-19, proses pemulihan ekonomi, hingga kondisi ekonomi yang mulai membaik dan relatif stabil.

Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berhubungan yaitu tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang serta pelayanan, gender, situasi lingkungan, geografis, serta lokasi.[6] Di samping itu, Bank Dunia menjelaskan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar, serta lokasi geografis.[7] Kemiskinan juga bisa dikarenakan beragam faktor lain seperti penghasilan yang rendah, pengangguran, kurangnya pendidikan atau ketrampilan yang tidak sesuai, serta ketidakstabilan ekonomi.[8] Berdasarkan tinjauan teoritas diatas, bisa disimpulkan bahwa kemiskinan ialah peristiwa yang kompleks yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Dalam mengaitkan teori tersebut dengan data lapangan, penelitian ini dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan data dan konsistensi data pada tingkat provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada beberapa variabel yang merepresentasikan kondisi ekonomi dan sosial, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendidikan, IPG, Pengangguran, dan Kemiskinan yang bisa terlihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Data Upah Minimum Provinsi (UMP), Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	UMP	Pendidikan	IPG	PT	Presentase Kemiskinan
2020	Rp. 2.672.372,36	8,90	91,35	7,07	9,78

[6] Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Cet. I. (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 15.

[7] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 58-62*.

[8] Ade Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Cet. Perta. (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024), 9.

2021	Rp. 2.687.723,69	8,97	91,60	6,49	10,14
2022	Rp. 2.729.463,16	9,08	92,05	5,86	9,54
2023	Rp. 2.923.309,40	9,13	92,29	5,32	9,36
2024	Rp. 3.113.359,85	9,22	92,46	4,91	9,03

Sumber : Kemnaker[9] dan Badan Pusat Statistik[10]

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendapatan (upah).[11] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi naik, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[12] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[13] Jika dilihat pada data tahun 2020-2021, ketika UMP mengalami kenaikan, kemiskinan justru mengalami peningkatan.[14]

---

[9] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020-2024," *Satudata Kemnaker*, last modified 2024, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252.

[10] Badan Pusat Statistik, "Potret Pendidikan Indonesia (Statistik Pendidikan) Tahun 2020," *Badan Pusat Statistik* (2020); Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan Tahun 2021," *Badan Pusat Statistik* (2021); Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan Tahun 2022," *Badan Pusat Statistik* (2022); Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan Tahun 2023," *Badan Pusat Statistik* 12 (2023); Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan Tahun 2024," *Badan Pusat Statistik* 13 (2024); Badan Pusat Statistik, "Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2020-2024," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2024, accessed February 15, 2026, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html; Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2020-2024," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2025.html; Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah Tahun 2019-2024."

[11] Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, and Dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Cet. I. (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015); Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[12] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Ahlimedia Press* (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022), 41.

[13] Aris Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*, Cet. I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 92.

[14] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020-2024."

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan data. Selain itu, kenaikan UMP di Indonesia belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara merata, terutama pada masa pandemi dan pascapandemi. Di beberapa wilayah, peningkatan upah minimum belum diikuti peningkatan kesejahteraan akibat tingginya biaya hidup dan dominasi sektor informal.[15]

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendidikan.[16] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[17] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[18] Jika dilihat data BPS yang tertera pada tabel 1.2, saat 2021 ketika pendidikan mengalami kenaikan/peningkatan, kemiskinan ikut mengalami kenaikan.[19] Kondisi tersebut, memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan data. Selain itu, peningkatan pendidikan belum sepenuhnya mampu mengurangi kemiskinan karena masih terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Data BPS menunjukkan pengangguran lulusan SMA dan SMK masih relatif tinggi pascapademi dengan lulusan SMA/SMK menjadi konstributor terbesar TPT Indonesia pada tahun 2021.[20]

---

[15] Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibirium* 10, no. 2 (2021): 121–130.

[16] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[17] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[18] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

[19] Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan Tahun 2021."

[20] Arif Hermawan et al., "Kesenjangan Kondisi Pengangguran Lulusan SMK / MAK Di Indonesia : Analisis Antargender Dan Variabel-Variabel Yang Memengaruhinya," *J-naker (Jurnal Ketenagkerjaan)* 18, no. 3 (2023); Marsya Raihan, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "Ketidaksesuaian Pendidikan Dan Lapangan Kerja Bagi Lulusan Perguruan Tinggi," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 4 (2025): 1385–1389.

Di samping faktor UMP dan pendidikan, kemiskinan juga dipengaruhi oleh gender.[21] Gender merupakan faktor yang sangat memengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas.[22] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[23] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam akses pendidikan dan ekonomi, punya peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[24] Jika dilihat pada data tahun 2020 sampai 2021, IPG mengalami kenaikan. Kondisi ini diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan.[25] Kondisi tersebut menampilkan adanya kesenjangan antara teori dan data. Selain itu, meskipun IPG di Indonesia cenderung meningkat, kesenjangan akses ekonomi dan partisipasi perempuan dalam sektor produktif masih menjadi tantangan, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum optimal.[26]

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran.[27] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, sehingga menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya memengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan

---

[21] Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin, 15*.

[22] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[23] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

[24] Shifa Nur Amalia and Lestari Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia," *Sosio Informa* 9, no. 2 (2023): 119–134.

[25] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2020-2024."

[26] Aurelia Khoirunisa Hayya, Nairobi, and Arif Darmawan, "Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pembangunan Di Indonesia : Kajian Teoritis Dan Empiris," *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 5 (2025): 5934–5944; Ashya Ravika Mahar Rhani, Arini Salma Aulia, and Jesslyn Florencia Komala, "Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima Di Indonesia," *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)* 3, no. 2 (2024): 164–183.

[27] Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, 9*.

ekonomi.[28] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[29] Namun, pada data tahun 2021 memperlihatkan, tingkat pengangguran mengalami penurunun. Tetapi, kemiskinan justru mengalami kenaikan.[30] Kondisi tersebut menampilkan adanya kesenjangan antara teori dan data. Selain itu, penurunan tingkat pengangguran di Indonesia belum sepenuhnya diikuti penurunan kemiskinan karena sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor informal dengan tingkat pendapatan rendah.[31]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[32] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam mempengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[33] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [34] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan

---

[28] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[29] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

[30] Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2020-2024."

[31] Arrijal Rachman, "Bukan Booming Pekerja Informal, Kementerian Ungkap Masalah Utama RI," *CNBC Indonesia*, last modified 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20251009140045-4-674385/bukan-booming-pekerja-informal-kemenkeu-ungkap-masalah-utama-ri.

[32] Eva Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty," *Proceeding 2nd Medan International Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 865–881.

[33] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[34] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

kemiskinan di Indonesia.[35] Perihal ini dapat dilihat dengan peningkatan jaringan kantor BUS yang tujuannya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat. Sehingga dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Jumlah Lembaga Keuangan Syariah dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Bank Umum Syari'ah		Total BUS	Presentase Kemiskinan
	KPO/KC	KCP/UPS		
2020	488	1.351	1.839	9,78
2021	500	1.343	1.843	10,14
2022	392	1.603	1.995	9,54
2023	393	1.574	1.967	9,36
2024	427	1.574	2.001	9,03

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan[36] dan Badan Pusat Statistik[37]

Secara teoritis, ekspansi lembaga keuangan syariah melalui penambahan jaringan kantor harusnya berbanding terbalik dengan penurunan tingkat kemiskinan karena kemudahan akses modal bagi masyarakat. Di tahun 2021, ketika Kantor BUS bertambah jadi 1.843 unit justru dibarengi dengan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 10,14%. Sedangkan di tahun 2023, ketika Kantor BUS menurun menjadi 1.967 unit justru dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,36%.[38] Kondisi tersebut menampilkan perkembangan BUS terdapat kesenjangan yang nyata antara kuantitas lembaga dengan efektivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

[35] Indah Yuliana and Aliya Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan," *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 2 (2025): 50–54.

[36] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020," *Otoritas Jasa Keuangan* (2020); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021," *Otoritas Jasa Keuangan* (2021); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022," *Otoritas Jasa Keuangan* (2022); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023," *Otoritas Jasa Keuangan*, no. December (2023); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2024," *Otoritas Jasa Keuangan*, no. December (2024).

[37] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah Tahun 2019-2024."

[38] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023."

Dalam berbagai permasalahan kemiskinan, penelitian-penelitian terdahulu juga menampilkan gambaran empiris terkait peran UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan jumlah lembaga keuangan syari'ah. Seperti studi Erliza Millenia Putri dan Dewi Zaini Putri menyebutkan upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, namun tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan.[39] Penelitian yang dilaksanakan Rizaldi Naftali, George Manuel Viktor Kawung, dan Hanly Fenly Djohar Siwu menyebutkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.[40]

Penelitian yang dilaksanakan Rosyadi menyebutkan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.[41] Penelitian Solmidawati, Nurdin, dan Yolanda Sari menyebutkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[42] Penelitian yang dilaksanakan Sinarta Putra P. Subakti, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing menyebutkan rerata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap total penduduk miskin.[43] Penelitian Bella Kusumawati dan Surjiyanto menyebutkan IPG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[44] Sementara studi yang dilaksanakan Novita Sari Berutu, Asnawi, dan

---

[39] Erliza Millenia and Dewi Zaini, "Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di," *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 10, no. November (2021): 106–114.

[40] Rizaldi Naftali Welang, George Manuel Viktor Kawung, and Hanly Fenly Djohar Siwu, "Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Din Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2022," *Jurnal berkala Imliah Efisiensi* 24, no. 4 (2024): 61–71.

[41] Rosyadi, "Pengaruh Daya Beli Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2017," *Prosiding SATIESP* (2019): 45–55.

[42] Yolanda Sari, Fakultas Ekonomi, and Universitas Muhammadiyah Jambi, "Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2026): 1330–1338.

[43] Sinarta Putra P Surbakti et al., "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode," *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 37–45.

[44] Bella Kusumawati and Sarjiyanto, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 22, no. 1 (2022): 1–10.

Muhammad Roni IPG tidak mempengaruhi kemiskinan.[45] Penelitian Ziddan Muhammad Al-Badri menyebutkan bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.[46] Di samping itu, penelitian Ayu Fitriana, Muna Sifiana, Siti Nahdiatun Nisa, dkk menyebutkan lembaga keuangan syariah berupa BMT punya peran yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan.[47]

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial karena secara langsung berhubungan dengan isu kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada area kajian yang masih minim perhatian dalam literatur penelitian sebelumnya, yakni mengintegrasikan variabel UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan. Integrasi tersebut dianalisis melalui pendekatan ekonomi Islam dengan menjadikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini ada di penggunaan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel yang diasumsikan mampu menguatkan atau melemahkan keterkaitan antar variabel independen dan kemiskinan. Di samping itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif karena dilaksanakan pada 33 Provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2020-2024, yang mencakup masa pandemi hingga pascapandemi, termasuk fase pemulihan ketika kondisi ekonomi mulai membaik. Sehingga mampu menampilkan gambaran yang lebih mendalam terkait dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Maka dari itu, penelitian ini diupayakan bisa berkonstribusi signifikan, baik dalam memperkaya kajian akademis terkait determinasi kemiskinan maupun sebagai dasar empiris dalam merancang strategi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

---

[45] Novita Sari Berutu, Asnawi, and Muhammad Roni, "Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 15 Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 8, no. 1 (2025).

[46] Ziddan Muhammad Al Badri, "Analisis Empiris Hubungan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kemiskinan Di Indonesia : Studi Pada Perbankan Syariah, Saham Syariah, Dan Asuransi Syariah," *Jurnal Bisnis Net* 2023, no. 1 (2025): 164–171.

[47] Ayu Fitriana et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Inisiatif :Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 3 (2024).

B. Identifikasi Masalah

Dari penjabaran pada latar belakang masalah, identifikasi masalah fokus utama pada adanya kesenjangan (*gap*) antara teori dan data lapangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024. Berikut poin-poin identifikasi masalah secara rinci :

1. Ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi PDB dan kemiskinan : Saat 2021, peningkatan PDB tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
2. Kesenjangan UMP : Secara teoritis, kenaikan upah seharusnya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, namun data tahun 2020-2021 menampilkan saat UMP naik, angka kemiskinan justru meningkat.
3. Kesenjangan sektor pendidikan : Teori menyatakan peningkatan jenjang pendidikan berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan. Namun, saat 2021, saat tingkat pendidikan naik, angka kemiskinan di Indonesia juga ikut mengalami kenaikan.
4. Kesenjangan IPG : Pembangunan gender seharusnya menurunkan kemiskinan melalui kesetaraan akses. Namun, saat 2021, kenaikan IPG justru diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan.
5. Kesenjangan pengangguran terbuka : Secara umum pengangguran memperburuk kemiskinan. Namun, data tahun 2021 menampilkan tingkat pengangguran mengalami penurunan, tetapi kemiskinan justru mengalami kenaikan.
6. Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) : Ekspansi jaringan kantor lembaga keuangan syariah secara teoritis harusnya berbanding terbalik dengan level kemiskinan. Namun, terdapat kesenjangan nyata dimana saat 2021 penambahan jumlah kantor unit dibarengi dengan kenaikan angka kemiskinan serta di tahun 2023, penurunan jumlah kantor unit justru dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan.

C. Pembatasan Masalah

Sebagai upaya menjaga konsistensi arah penelitian agar tetap berada dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan perlu adanya batasan masalah yang jelas. Adapun batasan pada penelitian ini yakni :

1. Penelitian ini terbatas 33 wilayah provinsi se-Indonesia dan mencakup periode waktu antara tahun 2020-2024.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada empat variabel independen, yaitu UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka. Serta satu variabel dependen, yaitu kemiskinan.
3. Penelitian ini juga membahas peran jumlah Lembaga Keuangan Syariah sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk mengamati apakah jumlah LKS dapat menguatkan atau melemahkan pengaruhnya variabel independen kepada kemiskinan.
4. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang sumbernya dari Kemenaker, BPS, OJK, dan dokumen resmi lainnya yang masih relevan.
5. Pengukuran kemiskinan pada penelitian ini mengacu kepada indikator presentase kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh BPS.
6. Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi moderasi dengan bantuan perangkat lunak statistik.

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai fenomena yang telah dianalisis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun yakni :

1. Apakah UMP mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?
2. Apakah pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?
3. Apakah IPG mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?
4. Apakah pengangguran terbuka mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?

5. Apakah UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka mempengaruhi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?
6. Apakah jumlah Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024?
7. Apakah jumlah Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024?
8. Apakah jumlah Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024?
9. Apakah jumlah Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang sudah tersampaikan, maka tujuan studi ini yakni :

1. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran UMP berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
2. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran UMP pendidikan berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
3. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran IPG berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
4. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran pengangguran terbuka berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.

5. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis sejauh mana UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
6. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran jumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam memengaruhi kekuatan hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
7. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran jumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam memengaruhi kekuatan hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
8. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran jumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam memengaruhi kekuatan hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.
9. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis peran jumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam memengaruhi kekuatan hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan bisa berkonstribusi secara teoritis yakni:

a. Penelitian ini diupayakan bisa menambah literatur terkait hubungan antara kebijakan UMP, pendidikan, kesetaraan gender, pengangguran terbuka, dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.
b. Dengan memasukkan IPG dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah sebagai variabel, penelitian ini turut mengembangkan teori pembangunan manusia dan ekonomi.
c. Data empiris dari Indonesia periode 2020-2024 dapat dijadikan dasar pengujian dan pengembangan teori terkait pengaruh kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, kesetaraan gender, serta instrumen Lembaga.

d. Keuangan Syariah yang mempunyai peran besar dalam pembangunan ekonomi.
e. Penggunaan model regresi linier berganda dengan uji moderasi mendukung pemahaman yang lebih utuh terhadap dinamika hubungan antar variabel dari waktu ke waktu, sekaligus memperkaya metode penelitian dibidang ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah Indonesia, hasil studi ini bisa jadi masukan dan merancang kebijakan upah minimum dan peningkatan dalam dunia pendidikan supaya lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan.
b. Bagi lembaga terkait, khususnya Kemenaker dan BPS, studi ini memberikan data tambahan yang dapat menguatkan analisis ketenagakerjaan dan kemiskinan.
c. Bagi lembaga OJK, studi ini bisa jadi referensi empiris tentang efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam mengurangi kemiskinan, alhasil bisa dijadikan dasar untuk merancang strategi jaringan yang lebih inklusif.
d. Bagi masyarakat akademis, penelitian memberikan wawasan baru terkait keterkaitan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, kesetaraan gender, dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembangunan sosial-ekonomi, yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi penelitian mudah dipahami, hasil kajian kuantitatif ini disusun secara terorganisasi dengan memperhatikan keterkaitan antarbagian pembahasan. Susunan tersebut bertujuan menciptakan alur yang jelas dan terpadu dalam penyajian penelitian. Secara keseluruhan, penulisan ini dibagi menjadi lima bab utama, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bagian ini memuat gambaran awal penelitian yang terdiri atas penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi dan ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta susunan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka. Kuantitas lembaga keuangan Islam, penyebab kemiskinan, dan penelitian teoritis tentang topik tersebut semuanya dibahas dalam bab ini. Penjelasan tentang analisis data, studi yang relevan, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian semuanya diberikan oleh deskripsi teoritis ini.

BAB III Metode Penelitian. Variabel penelitian dan definisi operasional, lokasi dan waktu penelitian, sampel dan populasi penelitian, data dan sumber, metode pengumpulan data, pengujian untuk pemilihan model dan asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan metode analisis semuanya dijelaskan secara rinci dalam bab ini. Bab ini menjelaskan tahapan ataupun langkah yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan temuan dari hasil studi yang mencakup analisis deskriptif variabel, statistik deskriptif, analisis inferensial, serta pengujian hipotesis dengan mempergunakan E-Views 12 yang kemudian diikuti dengan pembahasan. Di samping itu, bab ini berperan dalam menguji kesesuaian hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V Penutup. Bab berikut menyajikan kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian sebagai jawaban terkait rumusan permasalahan, serta memuat saran yang berkiatan dengan pelaksanaan dan pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Deskripsi Teori Kemiskinan

Ditinjau dari aspek etimologi, istilah kemiskinan memiliki asal-usul dari kata "miskin" yang merujuk pada kondisi kekurangan harta atau keterbatasan dalam terpenuhi kebutuhan hidup. Menurut BPS, kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam terpenuhi standar kebutuhan pokok minimal yang harus terpenuhi agar individu dapat menjalani kehidupan yang layak.[48] Kemiskinan mencerminkan kondisi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Di samping itu, kemiskinan pun ditandai dengan rendahnya akses atas air bersih, keterbatasan literasi, ketidakberdayaan, serta minimnya partisipasi dan kebebasan dalm kehidupan sosial.[49]

Beberapa konsep kemiskinan yang sering dipergunakan pada analisis sosial dan ekonomi yakni :

a. Kemiskinan absolut : kemiskinan yang mengacu kepada kondisi dimana individu tidak mampu terpenuhi kebutuhan dasar minimum untuk menjamin keberlanjutan kehidupan pada tingkat yang layak. Kemiskinan ini, diukur berdasarkan standar tertentu yang berlaku umum, seperti tingkat pendapatan yang belum mencapai batas minimum kesejahteraan sebagaimana ditentukan oleh garis kemiskinan.[50]

---

[48] Debrina Vita Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), 2.

[49] Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, Edisi I. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 8.

[50] Wahyu Hidayat Riyanto, *Model Kelembagaan Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan*, Cet. I. (Malang: UMMPRess, 2025), 10.

b. Kemiskinan relatif : kemiskinan yang mengacu pada situasi ketika pendapatan individu berada di bawah rerata masyakarat, alhasil tidak mampu terpenuhi standar hidup yang berlaku.[51] Kemiskinan ini, berhubungan dengan distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat.
c. Kemiskinan struktural : kemiskinan yang dikarenakan struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, deskriminasi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok miskin.
d. Kemiskinan kultural : kemiskinan yang terkait dengan nilai, norma, dan budaya yang dianut oleh individu atau kelompok, yang dapat menghambat mereka untuk keluar dari kemiskinan. [52]

2. Indikator Kemiskinan

Seseorang dikategorikan miskin apabila tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya, baik dalam bentuk pangan maupun non-pangan. Penentuan kondisi tersebut umumnya menggunakan ukuran *Head Count Index* (HCI), kelompok populasi yang tergolong berada di bawah standar garis kemiskinan.[53] Rumus perhitungannya sebagai berikut:[54]

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]$$

Keterangan :

α = 0

z = Garis kemiskinan

---

[51] Yolanda Masnita et al., *Pengantar Kebijakan Publik Dalam Perspektif Ekonomi*, Cet. I. (Kota Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2025), 180.

[52] Ibid, 11.

[53] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin, 13*.

[54] BPS Provinsi Jawa Timur, "Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2024 Volume 3, 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur* 3 (2024), 19.

y_i = Rerata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang ada dibawahnya garis kemiskinan (i = 1,2,3,...,q), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang ada dibawahnya garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi jadi suatu hal yang penting dalam menanggulangi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi berpihak pada penduduk miskin.[55] Kemiskinan tidak hanya terpengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan pun terpengaruhi beragam faktor yang saling berhubungan yaitu tingkatan pendapatan, edukasi, akses kepada barang serta pelayanan, gender, situasi lingkungan, geografis, serta lokasi.[56] Di samping itu, Bank Dunia menjelaskan bahwa faktor kunci yang memengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, pekerjaan, akses kepada layanan dan infrastruktur dasar, serta lokasi geografis.[57] Kemiskinan pun bisa dikarenakan beragam faktor lain seperti penghasilan yang rendah, pengangguran, kurangnya pendidikan atau ketrampilan yang tidak sesuai, serta ketidakstabilan ekonomi.[58] Berdasarkan berbagai teori dan pandangan lembaga internasional, faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dapat dirumuskan yakni :

a. Pendapatan (Upah)

Pendapatan ialah seluruh penerimaan, baik tunai ataupun non tunai yang didapatkan dari hasil penjualan barang atau jasa pada rentang waktu tertentu.[59] Pendapatan sumbernya dari kemampuan ekonomi yang tercermin dari pendapatan seseorang menjadi faktor utama dalam

---

[55] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 142*.

[56] Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Cet. I. (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 15.

[57] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 58-62*.

[58] Ade Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Cet. Perta. (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024), 9.

[59] Anggia Ramadhan, Radiyan Rahim, and Nurul Nabila Utami, *Teori Pendapatan (Studi Kasus : Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*, Cetakan Pe. (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023), 1.

pemenuhan kebutuhan harian serta berkontribusi terhadap keberlanjutan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pendapatan meliputi berbagai bentuk penerimaan ekonomi, seperti upah, gaji, sewa, dividen, serta keuntungan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, setahun, atau jangka waktu lama.[60] Tekanan biaya hidup pekerja yang semakin tinggi, berdampak pada tuntutan pekerja akan kenaikan upah minimum.[61]

Upah minimum ialah upah yang diperkirakan paling layak untuk mencukupi kebutuhan minimum pekerja. Regulasi mengenai pengawasan pengupahan oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 yang mengatur ketentuan Upah Minimum.[62] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi bertambah, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[63] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[64] Upah minimum terbagi jadi beberapa indikator, yakni :

1) Upah minimum provinsi.
2) Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.[65]

b. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Kesempatan kerja dapat dimaknai sebagai jumlah peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat dalam pasar tenaga kerja. Konsep ini

---

[60] Rio Christoper and Rosmiyati Chodijah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2017): 35–52.

[61] Putra, Wiridin, and Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja.", 40.

[62] Sukwiaty, Sudirman Jamal, and Slamet Sukamto, *Ekonomi SMA Kelas XI*, ed. PT Ghalia Indonesia Printing, Cet. I. (Bogor, 2009), 11.

[63] Putra, Wiridin, and Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja.", 41.

[64] Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia, 92*.

[65] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021Tentang Pengupahan," no. 086163 (2021).

berhubungan erat dengan kemampuan sektor usaha dalam menyediakan dan menyerap tenaga kerja. Apabila jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maka akan muncul ketidakseimbangan yang menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak terserap. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendukung meningkatnya tingkat pengangguran.[66]

Siapa pun yang aktif mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari per minggu, atau sama sekali tidak bekerja dianggap sebagai pengangguran. Orang-orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil, seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan mereka yang berada di pasar tenaga kerja antara usia 15 sampai 64 tahun, dianggap sebagai pengangguran.[67] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, sehingga menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya mempengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.[68] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[69] Selain itu, karakteristik pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia juga tidak dapat terlepas dari struktur pasar tenaga kerja yang bersifat dualisme. Pasar tenaga kerja membagi pasar menjadi dua bagian : sektor informal dan informal. Sektor informal ditandai oleh pekerjaan tidak tetap, upah rendah, dan kurangnya jaminan sosial, sedangkan sektor formal biasanya menawarkan upah lebih tingi, stabilitas kerja, dan perlindungan hukum.[70]

---

[66] Suparmoko, *Ekonomi SMA Kelas XI*, Edisi I. (Bogor: Yudhistira, 2007), 3.

[67] Maudina Armini et al., *Dari Angka Menuju Makna : Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia*, Cet. I. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), 128.

[68] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[69] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

[70] Ibid.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat di bagi ke dalam empat golongan yaitu :

1) Pengangguran terbuka : ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pengangguran. Ketika jumlah tenaga kerja bertambah lebih cepat dibandingkan dengan peluang kerja yang tersedia, sebagian angkatan kerja tidak dapat terserap dan berpotensi menjadi pengangguran terbuka dalam jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan terjadinya pengangguran terbuka, yaitu individu yang tidak bekerja sama sekali dan aktif mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran terbuka juga dapat dipicu oleh melemahnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan produksi dan efisiensi tenaga kerja di berbagai sektor.[71] Pengangguran terbuka memiliki indikator pengukuran yakni dengan menghitung seberapa besar Tingkat Pengangguran Terbuka dengan rumus yakni:[72]

   Tingkat Pengangguran Terbuka : $\frac{\textbf{\textit{Jumlah Pengangguran Terbuka}}}{\textbf{\textit{Angkatan Kerja}}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$

2) Pengangguran tersembunyi : pemanfaatan tenaga kerja yang punya produktivitas sangat rendah, akibatnya tenaga kerja seperti pegawai, buruh, maupun petani, dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa memengaruhi tingkat produksi secara keseluruhan.[73]

3) Pengangguran musimam : pengangguran ini berhubungan dengan perubahan aktivitas ekonomi jangka pendek dan sering dijumpai pada sektor pertanian. Situasi ini dikarenakan sifat kegiatan pertanian yang bersifat musiman, akibatnya pada periode di luar musim tanam dan panen, tenaga kerja sektor tersebut relatif tidak punya pekerjaan. Kondisi ini berlangsung hingga memasuki siklus produksi berikutnya.[74]

---

[71] Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro*, Edisi I. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 201.
[72] Alam S, *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas XI* (Sidoarjo: Penerbit Erlangga, 2007), 9.
[73] Ibid, 202.
[74] Prathama Rahardja and Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar*, Edisi 4. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 185.

4) Setengah menganggur : di negara berkembang, intensitas perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan yang relatif tinggi tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Akibatnya, sebagian penduduk yang berpindah ke kota tidak mampu terserap dalam pasar tenaga kerja serta jadi penganggur penuh waktu. Di samping itu, terdapat pula kelompok yang bekerja dalam kondisi setengah menganggur, yaitu mereka yang punya pekerjaan tetapi dengan jam kerja yang sangat terbatas serta tidak optimal, alhasil produktivitasnya relatif rendah.[75]

c. Pendidikan atau Ketrampilan

Menurut Todaro, pendidikan merupakan unsur utama dalam meraih kehidupan yang layak dan bermakna. Pendidikan punya peran penting dalam membantu negara berkembang menguasai teknologi modern serta membangun kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.[76] Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan beriorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai kebutuhan pasar kerja. Seorang tenaga kerja harus selalu lentur dan berwawasan agar pendidikan keterampilan dan keahlian bisa disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis-jenis keterampilan serta profesi yang selalu berubah.[77]

Pemerintah secara konsisten memperluas akses dalam hal pendidikan formal berkualitas sebagai pilar pemutus rantai kemiskinan, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan. Selain pendidikan formal, pemerintah juga gencar

---

[75] Ibrahim, *Ekonomi Makro, 202-203*.

[76] Mardiansah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 1, no. 1 (2023): 37–51.

[77] Zuchri Abdussamad, *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Cet. I. (Kota Makassar: CV. Syair Media Press, 2023), 183.

meningkatkan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan program Kartu Prakerja. Inisiatif tersebut dirancang guna membekali angkatan kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri saat ini, sehingga meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan layak dengan upah memadai agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga secara signifikan.[78]

Peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan hasil investasi yang lebih besar serta jadi strategi kunci dalam mengurangi kemiskinan yang berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat.[79] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[80] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya, alhasil dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[81] Tingkat pendidikan merupakan komponen penting dalam pengukuran kualitas penduduk serta aksesibilitas pendidikan dalam suatu populasi. Pencapaian pendidikan individu maupun kelompok penduduk sering dijadikan sebagai dasar dalam berbagai kajian analitis, yakni:[82]

1) Tingkat pendidikan rendah : menggambarkan persentase penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang dasar maupun menengah. Rendahnya capaian pendidikan tersebut dapat menjadi kendala dalam memperoleh pekerjaan berkualitas serta mempersempit peluang ekonomi.

---

[78] Oman Sukmana et al., *Sosiologi Masalah Sosial (Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggualangan)*, Cet. I. (Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025), 36.

[79] Mardiansah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat."

[80] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

[81] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[82] Kanada Rabial and Zulkipli, *Perencanaan Pendidikan : Kajian Teori Dan Aplikasi*, Edisi I. (Jakarta: Kencana, 2024), 188.

2) Tingkat pendidikan tinggi : menggambarkan proporsi penduduk yang telah mencapai pendidikan pada tingkat sarjana maupun jenjang pendidikan tinggi lainnya. Pendidikan pada tingkat ini sering kali menjadi syarat utama dalam pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus serta kegiatan penelitian.
3) Analisis jenis kelamin : tingkat pendidikan sering dianalisis berdasarkan kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk mengkaji perbedaan akses terhadap pendidikan serta peluang kerja.
4) Pengaruh sosial dan ekonomi : tingkat pendidikan berhubungan erat dengan faktor sosial dan ekonomi, di mana pencapaian pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik.
5) Indeks pendidikan : pengukuran pendidikan yang lebih kompleks umumnya dilakukan dengan menggabungkan berbagai aspek, termasuk capaian pendidikan, mutu pendidikan, serta akses terhadap pendidikan. Sehingga menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pendidikan dalam suatu populasi..[83]

Pengukuran variabel pendidikan dilakukan melalui indikator rerata lama sekolah yang merefleksikan capaian pendidikan masyarakat. Indikator ini tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan di suatu daerah, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan indeks pembangunan manusia. Secara konseptual, lama pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah.[84] Guna menghitung rerata lama sekolah menggunakan rumus berikut:[85]

---

[83] Ibid, 188-189.

[84] Asyraf Suryadin et al., *Sekolah Kesetaraan Dan Tantangan Global (Studi Analisis Kebutuhan Pengembangan Model Sekolah Kesetaraan Di Kepulauan Bangka Belitung.* (DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 2.

[85] Muhammad Reza Aulia et al., *Ekonomi Hijau : Harmonisasi Keadilan Sosial Dan Lingkungan Di Provinsi Aceh*, Cet. I. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 81.

$$RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Dimana :

RLS = rerata lama sekolah

X_i = lama sekolah penduduk ke i yang bersekolah selama 15 tahun ke atas

N = jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

d. Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar

Kemiskinan tidak terlepas dari keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar. Maka itu, indikator lokalitas dipergunakan untuk menggambarkan variasi tingkat akses antarwilayah. Variabel-variabel lokalitas ini mencerminkan kapasitas dasar daerah serta menampilkan pengaruh karakteristik kedaerahan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh varaibel ekonomi lainnya.[86] Berbagai indikator akses dalam hal fasilitas dan infrastruktur terbukti memiliki kemampuan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, yang diperlihatkan oleh nilai koefisien yang positif bermakna secara statistik, yaitu :

1) Rumah tangga di wilayah pedesaan yang mempunya iakses lebih luas terhadap pendidikan tinggi menengah relatif punya peluang yang lebih kecil untuk berada dalam kondisi miskin.
2) Akses atas pelatihan atau kursus informal berperan penting dalam mendukung mobilitas ekonomi ke arah yang lebih baik, terutama di kawasan perkotaan
3) Ketersediaan akses atas lembaga kredit lokal secara signfikan mampu meningkatkan tingkat pengeluaran rumah tangga serta menurunkan kemungkinan terjadinya kemiskinan
4) Akses kepada infrastruktur jalan menampilkan hubungan positif dengan peningkatan tingkat konsumsi masyarakat

---

[86] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 61*.

5) Akses ke layanan telekomunikasi tidak menampilkan hubungan bersignifikan kepada konsumsi secara nasional, namun memengaruhi yang cukup berarti di beberapa wilayah tertentu.[87]

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender merupakan faktor yang sangat memengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas.[88] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[89] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam akses pendidikan dan ekonomi, memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[90]

United Nation Development Programme (UNDP), meluncurkan beberapa indeks yang semuanya berhubungan dengan kemiskinan. Indeks-indeks tersebut antara lain :

1) *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI atau IPM merupakan suatu ringkasan ukuran pembangunan manusia dari sisi yang lebih luas. HDI mengukur pencapaian rata-rata negara dalam tida dimensi dasar pembangunan, yaitu hidup yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.[91]
2) *The Human Poverty Index* (HPI) atai indeks kemiskinan manusia. Indeks ini terbagi dua, *yaitu human poverty index for developing countries* (HPI-1) dan *human poverty index for selected* OECD

---

[87] Ibid, 62.

[88] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[89] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

[90] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

[91] Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan,* 54-55.

countries (HPI-2). HPI merupakan suatu indeks untuk mengukur kekurangan yang ada pada HDI. Oleh karena itu, dimensi yang ada pada HDI juga ada pada HPI, namun diukur dengan cara yang berbeda dan lebih khusus.[92]

3) *The Gender Related Development Index* (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG). GDI adalah suatu indeks yang mengukur ketimpangan atau ketidakadilan (*inequality*) antara laki-laki dan perempuan.[93] Pengukuran IPG dilakukan dengan membandingkan nilai IPM berdasarkan jenis kelamin, sehingga memungkinkan untuk melihat perbedaan tingkat pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Parameter yang dipergunakan untuk mengukurnya yaitu menggunakan IPG dinyatakan dalam rentang nilai 0 sampai 100 sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, di mana nilai yang semakin mendekati 100 mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai IPG semakin menjauhi angka 100 maka semakin lebar ketimpangan gender menurut jenis kelamin.[94] Untuk menghitungnya menggunakan rumus yakni :[95]

$$\boldsymbol{IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki}\ x\ 100}$$

4) *The Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). GEM merupakan indeks yang mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen, serta

---

[92] I*bid*.

[93] Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan, 55*.

[94] Kusmawaty Matara et al., *Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah*, Cet. I. (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021), 83.

[95] Badan Pusat Statistik Kutai Timur, "Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Kutai Timur 2022" (2022), 10.

dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempian sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi.[96]

f. Kondisi Geografis dan Lingkungan

Keterpencilan wilayah mengakibatkan minimnya akses infrastruktur, pasar, dan layanan dasar. Wilayah terpencil seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan, alhasil masyarakatnya tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.[97] Perbedaan kondisi antarwilayah menunjukkan bahwa lokasi geografis turut berperan dalam variasi tingkat kemiskinan. Dengan karakteristik wilayah Indonesia yang luas, penggunaan pendekatan desagregasi geografis dapat membantu mengungkap ketimpangan secara lebih mendalam sekaligus mendukung penentuan strategi penanggulangan kemiskinan pada tingkat yang lebih terfokus.[98]

Selain mempertimbangkan aspek geografis, penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Kondisi lingkungan fisik : lingkungan fisik memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di dalam masyarakat dan wilayah. Faktor-faktor seperti kondisi perumahan, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan paparan terhadap bahaya lingkungan memiliki dampak langsung dan nyata terhadap kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga.[99]
2) Akses atas kekayaan alam : akses atas kekayaan alam memiliki implikasi yang sangat besar kepada tingkat kemiskinan. Kekayaan alam seperti lahan, hutan, dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi dan ketahanan pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

---

[96] Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan,* 55-56.
[97] Riyanto, *Model Kelembagaan Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan,* 11.
[98] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.
[99] Shadu Satwika Wijaya, Guntur Gunarto, and Lilis Sri Sulistiani, *Pengentasan Kemiskinan : Agenda Yang Tidak Pernah Selesai*, Cet. I. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), 47.

Namun, keterbatasan akses dan ketidakpastian kepemilikan lahan dapat memicu ketimpangan yang menghambat produktvitas serta kemajuan ekonomi. Di samping itu, eksploitasi berlebihan menyebabkan degradasi lingkungan yang turut mengancam keberlangsungan ekonomi jangka panjang, alhasil diperlukan kebijakan yang menjamin distribusi adil, pengelolaan berkelanjutan, dan peluang inklusif demi mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[100]

g. Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi, seperti fluktuasi siklus bisnis, krisis keuangan, atau guncangan global, memperburuk kemiskinan dengan meningkatkan pengangguran, upah riil, dan memperlemah akses kepada layanan dasar. Alhasil menciptakan lingkaran setan dimana kemiskinan tinggi justru menghambat stabilitas melalui rendahnya permintaan agregat dan ketimpangan pendapatan.[101] Di Indonesia, ketidakstabilan ini terlihat dari kerentanan masyarakat miskin terhdap guncangan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata gagal mengurangi kemiskinan multidimensi karena distribusi manfaat yang timpang dan akses terbatas bagi kelompok rentan.[102]

4. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan pun dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah.[103] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam memengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip

---

[100] Ibid, 48.

[101] Miftakhur Rohmah et al., "Dampak Globalisasi, Kemiskinan, Dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia," *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 9, no. 1 (2024): 1–24.

[102] Dewa Putu Yudi Pardita et al., "Anlysis of Poverty Structure in Indonesia Using a Multifactorial Approach," *Jurnal ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* 13, no. 2 (2024): 184–198.

[103] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty", 865-881.

maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[104] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [105] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia[106]

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang dipergunakan untuk mempertemukan antara masyarakat yang punya kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk terpenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan syariah adalah institusi yang menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah, dengan peran dalam mengelola penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali untuk mendukung pembiayaan pembanguna. Alhasil diberikan keleluasaan untuk melakukan transaksi bisnis guna terpenuhi kebutuhan hidup manusia dan mencapai kesejahteraan.[107] Dalam ekonomi Islam, fungsi intermdiasi keuangan syariah harus melampaui tujuan intermediasi konvensional, terutama dalam berkontribusi pada realisasi tujuan sosial-ekonomi yang luas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *maqashid* syariah. Alih-alih hanya menyalurkan dana surplus ke unit defisit modal, *Islamic Financial Intermediaries* (IFIs) harus berpartisipasi dalam upaya untuk mencapai lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Serta

---

[104] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[105] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[106] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[107] Dewi Sukma Kristianti, "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah," *Undang : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 315–339.

harus memastikan keadilan dan kesetaraan saat memobilisasi investasi dan mendistribusikan keuntungan.[108]

Bank Umum Syariah ialah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang beroperasi dari prinsip hukum Islam mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam operasionalnya, bank ini mengedepankan prinsip yang digunakan mencakup keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta sifat universal (*alamiyah*), disertai dengan larangan terhadap praktik yang mengandung *gharar, maysir*, *riba*, kezaliman, dan transaksi pada objek yang tidak halal.[109] Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memiliki fungsi utama menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat, sekaligus dapat menjalankan fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial lainnya. Bank syariah merupakan institusi yang beroperasi secara independen dan tidak berfungsi sebagai cabang dari bank konvensional, sebagaimana dicontohkan oleh Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan lainnya.[110]

Selaras terhadap fungsi intermediasi dan prinsip keadilan yang diemban, eksistensi Bank Umum Syariah berhubungan erat dengan upaya perluasan akses layanan keuangan yang adil dan merata. Perihal ini mengarah pada konsep inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam. Inklusi keuangan syariah menyasar pada penciptaan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Inklusi keuangan ini dilatari oleh terabaikannya orang-orang miskin dari akses perbankan konvensional. Dalam inklusi keuangan syariah, masyarakat diperkenalkan prinsip-prinsip layanan keuangan bebas riba, pembagian risiko dan keuntungan, larangan spekulasi dan investasi haram pada produk-produk kerjasama dan bagi hasil, jual beli, pinjaman, keagenan

---

[108] Zaheer Anwer, "Shariah Compliant Financial Intermediation in Dual Banking System," *Turkish Journal of Islamic Economics* (2020).

[109] Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia, 2021), 37.

[110] Yuli Wardina and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah* (Kota Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024), 27-28.

(*wakalah*), obligasi (*sukuk*), sewa, transfer dana, hibah, asuransi dan sebagainya.[111]

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Studi terdahulu berfungsi untuk mengamati persamaan dan perbedaan antara studi yang akan diteliti, alhasil bisa menjadi acuan maupun panduan atau referensi bagi peneliti untuk melakukan studi yang akan diteliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Nama Jurnal dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	**Peneliti :** Damai Putri, Salsabila Nurmasanti, Syifa Ramadhani, Dkk[112] **Judul :** Analisis Garis Kemiskinan di Indonesia menggunakan Gini Ratio, Inflasi, GDP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Tahun 2010-2023	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda di Indonesia periode tahun 2010-2023	1. Gini ratio dan pengangguran terbuka meningkatkan garis kemiskinan secara signifikan, sementara GDP dan UMP menurunkannya 2. Inflasi berpengaruh positif namun tidak selalu signifikan, yang berdampak pada daya beli rumah tangga miskin	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel pendidikan, IPG, dan jumlah lembaga keuangan syariah

[111] Iza Hanifuddin and Nur Kasanah, *Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Nilai Budaya Lokal*, Cet. I. (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025), 3.

[112] Damai Putri D et al., "Analisis Garis Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Gini Ratio , Inflasi , GDP , Tingkat Pengangguran Terbuka , Upah Minimum Tahun 2010-2023," *IKRAITH-HUMANIORA* 10, no. 1 (2023): 246–258.

	Nama Jurnal & Tahun : IKRAITH-Humaniora, Vol. 10 (2026)			2. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitiannya di 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
2.	**Peneliti :** Jian Li, Eryong Xue, Yukai Wei, dan Yunshu He[113] **Judul :** *How Popularising Higher Education Affects Economic Growth and Poverty Alleviation : Empiris Evidence from 38 Countries* **Nama Jurnal & Tahun :** *Humanities and Social Sciences Co*	Metode regresi OLS dan kuantil di 38 negara periode tahun 1995-2021	1. Segmen populasi dengan pendidikan tinggi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB 2. Peningkatan porporsi populasi dengan pendidikan tinggi pada usia kerja, ditemukan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB 3. Popularisasi pendidikan memainkan peran positif selama tahap	**Persamaan** : Sama-sama meneliti tentang pendidikan dalam mengatasi kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, IPG, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah

[113] Jian Li et al., "How Popularising Higher Education Affects Economic Growth and Poverty Alleviation: Empirical Evidence from 38 Countries," *Humanities & Social Sciences Communications* (2024).

	Mmunications (2025)		awal pembangunan sosial dan ekonomi 3. Popularisasi pendidikan tinggi memainkan peran kunci untuk memengaruhi perkembangan pendidikan sutau negara dan inovasi ilmiah dan teknologi mendorong pendalaman ekonomi suatu negara	2. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Loaksi penelitiannya di 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
3.	**Peneliti :** Anik Prasyorini, Khuzaini, dan Suwitho[114] **Judul :** Pengaruh Pembangunan Manusia dan Gender terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening	Metode kuantitatif dengan teknik analisis jalur di Kota Surabaya priode tahun 2011-2023	1. IPM, IPG, dan IDG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. IPM, IPG, IDG, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan 4. Pertumbuhan ekonomi memediasi IPM, IPG, dan IDG terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tent ang IPG terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah

[114] Anik Prastyorini, Khuzaini, and Suwitho, "Pengaruh Pembangunan Manusia Dan Gender Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 02 (2025): 634–647.

	Nama Jurnal & Tahun : Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Menkeu), Vol. 14 (2025)			2. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 Provinsi se-indonesia periode tahun 2020-2024
4.	**Peneliti :** Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Hikmah, dan Nani Hanifah[115] **Judul :** Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memerangi Kemiskinan di Jayapura **Nama Jurnal & Tahun :** Jurnal Istiqro – Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vo. 11 (2025)	Metode kualitatif	5. Lembaga keuangan syariah telah memberikan konstribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan, terutama melalui pembiayaan mikro dan kecil serta program pemberdayaan ekonomi lokal	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang lembaga keuangan syariah dalam mengentasi kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka 2. Metode penelitiannya

[115] Khoiriya Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura," *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum islam, Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2025): 35–41.

				yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitiannya di 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
5.	**Peneliti :** Dias Sekarwati, Wiwin Priana, dan Wirya Wardaya[116] **Judul :** *Impact of Minimum Wage, Inflation, and Economic Growth on Poverty in Yogyakarta Province* **Nama Jurnal & Tahun :** *Journal of Business Management and Economic Development,* Vol. 2 (2024)	Metode Kuantitatif dengan model regresi data panel	Tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta dipengaruhi oleh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak dipengaruhi oleh inflasi.	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang upah minimum terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel pendidikan, IPG, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai

[116] Dias Sekarwati, Wiwin Priana, and Wirya Wardaya, "Impact of Minimum Wage , Inflation, and Economic Growth on Poverty in Yogyakarta Province," *Journal of Business Management and Economic Development* 2, no. 03 (2024): 1222–1233.

				variabel moderasi 2. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 provinsi se-Indonesia dengan periode tahun 2020-2024
6.	**Penelitian :** Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, dan Sri Indah Nikensari[117] **Judul :** *The Effect of Inflation, minimum wage, Labor Absorption and The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia*	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan model *Generalized Least Square (GLS)*	1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 2. Upah minimum dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 3. Pandemi Covid-19 berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti upah minimum terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel pendidikan, IPG, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah

[117] Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, and Sri Indah Nikensari, "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia," *International Journal of Management Finance* 1, no. 4 (2024): 43–48.

	Nama Jurnal & Tahun : *International Journal of Management Finance*, Vol.1 (2024)			sebagai variabel moderasi 2. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 provinsi se-Indonesia dengan periode tahun 2020-2024
7.	**Peneliti :** Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati[118] **Judul :** Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat **Naman Jurnal & Tahun :** Jurnal	Metode kualitatif	LKMS telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan melalui pembiayaan yang adil dan berbasis syariah	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang lembaga keuangan syariah terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka 2. Metode yang digunakan yaitu metode

[118] Antin Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043–1052.

	Bina Bangsa Ekonomika, Vol. 18 (2024)			kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitiannya yaitu 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
8.	**Peneliti :** Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J Masinambow, dan Agnes L.Ch. P. Lapian[119] **Judul :** Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara **Naman Jurnal & Tahun :** Jurnal Berkala Ilmiah	Metode Kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda	1. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 4. Penganggura, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, IPG, dan lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif

[119] Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J Masinambow, and Agnes L. Ch. P Lapian, "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal berkala Imliah Efisiensi* 24, no. 6 (2024): 58–69.

	Efisien, Vol. 24 (2024)			dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitiannya yaitu 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
9.	**Peneliti :** Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu[120] **Judul :** Analisis Indeks Pembangunan Gender di Kawasan Teluk Tomini dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi **Naman Jurnal & Tahun :** Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP), Vol. 1 (2024)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda data panel	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender 2. Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPG 4. Pengeluaran perkapita perempuan yang disesuaikan berpengaruh positif	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang IPG dan kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, pengangguran terbuka, dan lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif

[120] Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, and Bobby Rantow Payu, "Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi," *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP)* 1, no. 3 (2024): 127–137.

			dan signifikan terhadao IPG	dengan teknik analisis regresi data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitiannya yaitu 33 Provinsi se-Indonesia periode tahun 2020-2024
10.	**Peneliti :** Wajid Ali, Ambiya, and Devi Prasad Dash[121] **Judul :** Examing the Perspective of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies **Nama Jurnal & Tahun :** MDPL (2023)	Analisis kuantitatif lintas negara (OLS/GMM Variasi)	Menghubungkan kontruksi pembangunan gender (IPG) dengan outcame pembangunan, menemukan bahwa peningkatan gender berkorelasi dengan perbaikan (penurunan) beberapa ukuran ketimpangan/kemiskinan di konteks Asia	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang IPG terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda data

[121] Wajid Ali, Ambiya, and Devi Prasad Dash, "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies," *MDPI* 13 (2023).

				panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 provinsi se-Indonesia dengan periode tahun 2020-2024
11.	**Peneliti :** Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing[122] **Judul :** Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia **Nama Jurnal & Tahun :** Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda periode tahun 2015-2020	1. Jumlah penduduk, pengangguran, pendidikan, dan rasio gini secara simlutan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia 2. Secara parsial jumlah penduduk, pengangguran terbuka, rasio gini berpengaruh secara positif di Indonesia 3. Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang pendidikan, pengangguran terbukan terhadap kemiskinan di Indonesia **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, IPG, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan regresi libnier berganda data

[122] Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing, "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *JMPKP : Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 5 (2023): 1–18.

	Publik, Vol.5 (2023)			panel dengan moderasi 3. Periode penelitian mulai tahun 2020-2024
12.	**Peneliti :** Cinta Marino Simbolon, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, Dkk[123] **Judul :** Analisis Pengaruh Modal Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia **Nama Jurnal & Tahun :** *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 5 (2023)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel di Indonesia periode tahun 2018-2022	1. Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 4. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2018-2022 **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel IPG, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik analisis regresi data

[123] Cinta Marito Simbolon et al., "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 213–226.

				panel dengan moderasi 3. Periode penelitian mulai tahun 2020-2024
13.	**Peneliti :** Shifa Nur Amalia dan Lestari Agusalim[124] **Judul :** Peran Gender dalam Pengentasan Kemiskinan : Analisis Lintas Provinsi di Indonesia **Nama Jurnal & Tahun :** Sosio Informa – Politeknik Kesejahteraan Sosial (2023)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis data panel periode tahun 2010-2022 di 34 Provinsi se-Indonesia	1. Pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan 3. Pemberdayaan gender, rasio upah gender, pertumbuhan investasi, dan tingkat pengangguran tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang IPG terhadap kemiskinan di Indonesia **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya teradapat variabel UMP, pendidikan, pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan teknik analisis data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yaitu 33 Provinsi se-Indonesia

[124] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

				periode tahun 2020-2024
14.	**Peneliti :** Riky Aulia Rachman Marpaung, Iin Sintia, dan Fitri Rahayu[125] **Judul :** *Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate adn Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province* **Nama Jurnal & Tahun :** Indonesian Journal of Avanced Research (IJAR), Vo. 2 (2023)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi	1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 3. TPT dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang pengangguran dan kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, IPG, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 Provinsi se-indonesia periode tahun 2020-2024

[125] Riky Aulia Rachman Marpaung, IIn Sintia, and Rahayu Fitri, "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province," *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)* 2, no. 5 (2023): 361–376.

15.	**Peneliti :** Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa[126] **Judul :** Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur **Nama Jurnal & Tahun :** *Independent-Journal of Economics* Vol. 2 (2022)	Metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel di Jawa Timur periode 2018-2021	1. Secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 2. Secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 3. Secara parsial pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 4. Secara simultan jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, IPG, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda data panel dengan moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 Provinsi se-indonesia periode tahun 2020-2024
16.	**Peneliti :** Dimas Bagus Wiranatakusuma	Metode kuantitatif dengan regresi linier berganda	1. IPM dan program perlindungan sosial memiliki dampak signifikan daan	**Persamaan :** 1. Sama-sama meneliti tentang pengangguran

[126] Emilia Titah Nabibah and Nur Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Independent : Journal of Economics* 2 (2022): 1–13.

	dan Ganjar Primambudi[127] **Judul :** *Determinants of Poverty in Indonesia* **Nama Jurnal & Tahun :** *Sociologia Y Tecnociencia,* Vol. 11 (2021)		negatif terhadap kemiskinan 2. Pengangguran memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan	terhadap kemiskinan 2. Sama-sama meneliti Indonesia **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, IPG, dan jumlah lembaga keuangan syariah 2. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda data panel dengan model moderasi 3. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu 33 Provinsi se-Indonesia dengan periode tahun 2020-2024
17.	**Peneliti :** Dian Alasta Selian dan	Metode kuantitatif	1. Pembiayan Bank Syariah tidak berpengaruh	**Persamaan :** Sama-sama meneliti tentang lembaga keuangan

[127] Dimas Bagus Wiranatakusuma and Ganjar Priambudi, "Determinants of Poverty in Indonesia," *Sociologia Y Tecnoceiencia* 2 (2021): 243–267.

	Syahrul Ependi Siregar[128] **Judul :** Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara **Nama Jurnal & Tahun :** Jurnal As-Salam, Vo.1 (2016)		signifikan terhadap kemiskinan 2. Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 3. PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 4. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 5. Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, PDRB, dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	syariah terhadap kemiskinan **Perbedaan :** 1. Dalam penelitian saya terdapat variabel UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka dan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi 2. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda data panel dengan model moderasi 3. Lokasi penelitian yaitu 33 provinsi di Indonesia periode penelitian mulai tahun 2020-2024

Sumber : Data diolah, 2026

[128] Dian Alasta Selian and Syahrul Ependi Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara," *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (2016): 90–104.

Dengan demikian, studi ini ini hadir untuk memberikan kontribusi pada area kajian yang masih minim perhatian dalam literatur sebelumnya, yakni mengintegrasikan variabel UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Integrasi tersebut dianalisis melalui pendekatan ekonomi Islam dengan menjadikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi.

Kebaruan (*novelty*) studi ini ada di penggunaan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel yang diasumsikan mampu menguatkan atau melemahkan keterkaitan antar variabel independen dan kemiskinan. Di samping itu, studi ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif karena dilaksanakan pada 33 Provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2020-2024.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran penelitian ini memaparkan hubungan teoretis antara variabel independen dan variabel dependen. Variasi indepen yang ada pada studi ini ialah UMP (X_1), Pendidikan (X_2), IPG (X_3), Pengangguran Terbuka (X_4), kemiskinan (Y), dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah (Z). Gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini divisualisasikan melalui gambar yang disajikan di bawah ini :

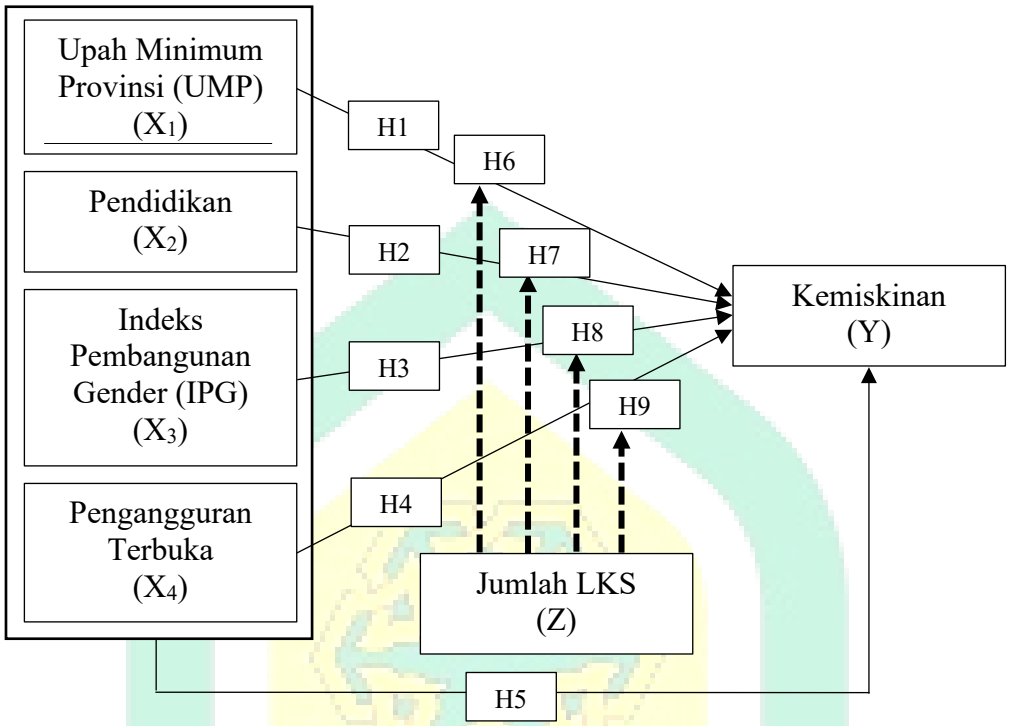

Keterangan :

: Pengaruh variabel dependen

: Pengaruh variabel moderasi

Landasan teori dan kajian pustaka yang telah dibahas menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian ini, yang selanjutnya dirumuskan sebagaimana disajikan di bawah ini :

1. Bila UMP naik, berarti kemiskinan turun.
2. Bila pendidikan naik, berarti kemiskinan turun.
3. Bila IPG naik, berarti kemiskinan turun.
4. Bila pengangguran terbuka turun, berarti kemiskinan turun.
5. Bila UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka secara simultan berimplikasi, berarti kemiskinan turun.
6. Bila jumlah lembaga keuangan syariah memoderasi hubungan UMP dan kemiskinan, maka jumlah lembaga keuangan syariah menguatkan pengaruh UMP dalam menurunkan kemiskinan.

7. Bila jumlah lembaga keuangan syariah memoderasi hubungan pendidikan dan kemiskinan, maka jumlah lembaga keuangan syariah menguatkan pengaruh pendidikan dalam menurunkan kemiskinan.
8. Bila jumlah lembaga keuangan syariah memoderasi hubungan IPG dan kemiskinan, maka jumlah lembaga keuangan syariah menguatkan pengaruh IPG dalam menurunkan kemiskinan.
9. Bila jumlah lembaga keuangan syariah memoderasi hubungan pengangguran terbuka dan kemiskinan, maka jumlah lembaga keuangan syariah menguatkan pengaruh pengangguran terbuka dalam menurunkan kemiskinan.

D. Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis ialah salah satu metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis secara statistik, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun dasar pengambilan keputusan melalui pengumpulan data dan fakta yang relevan, guna menentukan diterima atau ditolaknya suatu pernyataan atau asumsi..[129] Pada studi terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol menjadi dasar pengujian yang diuji menggunakan data sampel, sedangkan hipotesis alternatif diterima apabila hasil pengujian menunjukkan penolakan terhadap hipotesis nol.[130]

---

[129] Setyo Tri Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Edisi I. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 115.

[130] Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*, Edisi 4. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 42.

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada studi ini dapat dirumuskan yakni :

1. Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

   Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendapatan (upah).[131] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi naik, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[132] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[133]

   Temuan ini diperkuat oleh temuan Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, dan Sri Indah Nikensari, yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum serta penyerapan tenaga kerja dengan tingkat kemiskinan.[134] Berbeda dengan hasil temuan Cinta Marino Simbolon, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, dan lainnya, yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan.[135]

   Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

   H_{01} : Tidak ada hubungan yang signifikan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

---

[131] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, and Dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[132] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Ahlimedia Press* (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022), 41.

[133] Aris Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*, Cet. I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 92.

[134] Angraeni, Nurjanah, and Nikensari, "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia."

[135] Simbolon et al., "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia."

H_{01} : Ada hubungan yang signifikan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

2. Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan.[136] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[137] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[138]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J. Masinambow, dan Agnes L.Ch. P. Lapian menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara pendidikan dan kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik.[139] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing, yang menyatakan bahwa pendidikan secara parsial berkaitan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[140]

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

H_{02} : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

---

[136] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[137] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[138] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

[139] Tompoh, Masinambow, and Lapian, "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara."

[140] Fadhilah, Muchtar, and Sihombing, "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

H_{02} : Ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

3. Hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

Gender merupakan faktor yang sangat mempengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas.[141] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[142] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam akses pendidikan dan ekonomi, punya peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[143]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Wajid Ali, Ambiya, dan Devi Prasad Dash menyebutkan IPG dengan *outcome* pembangunan, menemukan peningkatan gender berkorelasi dengan perbaikan (penurunan) beberapa ukuran ketimpangan kemiskinan.[144] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu menyebutkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPG.[145]

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

---

[141] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[142] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

[143] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

[144] Ali, Ambiya, and Dash, "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies."

[145] Setiani, Saleh, and Payu, "Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi."

H_{03} : Tidak ada hubungan yang signifikan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

H_{03} : Ada ada hubungan yang signifikan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

4. Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran.[146] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, sehingga menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya mempengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.[147] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[148]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan[149] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Rizky Aulia Rachman Marpaung, Iin Sintia, dan Fitri Rahayu menyebutkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan.[150]

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini

---

[146] Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, 9*.

[147] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[148] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

[149] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

[150] Marpaung, Sintia, and Fitri, "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province."

H_{04} : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

H_{04} : Ada ada hubungan yang signifikan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

5. Hubungan antara UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berhubungan yaitu tingkatan pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan pelayanan, gender, situasi lingkungan, geografis, serta lokasi.[151] Di samping itu, Bank Dunia menjelaskan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar, serta lokasi geografis.[152] Kemiskinan juga bisa dikarenakan beragam faktor lain seperti penghasilan yang rendah, pengangguran, kurangnya pendidikan atau ketrampilan yang tidak sesuai, serta ketidakstabilan ekonomi.[153]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Shifa Nur Amalia dan Lestari Agusalim yang menemukan bahwa variabel pemberdayaan gender, rasio upah gender, pertumbuhan investasi, serta tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.[154] Sementara hasil temuan dari Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa menyebutkan secara simultan jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan mempengaruhi kemiskinan.[155]

---

[151] Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Cet. I. (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 15.

[152] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 58-62*.

[153] Ade Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Cet. Perta. (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024), 9.

[154] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

[155] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

H_{05} : Tidak ada hubungan yang signifikan antara UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

H_{05} : Ada ada hubungan yang signifikan antara UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

6. Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendapatan (upah).[156] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi naik, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[157] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[158]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[159] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam memengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[160] Memperluas jaringan lembaga

---

[156] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, and Dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[157] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Ahlimedia Press* (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022), 41.

[158] Aris Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*, Cet. I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 92.

[159] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[160] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [161] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[162]

Temuan ini diperkuat dengan hasil studi sebelumnya oleh Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, dan Sri Indah Nikensari, yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum serta penyerapan tenaga kerja dengan tingkat kemiskinan.[163] Berbeda dengan hasil temuan Cinta Marino Simbolon, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, dan lainnya, yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan.[164]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[165] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang

---

[161] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[162] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[163] Angraeni, Nurjanah, and Nikensari, "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia."

[164] Simbolon et al., "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia."

[165] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

terpinggirkan.[166] Sementara studi yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak memengaruhi kemiskinan.[167]

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia bertumpu pada sinergi antara kebijakan upah minimum yang menjamin kelayakan hidup pekerja serta peran strategis lembaga keuangan syariah dalam memerangi kesenjangan sosial ekonomi melalui prinsip maslahah. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan upah yang adil didorong oleh akses permodalan syariah yang inklusif. Maka dari itu, studi ini memposisikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi untuk menguji sejauh mana ketersediaan titik layanan keuangan syariah mampu menguatkan pengaruh UMP dalam menekan angka kemiskinan secara nasional.

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

H_{06} : Tidak ada hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

H_{06} : Ada hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

---

[166] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[167] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

7. Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan.[168] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[169] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[170]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[171] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam memengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[172] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [173] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi

---

[168] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[169] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[170] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

[171] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[172] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[173] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[174]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J. Masinambow, dan Agnes L.Ch. P. Lapian menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara pendidikan dan kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik..[175] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing, yang menyatakan bahwa pendidikan secara parsial berkaitan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[176]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[177] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[178] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[179]

Peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dimana individu yang terdidik diharapkan mampu melahirkan inovasi produktif untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam kerangka ekonomi Islam,

---

[174] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[175] Tompoh, Masinambow, and Lapian, "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara."

[176] Fadhilah, Muchtar, and Sihombing, "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

[177] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[178] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[179] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

efektivitas peran pendidikan ini dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menyediakan akses permodalan berbasis kemaslahatan bagi para pelaku usaha terdidik dan bantuan biaya pendidikan. Maka itu, studi ini memposisikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi untuk menguji sejauh mana ketersediaan layanan tersebut dapat menguatkan pengaruh pendidikan dalam menurunkun proporsi penduduk yang tergolong miskin di Indonesia.

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

H_{07} : Tidak ada hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

H_{07} : Ada hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

8. Hubungan antara gender dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Gender merupakan faktor yang sangat memengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas.[180] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[181] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam

---

[180] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[181] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

akses pendidikan dan ekonomi, punya peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[182]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[183] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam memengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[184] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [185] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[186]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Wajid Ali, Ambiya, dan Devi Prasad Dash menyebutkan IPG dengan *outcome* pembangunan, menemukan peningkatan gender berkorelasi dengan perbaikan (penurunan) beberapa ukuran ketimpangan kemiskinan.[187] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu menyebutkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPG.[188]

---

[182] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

[183] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[184] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[185] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[186] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[187] Ali, Ambiya, and Dash, "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies."

[188] Setiani, Saleh, and Payu, "Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi."

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[189] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[190] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[191]

Peningkatan kesetaraan gender yang tercermin melalui IPG punya peran krusial dalam menurunkan kemiskinan, terutama dalam memberikan akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan. Upaya ini dapat diperkuat dengan kehadiran lembaga keuangan syariah yang berperan menyediakan akses keuangan inklusif dan bantuan modal berbasis kemaslahatan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan. Maka itu, studi ini memposisikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi untuk menguji sejauh mana ketersediaan layanan keuangan syariah dapat mendukung efektivitas pembangunan gender dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

H_{08} : Tidak ada hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

---

[189] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[190] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[191] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

H_{08} : Ada hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

9. Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran.[192] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, alhasil menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya memengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.[193] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[194]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[195] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam memengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[196] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [197] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi

---

[192] Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, 9*.

[193] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[194] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

[195] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[196] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[197] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[198]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan[199] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Rizky Aulia Rachman Marpaung, Iin Sintia, dan Fitri Rahayu menyebutkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan.[200]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[201] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[202] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[203]

Tingginya tingkat pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi akibat penurunan pendapatan dan daya konsumsi masyarakat yang memperburuk kemiskinan serta ketimpangan sosial. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah berperan strategis dalam memitigasi dampak negatif

---

[198] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[199] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

[200] Marpaung, Sintia, and Fitri, "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province."

[201] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[202] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[203] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

tersebut melalui fungsi intermediasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis maslahah, yang memungkinkan penganggur mengakses modal usaha produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Maka itu, studi ini memposisikan lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi untuk menguji sejauh mana ketersediaan akses keuangan syariah dapat memitigasi pengaruh kepada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Landasan teori dan hasil kajian penelitian sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang dinyatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

H_{09} : Tidak ada hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

H_{09} : Ada hubungan antara pengangguran dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel pemoderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penellitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah penelitian yang menghasilkan sejumlah temuan yang diperoleh melalui serangkaian prosedur analisis statistik yang diperoleh melalui penerapan beberapa prosedur statistik.[204] Pada studi ini, pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk meneliti pengaruhnya UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori tujuannya menemukan hubungan sebab-akibat antarvariabel. Karakteristik utama dalam penelitian eksplanatori ialah keberadaan hipotesis yang dirumuskan jelas sejak awal, kemudian diuji melalui data empiris.[205] Pada penelitian ini, jenis eksplanatori dipergunakan untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris pengaruh UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024, serta menganalisis peran jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut

---

[204] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

[205] Sulaiman and Ridwan, *Metodologi Penelitian Ilmiah Riset Dan Operasional* (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2025), 83-84.

.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan cakupan wilayah di Indonesia menggunakan data sekunder berskala nasional yang sumbernya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BPS dan laporan profil perbankan syariah dari OJK. Periode pengamatan ditetapkan selama lima tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, guna menangkap dinamika perubahan ekonomi pascapademi hingga periode pemulihan terkini. Lokus penelitian difokuskan pada analisis makro terhadap pengaruh UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan, dengan memposisikan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi untuk menganalisis ketersediaan atau kuantitas titik layanan keuangan syariah di Indonesia mampu menguatkan atau melemahkan faktor-faktor ekonomi tersebut dalam upaya menekan angka kemiskinan secara nasional.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ialah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian.[206] Populasi juga dimaknai sebagai keseluruhan objek ataupun subjek penenlitian yang punya karakteristik tertentu serta jadi ruang lingkup generalisasi, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis guna memperoleh kesimpulan penelitian.[207] Pada penelitian ini populasinya mencakup 38 Provinsi yang berada di wilayah Indonesia. Populasi ini terpilih karena mewakili kondisi sosial-ekonomi yang beragam di Indonesia, sehingga mampu menampilkan

---

[206] Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. I. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 139.

[207] Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Cet. I. (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), 11.

gambaran komprehensif terkait hubungan UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti permasalahan, tujuan, hipotesis, metode, serta instrumen penelitian, di samping itu juga memperhatikan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.[208] Provinsi dengan data lengkap dan variabel penelitian terpenuhi sepanjang periode pengamatan pengambilan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.[209] Penelitian ini berlaku untuk 33 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria penelitian dan kesesuaian dengan variabel yang dianalisis dalam kurun waktu 2020-2024.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses analisis. Dasar penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui berbagai sumber, seperti BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan entitas pemerintah terkait lainnya. Selain itu, menurut waktu penelitiannya, penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara *time series* (periode 2020-2024) dan *cross section* (33 Provinsi di Indonesia). Data panel dipilih karena menyediakan jumlah observasi yang lebih besar sehingga meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dalam analisis.[210] Dalam konteks penelitian ini, data yang dipergunakan mencakup periode tahun 2020-2024, yang memuat

---

[208] Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, 138*.

[209] Bambang Sudaryana and Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 36.

[210] Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views,* 208.

informasi terkait variabel-variabel UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan elemen yang sangat mendasar dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk menjembatani antara teori dan realitas empiris.[211] Sedangkan definisi operasional merupakan uraian terkait variabel studi yang dijabarkan secara jelas, terukur, dan dapat diobservasi sehingga dapat digunakan secara langsung dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Dalam penyusunan operasional, selain menjelaskan pengertian variabel operasional, harus memuat cara pengukuran, hasil ukur yang diperoleh, serta skala pengukuran yang dipergunakan agar variabel dapat diukur secara objektif dan terstandar.[212] Berdasarkan uraian tersebut, definisi operasional variabel pada studi ini disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Teoritis	Indikator	Konsep Analisis	Skala
Kemiskinan	Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	Dalam studi ini indikator yang dipergunakan ialah *head count index* (HCI) yaitu jumlah	Presentase penduduk miskin pada 33 provinsi di Indonesia.	Rasio

[211] Fatkhurahman, *Buku Ajar : Metodologi Riset Manajemen Dan Bisnis*, Cet. I. (Pekanbaru Riau: CV Karya Nofa, 2025), 63.

[212] Wahyu Sri Ambar Arum, *Metodologi Penelitian Kontemporer Strategi, Teknologi, Dan Publikasi Di Era Digital* (Kota Padang: CV Dunia Perbitan Buku, 2025), 106.

	untuk hidup layak	presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.		
UMP	Upah minimum adalah upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja.	Dalam studi ini, indikator yang digunakan ialah upah minimum provinsi.	Data UMP pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.	Rasio
Pendidikan	Pendidikan merupakan unsur utama dalam meraih kehidupan yang layak dan bermakna.	Dalam studi ini indikator yang digunakan ialah rerata lama sekolah.	Data rerata lama sekolah pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.	Rasio
IPG	IPG adalah suatu indeks yang mengukur ketimpangan atau	Dalam studi ini indikator yang digunakan ialah nilai Indeks	Data IPG pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.	Rasio

	ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.	Pembangunan Gender berkisar antara 0-100.		
Penganggur an Terbuka	Individu yang tidak bekerja sama sekali dan aktif mencari pekerjaan	Dalam studi ini indikator yang digunakan ialah nilai tingkat pengangguran terbuka.	Data Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.	Rasio
Jumlah Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga keuangan syariah ialah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dengan cara melakukan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama dalam	Dalam studi ini indikator yang digunakan ialah jumlah Bank Umum Syariah.	Data jumlah Bank Umum Syariah pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.	Rasio

	membiayai investasi pembangunan.			

Sumber : Data di olah 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunalan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik dokumentasi merujuk pada pengumpulan data melalui catatan atau arsip yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya penting yang punya sumber resmi.[213] Data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data UMP sumbernya dari publikasi tahunan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Data pendidikan sumbernya dari publikasi tahunan BPS Indonesia.
3. Data IPG sumbernya dari publikasi tahunan BPS Indonesia.
4. Data pengangguran terbuka sumbernya dari publikasi tahunan BPS Indonesia.
5. Data tingkat kemiskinan sumbernya dari publikasi tahunan BPS Indonesia, terkait garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin tahunan.
6. Data lembaga keuangan syariah sumbernya dari publikasi tahunan OJK Indonesia.

G. Uji Pemilihan Model

Analisis yang dipergunakan pada penelitian ini ialah regresi data panel memiliki tiga pendekatan utama yang digunakan dalam analisis, yang terdiri dari :

---

[213] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. I. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 240.

1. *Common Effect Model* (CEM)

   Model CEM tujuannya mendapatkan jumlah data dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa membedakan karakteristik individu maupun waktu.
2. *Fixed Effect Model* (FEM)

   Menganggap terdapatnya perbedaan karakteristik antarprovinsi (*individual effect*) yang konstan sepanjang periode penelitian.
3. *Random Effect Model* (REM)

   Menganggap perbedaan antar provinsi sebagai acak (random) serta tidak berkorelasi dengan variabel independen.

Untuk menentukan model terbaik, dilakukan rangkaian pengujian, yaitu :

1. Uji Chow : membandingkan CEM dengan FEM. Apabila ada *Prob. Cross Section Chi Square* dengan nilai > 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu CEM. Sebaliknya, bila nilai < 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu FEM.[214]
2. Uji Hausman : membandingkan *FEM* dengan *REM*. Bilamana angka *Prob. Cross Section Random* < 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu FEM. Sebaliknya, bila nilai > 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu REM.[215]
3. Uji Lagrange Multiplier : dipergunakan untuk memilih model manakah yang akan terpilih untuk melakukan estimasi serta analisis diantara model *REM* atau model *CEM*. Bilamana angka Prob.Value dari Breusch-Pagan > 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu *CEM*.

---

[214] Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views, 222*.
[215] Ibid, 225.

Sebaliknya, bila nilai < 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu *REM*.[216]

H. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya mengamati apakah nilai residual terditribusi normal ataupun tidak.[217] Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.[218] Dengan ketentuan yakni:

H0 : nilai sig > 0,05 maka data residual terdistribusi normal

Ha : nilai sig < 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal[219]

2. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya keterkaitan antar residual dalam model regresi linier, khususnya antara periode t dan periode sebelumnya (t-1). Guna pendeteksian ada ataupun tidaknya autokorelasi bisa menggunakan pendekatan *Durbin-Watson* (DW). Kriteria memilih keputusan yakni:

Bila 0 < d < dL, artinya ditemukan autokorelasi positif

Bila 4 – dL < d < 4, artinya tidak ditemukan autokorelasi positif ataupun negatif

Bila dU < d < 4 – dU, artinya tidak ditemukan autokorelasi positif ataupun negatif

Bila dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, pengujian tidak meyakinkan[220]

---

[216] Zulaika Matondang and Hanmi Fadillah Nasution, *Praktik Analisis Data : Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews & SPSS*, Edisi I. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 167.

[217] Nikolaus Duli, *Metodologi Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi Dan Analisis Data Dengan SPSS*, Cet. I. (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), 114.

[218] Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 189.

[219] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 138*.

[220] *Ibid, 138.*

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dipergunakan sebagai pengidentifikasi adanya hubungan yang diperkuat antarvariabel indepeden pada pemodelan regresi. Pengujian ini tujuannya menjamin tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen yang dapat menurunkan tingkat akurasi dalam hasil estimasi.[221] Melalui matriks korelasi, deterksi multikolineritas dilaksanakan dengan mengamati nilai korelasi antarvariabel independen. Bila koefisien korelasi diantara dua variabel bebas melampaui 0,8 maka kondisi tersebut menampilkan adanya potensi multikolinieritas yang dignifikan pada pemodelan regresi. Bilamana angka korelasi antarvariabel independen lebih rendah dibandingkan korelasi diantara variabel dependen dan masing-masing variabel independen, berarti kesimpulannya tidak ditemukan masalah multikolinieritas yang serius. Dengan demikian, nilai korelasi di bawah 0,8 menampilkan bawa model regresi terbebas dari permasalahan multikolinieritas.[222]

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas tujuannya digunakan untuk mengidentifikasi apakah varians residual bersifat tidak konstan antar observasi dalam model regresi. Karna data yang dipergunakan pada studi ini, adalah *time series*, maka metode yang tepat digunakan ialah metode *Scatter Plot*. Pada metode ini, analisis dilakukan melalui pengamatan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Pada metode *Scatter Plot*, kriteria penelitian yakni :

a. Keberadaan pola tertentu pada sebaran titik, seperti pola yang teratur (bergelombang atau mengalami perubahan bentuk dari melebar ke menyempit), menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas

---

[221] *Ibid, 139.*
[222] Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views, 142*.

b. Sebaliknya, jika sebaran titik tidak menunjukkan pola yang sistematis dan tersebar secara acak di sekitar nilai nol pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.[223]

I. Uji Hipotesis dan Teknik Analisis

1. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kriteria memilih keputusan yakni :

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima[224]

a. Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji parameter secara simultan, yaitu untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan meliputi :

Bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ataupun sig < 0,05 artinya H_0 tolak sedangkan H_a diterima

Bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ ataupun sig > 0,05 artinya H_0 terima sedangkan H_a ditolak [225]

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dapat diukur melalui koefisien determinasi (R^2), yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai yang rendah

---

[223] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 139*.

[224] Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 138.

[225] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 313*.

menunjukkan bahwa variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.[226]

Ukuran sampel dan jumlah variabel independen/prediktor dipertimbangkan oleh koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R-squared*). Angka ini seharusnya meningkat secara substansial ketika lebih banyak variabel independen diperkenalkan. Skor yang lebih besar (mendekati 1) menunjukkan bahwa model lebih akurat, ini sering digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model.[227]

J. Teknik Analisis

a. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dalam regresi moderasi, keberadaan variabel moderasi dianalisis untuk melihat sejauh mana variabel tersebut memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.[228] Pada studi ini, untuk menguji pengaruh interaksi variabel moderasi, yaitu UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024 dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi. . Persamaan uji regresi moderasi yakni:

Model dasar (tanpa moderasi) :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon it$$

Model dengan moderasi :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 Z_{it} + \beta_6 (X_{1it} \times Z_{it}) + \beta_7 (X_{2it} \times Z_{it}) + \beta_8 (X_{3it} \times Z_{it}) + \beta_9 (X_{4it} \times Z_{it}) + \varepsilon it$$

---

[226] Ibid, 141.

[227] Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset : Kuantitatif, Kualititatif, Gabungan*, Edisi I. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 156.

[228] Imam Ghozali, *Ekonometrika : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan IBM SPSS 24*, Cet. 3. (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2017), 223.

Keterangan :

Y_{it} = Kemiskinan pada provinsi ke-i dan tahun ke-t

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi X_1

β_2 = Koefisien regresi X_2

β_3 = Koefisien regresi X_3

β_4 = Koefisien regresi X_4

X_1 = UMP

X_2 = Pendidikan

X_3 = IPG

X_4 = Pengangguran terbuka

Z_{it} = Jumlah Lembaga Keuangan Syariah

$X_1 \times Z$, $X_2 \times Z$, $X_3 \times Z$ & $X_4 \times Z$ = Interaksi moderasi

εit = *Eror term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Penentuan apakah jumlah lembaga keuangan syariah berperan sebagai variabel moderasi dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien interaksi (X x Z). Apabila koefisien berinteraksi signifikan secara statistik, maka variabel jumlah lembaga keuangan syariah dinyatakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap kemiskinan. Arah moderasi ditentukan berdasarkan tanda koefisien interaksi, dimana koefisien yang searah dengan pengaruh variabel independen menunjukkan efek memperkuat, sedangkan koefisien yang berlawanan arah menunjukkan efek memperlemah.[229]

Seluruh pengolahan data dan pengujian menggunakan bantuan perangkat lunak E-Views, karena data ini mampu mengolah data

---

[229] Joseph F. Hair Jr. et al., *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R* (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021), 155-169.

time series secara lebih akurat, efisien, dan sesuai kebutuhan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Gambaran umum mengenai kondisi variabel penelitian disajikan melalui analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel yang digunakan. Melalui analisis ini dapat diketahui perkembangan nilai variabel pada setiap provinsi selama periode penelitian tahun 2020-2024, serta perbedaan karakteristik wilayah. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi tingkat kemiskinan, Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah lembaga keuangan syariah. Analisis ini bertujuan untuk melihat kecenderungan perubahan data dari tahun ke tahun, seperti tren peningkatan, penurunan, maupun fluktuasi yang terjadi pada masing-masing variabel selama periode penelitian tahun 2020-2024 di 33 provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1

Data Kemiskinan di Indonesia

Nama Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	15,43	15,53	14,75	14,45	12,64
Bali	4,45	4,72	4,53	4,25	3,8
Banten	6,63	6,5	6,24	6,17	5,7
Bengkulu	15,3	14,43	14,34	14,04	12,52
DI Yogyakarta	12,8	11,91	11,49	11,04	10,4
DKI Jakarta	4,69	4,67	4,61	4,44	4,14
Gorontalo	15,59	15,41	15,51	15,15	13,87
Jambi	7,97	7,67	7,7	7,58	7,26
Jawa Barat	8,43	7,97	7,98	7,62	7,08
Jawa Tengah	11,84	11,25	10,98	10,77	9,58
Jawa Timur	11,09	11,4	10,38	10,35	9,79
Kalimantan Barat	7,24	6,84	6,81	6,71	6,25
Kalimantan Selatan**	4,83	4,56	4,61	4,29	4,02
Kalimantan Tengah	5,26	5,16	5,22	5,11	5,26
Kalimantan Timur	6,64	6,27	6,44	6,11	5,51
Kep. Bangka Belitung	4,89	4,67	4,61	4,52	5,08
Kep. Riau	6,13	5,75	6,03	5,69	4,78
Lampung	12,76	11,67	11,44	11,11	10,62
Maluku	17,99	16,3	16,23	16,42	15,78
Maluku Utara	6,97	6,38	6,37	6,46	6,03
Nusa Tenggara Barat	14,23	13,83	13,82	13,85	11,91
Nusa Tenggara Timur	21,21	20,44	20,23	19,96	19,02
Papua	26,8	27,38	26,8	26,03	18,09
Papua Barat *	21,7	21,82	21,43	20,49	21,09

Riau	7,04	7	6,84	6,68	6,36
Sulawesi Barat	11,5	11,85	11,92	11,49	10,71
Sulawesi Selatan	8,99	8,53	8,66	8,7	7,77
Sulawesi Tengah	13,06	12,18	12,3	12,41	11,04
Sulawesi Tenggara	11,69	11,74	11,27	11,43	10,63
Sulawesi Utara	7,78	7,36	7,34	7,38	6,7
Sumatera Barat	6,56	6,04	6,04	5,95	5,42
Sumatera Selatan	12,98	12,79	11,95	11,78	10,51
Sumatera Utara	9,14	8,49	8,33	8,15	7,19

Sumber : Data diolah 2026
Keterangan :
* : Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
** : Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah

Berdasarkan data persentase tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2020-2024, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Pada tahun 2024, provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua Barat dengan persentase sebesar 21.09%. Sebaliknya provinsi yang menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pada tahun 2024 adalah Kalimantan Selatan dengan persentase sebesar 4,02%.

Secara umum, sebagian provinsi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2020-2024. Dari 33 provinsi yang diamati, terdapat 17 provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada periode tertentu, diantaranya Aceh, Bali, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepualaun Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat Sulwesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kenaikan tersebut terjadi pada tahun-tahun tertentu sebelum kembali mengalami penurunan pada periode berikutnya. Sementara itu, 16 provinsi lainnya menunjukkan kecenderungan stabil atau mengalami penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2020-2024.

Tabel 4.2

Data Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia

Nama Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp 3.165.031,00	Rp 3.165.031,00	Rp 3.166.460,00	Rp 3.413.666,00	Rp 3.460.672,00
Bali	Rp 2.494.000,00	Rp 2.494.000,00	Rp 2.516.971,00	Rp 2.713.672,28	Rp 2.813.672,00
Banten	Rp 2.460.996,54	Rp 2.460.996,54	Rp 2.501.203,11	Rp 2.661.280,11	Rp 2.727.812,11
Bengkulu	Rp 2.213.604,00	Rp 2.215.000,00	Rp 2.238.094,31	Rp 2.418.280,00	Rp 2.507.079,24
DI Yogyakarta	Rp 1.704.608,25	Rp 1.765.000,00	Rp 1.840.915,53	Rp 1.981.782,39	Rp 2.125.897,61
DKI Jakarta*	Rp 4.276.349,91	Rp 4.416.186,55	Rp 4.641.854,00	Rp 4.901.798,00	Rp 5.067.381,00
Gorontalo	Rp 2.788.826,00	Rp 2.788.826,00	Rp 2.800.580,00	Rp 2.989.350,00	Rp 3.037.121,85
Jambi	Rp 2.630.162,13	Rp 2.630.162,13	Rp 2.698.940,87	Rp 2.943.033,08	Rp 3.025.100,00
Jawa Barat	Rp 1.810.351,36	Rp 1.810.351,36	Rp 1.841.487,31	Rp 1.986.670,17	Rp 2.057.495,00

Jawa Tengah**	Rp 1.742.015,22	Rp 1.798.979,12	Rp 1.812.935,43	Rp 1.958.169,69	Rp 2.036.947,00
Jawa Timur	Rp 1.768.777,08	Rp 1.868.777,08	Rp 1.891.567,12	Rp 2.040.244,30	Rp 2.165.244,30
Kalimantan Barat	Rp 2.399.698,65	Rp 2.399.698,65	Rp 2.434.328,19	Rp 2.608.601,75	Rp 2.702.616,00
Kalimantan Selatan	Rp 2.877.448,59	Rp 2.877.448,59	Rp 2.906.473,32	Rp 3.149.977,65	Rp 3.282.812,21
Kalimantan Tengah	Rp 2.903.144,70	Rp 2.903.144,70	Rp 2.922.516,00	Rp 3.181.013,00	Rp 3.261.616,00
Kalimantan Timur	Rp 2.981.378,72	Rp 2.981.378,72	Rp 3.014.497,22	Rp 3.201.396,04	Rp 3.360.858,00
Kep. Bangka Belitung	Rp 3.230.023,66	Rp 3.230.023,66	Rp 3.264.884,00	Rp 3.498.479,00	Rp 3.640.000,00
Kep. Riau	Rp 3.005.460,00	Rp 3.005.460,00	Rp 3.050.172,00	Rp 3.279.194,00	Rp 3.402.492,00
Lampung	Rp 2.432.001,57	Rp 2.432.001,57	Rp 2.440.486,18	Rp 2.633.284,59	Rp 2.716.497,00
Maluku	Rp 2.604.961,00	Rp 2.604.961,00	Rp 2.619.312,83	Rp 2.812.827,66	Rp 2.949.953,00

Maluku Utara	Rp 2.721.530,00	Rp 2.721.530,00	Rp 2.862.231,00	Rp 2.976.720,00	Rp 3.200.000,00
Nusa Tenggara Barat	Rp 2.183.883,00	Rp 2.183.883,00	Rp 2.207.212,00	Rp 2.371.407,00	Rp 2.444.067,00
Nusa Tenggara Timur	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.975.000,00	Rp 2.123.994,00	Rp 2.186.826,00
Papua	Rp 3.516.700,00	Rp 3.516.700,00	Rp 3.561.932,00	Rp 3.864.696,00	Rp 4.024.270,00
Papua Barat	Rp 3.134.600,00	Rp 3.134.600,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.282.000,00	Rp 3.393.500,00
Riau	Rp 2.888.584,01	Rp 2.888.564,01	Rp 2.938.564,01	Rp 3.191.662,53	Rp 3.294.625,56
Sulawesi Barat	Rp 2.678.863,10	Rp 2.678.863,10	Rp 2.678.863,10	Rp 2.871.794,82	Rp 2.914.958,08
Sulawesi Selatan	Rp 3.103.800,00	Rp 3.165.876,00	Rp 3.165.876,00	Rp 3.385.145,00	Rp 3.434.298,00
Sulawesi Tengah	Rp 2.303.711,00	Rp 2.303.711,00	Rp 2.390.739,00	Rp 2.599.546,00	Rp 2.736.698,00
Sulawesi Tenggara	Rp 2.552.014,52	Rp 2.552.014,52	Rp 2.710.595,92	Rp 2.758.984,54	Rp 2.885.964,04

Sulawesi Utara	Rp 3.310.723,00	Rp 3.310.723,00	Rp 3.310.723,00	Rp 3.485.000,00	Rp 3.545.000,00
Sumatera Barat	Rp 2.484.041,00	Rp 2.484.041,00	Rp 2.512.539,00	Rp 2.742.476,00	Rp 2.811.449,27
Sumatera Selatan	Rp 3.043.111,00	Rp 3.144.446,00	Rp 3.144.446,00	Rp 3.404.177,24	Rp 3.456.874,00
Sumatera Utara	Rp 2.499.423,06	Rp 2.499.423,06	Rp 2.522.609,94	Rp 2.710.493,93	Rp 2.809.915,00

Sumber : Data diolah 2026

Keterangan :
* : Provinsi dengan UMP tertinggi
** : Provinsi dengan UMP terendah

Berdasarkan data Upah Minimum (UMP) di Indonesia tahun 2020-2024, terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai UMP yang cukup signifikan antar provinsi. Tahun 2024, provinsi dengan UMP tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 5.067.381,00. Sementara itu, provinsi dengan UMP terendah pada tahun 2024 adalah Jawa Tengah sebesar Rp. 2.036.897,61. Secara umum, nilai UMP di hampir seluruh provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2020-2024. Peningkatan ini dapat dilihat dari perbandingan nilai UMP setiap tahun yang cenderung mengalami penyesuaian ke arah yang lebih tinggi.

Tabel 4.3

Data Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Indonesia

Nama Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	9,71	9,77	9,79	9,89	9,95
Bali	9,31	9,45	9,74	9,74	9,87

Banten	9,22	9,29	9,46	9,48	9,55
Bengkulu	9,2	9,26	9,28	9,35	9,4
DI Yogyakarta	9,95	10,04	10,07	10,16	10,23
DKI Jakarta*	11,17	11,2	11,3	11,42	11,49
Gorontalo	8,26	8,32	8,39	8,48	8,64
Jambi	8,97	9,03	9,07	9,16	9,26
Jawa Barat	8,96	9,03	9,14	9,16	9,24
Jawa Tengah	8,19	8,26	8,38	8,44	8,47
Jawa Timur	8,31	8,37	8,5	8,53	8,69
Kalimantan Barat**	7,9	8	8,1	8,17	8,28
Kalimantan Selatan	8,69	8,74	8,89	8,95	9,02
Kalimantan Tengah	8,95	9,03	9,03	9,07	9,17
Kalimantan Timur	9,99	10,09	10,13	10,17	10,22
Kep. Bangka Belitung	8,49	8,54	8,57	8,66	8,78
Kep. Riau	10,22	10,38	10,46	10,52	10,65
Lampung	8,51	8,56	8,61	8,72	8,8
Maluku	10,2	10,25	10,37	10,38	10,44
Maluku Utara	9,42	9,51	9,6	9,61	9,7
Nusa Tenggara Barat	8,08	8,13	8,31	8,39	8,5
Nusa Tenggara Timur	8,09	8,2	8,27	8,31	8,48
Papua	6,96	7,05	7,31	7,32	10,7
Papua Barat	10	10,03	10,14	10,14	9,87
Riau	9,47	9,52	9,54	9,6	9,69
Sulawesi Barat	8,33	8,39	8,47	8,48	8,56
Sulawesi Selatan	8,86	8,95	9,09	9,12	9,22
Sulawesi Tengah	9,09	9,18	9,17	9,22	9,28
Sulawesi Tenggara	9,41	9,52	9,59	9,62	9,74
Sulawesi Utara	9,74	9,83	9,87	9,94	10,02
Sumatera Barat	9,34	9,46	9,51	9,59	9,72
Sumatera Selatan	8,68	8,78	8,82	8,9	8,98

Sumatera Utara	9,83	9,88	9,99	10,07	10,18

Sumber : Data di olah 2026

Keterangan :

* : Provinsi dengan tingkat pendidikan tertinggi

** : Provinsi dengan tingkat pendidikan terendah

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Indonesia tahun 2020-2024, terlihat adanya perbedaan tingkat pendidikan antar provinsi. Pada tahun 2024, DKI Jakarta menempati posisi sebagai provinsi dengan tingkat pendidikan tertinggi, sebagaimana tercermin dari nilai rerata lama sekolah sebesar 11,49. Sedangkan, provinsi yang menempati posisi dengan tingkat pendidikan paling rendah adalah Kalimantan Barat dengan rerata lama sekolah sebesar 8,28. Sebagian besar provinsi menunjukkan tren peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Dari 33 provinsi, sebanyak 38 provinsi mengalami kenaikan secara stabil setiap tahun seperti Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumtera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan pola fkultuatif, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Fluktuasi tersebut terlihat dari adanya nilai rata-rata lama sekolah yang tidak berubah atau mengalami penurunan pada tahun tertentu.

Tabel 4.4

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia

Nama Provinsi	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aceh	92,21	92,37	92,35	92,71	92,84
Bali	94,54	94,78	95,19	95,37	95,8
Banten	92,39	92,5	92,94	93,31	93,41
Bengkulu	91,18	91,29	91,45	91,74	91,89
DI Yogyakarta	94,8	94,93	95,02	94,98	95,4

DKI Jakarta*	95,7	95,93	96,03	96,4	96,5
Gorontalo	86,76	87,52	88,12	88,24	88,66
Jambi	88,74	88,93	89,31	89,71	89,99
Jawa Barat	89,9	90,17	90,69	90,91	91,04
Jawa Tengah	92,58	92,89	93,23	93,31	93,44
Jawa Timur	91,73	92,36	92,86	92,96	93,05
Kalimantan Barat	87,1	87,19	87,92	88,43	88,67
Kalimantan Selatan	89,26	89,03	89,45	89,82	90,04
Kalimantan Tengah	89,15	89,25	89,89	90,17	90,55
Kalimantan Timur	85,95	86,18	86,77	87,13	87,46
Kep. Bangka Belitung	89,28	89,48	89,95	90,3	90,75
Kep. Riau	94,05	94,25	94,32	94,83	95,11
Lampung	90,78	90,85	91,1	91,33	91,57
Maluku	93,11	93,31	93,29	93,55	93,79
Maluku Utara	89,6	89,79	90,32	90,6	90,87
Nusa Tenggara Barat	90,64	90,67	91,17	91,47	91,62
Nusa Tenggara Timur	92,87	92,77	93,06	93,43	93,81
Papua	79,82	80,37	81,16	81,69	90,26
Papua Barat**	83,09	83,18	83,67	84,24	82,3
Riau	88,59	88,85	89,24	89,51	89,94
Sulawesi Barat	89,58	89,73	89,89	90,34	90,69
Sulawesi Selatan	93,02	93,04	93,45	93,56	93,98
Sulawesi Tengah	91,88	91,94	92,24	92,63	92,9
Sulawesi Tenggara	90,45	90,66	91,03	91,22	91,53
Sulawesi Utara	94,7	94,94	95,29	95,47	95,98
Sumatera Barat	94,55	94,76	95,25	95,54	95,96
Sumatera Selatan	92,71	92,73	93,41	93,8	93,87
Sumatera Utara	90,84	90,95	91,34	91,7	92

Sumber : Data diolah 2026

Keterangan :

* : Provinsi dengan IPG tertinggi

** : Provinsi dengan IPG terendah

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020-2024, terlihat adanya perbedaan nilai IPG antar provinsi. Pada tahun 2024, provinsi dengan IPG tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai sebesar 96,50. Sedangkan, provinsi dengan IPG terendah pada tahun 2024 adalah Papua Barat dengan nilai sebesar 82,30. Walaupun sebagian besar provinsi menunjukkan tren peningkatan IPG dari tahun 2020-2024, namun tidak semua provinsi mengalami kenaikan secara konsisten. Beberapa provinsi yang mengalami penurunan nilai IPG pada tahun tertentu adalag Aceh, DI Yogyakarta, Maluku, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan IPG di Indonesia tidak sepenuhnya meningkat secara linier, melainkan terdapat dinamika perubahan yang berbeda antar provinsi selama periode 2020-2024.

Tabel 4.5.

Data Pengangguran Terbuka di Indonesia

Nama Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	6,59	6,3	6,17	6,03	5,75
Bali**	5,63	5,37	4,8	2,69	1,79
Banten	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11
DI Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
DKI Jakarta	10,95	8,5	7,18	6,53	6,21
Gorontalo	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Jambi	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
Jawa Barat*	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19

Kalimantan Barat	5,81	5,82	5,11	5,05	4,86
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	4,31	4,2
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	4,1	4,01
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
Kep. Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
Kep. Riau	10,34	9,91	8,23	6,8	6,39
Lampung	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Maluku	7,57	6,93	6,88	6,31	6,11
Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
Nusa Tenggara Barat	4,22	3,01	2,89	2,8	2,73
Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Papua	4,28	3,33	2,83	2,67	6,48
Papua Barat	6,8	5,84	5,37	5,38	4,13
Riau	6,32	4,42	4,37	4,23	3,7
Sulawesi Barat	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3	2,95	2,94
Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	3,15	3,09
Sulawesi Utara	7,37	7,06	6,61	6,1	5,85
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,6

Sumber : Data diolah 2026

Keterangan :

* : Provinsi dengan pengangguran terbuka tertinggi
** : Provinsi dengan pengangguran terbuka terendah

Berdasarkan data pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020-2024, terlihat perbedaan nilai antar provinsi. Pada tahun 2024 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Jawa Barat dengan nilai sebesar 6,75. Sedangkan provinsi dengan tingkat

pengangguran terbuka terendah pada tahun 2024 adalah Bali dengan nilai 1,79. Meskipun sebagian provinsi menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran, tidak semua provinsi mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun. Ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan pada tahun tertentu seperti Papua, Gorontalo, dan Kepaluan Bangka Belitung. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran terbuka antar provinsi tidak sepenuhnya menurun secara linier, melainkan mengalami dinamika perubahan yang berbeda pada setiap provinsi selama periode 2020-2024.

Tabel 4.6

Data Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Nama Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh*	293	329	319	321	322
Bali	15	14	14	13	14
Banten	78	80	77	77	81
Bengkulu	18	17	14	14	15
DI Yogyakarta	34	34	35	38	38
DKI Jakarta	206	193	211	211	214
Gorontalo	5	6	6	5	5
Jambi	25	25	21	21	21
Jawa Barat	277	281	281	271	279
Jawa Tengah	125	120	130	125	132
Jawa Timur	186	184	195	179	186
Kalimantan Barat	22	22	21	20	21
Kalimantan Selatan	25	26	28	28	29
Kalimantan Tengah	13	13	10	9	9
Kalimantan Timur	47	44	38	37	38
Kep. Bangka Belitung	8	8	7	6	6
Kep. Riau	20	19	69	71	68

Lampung	39	36	33	30	31
Maluku**	4	4	4	3	3
Maluku Utara	9	10	10	8	8
Nusa Tenggara Barat	74	66	62	63	63
Nusa Tenggara Timur	4	4	4	4	5
Papua	7	6	6	6	6
Papua Barat	4	4	4	4	4
Riau	39	39	145	152	150
Sulawesi Barat	4	5	5	5	5
Sulawesi Selatan	52	47	46	49	50
Sulawesi Tengah	17	17	17	16	16
Sulawesi Tenggara	17	17	12	12	12
Sulawesi Utara	8	7	8	8	8
Sumatera Barat	38	38	43	40	41
Sumatera Selatan	49	51	46	45	45
Sumatera Utara	76	76	73	74	74

Sumber : Data diolah 2026

Keterangan :

* : Provinsi dengan jumlah LKS tertinggi
** : Provinsi dengan jumlah LKS terendah

Berdasarkan data jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Pada tahun 2024, Provinsi dengan jumlah LKS terbanyak adalah Aceh sejumlah 322 unit. Sedangkan jumlah LKS terendah pada tahun 2024 adalah Maluku sejumlah 4 unit. Selain itu, perkembangan jumlah LKS di setiap provinsi tidak selalu mengalami peningkatan konsisten. Ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan pada tahun tertentu seperti Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan adanya dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah diberbagai wilayah Indonesia.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif tujuannya menampilkan gambaran umum terkait karakteristik data penelitian yang mencakup angka maksimum, angka minimum, nilai rerata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan jumlah lembaga keuangan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 33 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2020–2024. Hasil menganalisis diperlihatkan melalui tabel, sebagaimana yang sudah dipaparkan di bawah ini :

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Rata-Rata (Mean)	Std. Deviasi
UMP (X_1)	5.067.381	1.704.608	2.797.862	5.95.740,9
Pendidikan (X_2)	11,49000	6,960000	9,248788	0,825188
IPG (X_3)	95,50000	79,82000	91,24612	3,233810
Pengangguran terbuka (X_4)	10,95000	1,790000	5,137152	1,753945
Kemiskinan (Y)	27,38000	3,800000	10,26939	5,171490
Jumlah lembaga keuangan syariah (Z)	65,00000	2,000000	13,29091	15,64391

Sumber : Data diolah 2026

Nilai maksimum variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5.067.381, nilai minimum sebesar 1.704.608, nilai rerata (mean) sebesar 2.797.862 dan nilai standar deviasi sebesar 595.740,9. Data tersebut menunjukkan bahwa UMP terdapat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam penetapan upah minimum antar provinsi. Nilai maksimum variabel pendidikan sebesar 11,49000, nilai minimum sebesar 6,960000, nilai rerata (mean) sebesar 9,248788, dan nilai std. deviasi

sebesar 0,825188. Data tersebut menunjukkan bahwa variasi tingkat pendidikan antar provinsi relatif kecil dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di berbagai provinsi cenderung memiliki pola yang relatif seragam, meskipun masih terdapat beberapa wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Nilai maksimum variabel IPG sebesar 95,50000, nilai minimum sebesar 79,82000, nilai rerata (mean) sebesar 91,24612, dan nilai std. deviasi sebesar 3,233810. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya variasi indeks pembangunan gender antar provinsi. Perbedaan nilai indeks pembangunan gender ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan masih berbeda antar wilayah. Nilai maksimum variabel pengangguran terbuka sebesar 10,95000, nilai minimum sebesar 1,790000, nilai rerata (mean) sebesar 5,137152, dan nilai std. deviasi sebesar 1,753945. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran antar provinsi memiliki variasi yang cukup moderat.

Nilai maksimum variabel kemiskinan sebesar 27,38000, nilai minimum sebesar 3,800000, nilai rerata (mean) sebesar 10,26939, dan nilai std. deviasi sebesar 5,171490. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya variasi tingkat kemiskinan yang cukup besar antar provinsi selama periode penelitian. Perbedaan yang cukup besar antar nilai maksimum dan minimum menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Nilai maksimum variabel jumlah lembaga keuangan syariah sebesar 65,00000, nilai minimum sebesar 2,000000, nilai rerata (mean) sebesar 13,29091, dan nilai std. deviasi sebesar 15,64391. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya variasi yang cukup besar dalam jumlah lembaga keuangan syariah antar provinsi.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan karakteristik data antar provinsi di Indonesia selama periode

penelitian tahun 2020-2024. Variabel UMP, kemiskinan, dan jumlah lembaga keuangan syariah menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah. Sementara itu, pendidikan menunjukkan variasi yang relatif kecil sehingga menggambarkan bahwa tingkat pendidikan antar provinsi cenderung lebih merata. Disisi lain, variabel IPG dan pengangguran terbuka menunjukkan variasi yang bersifat moderat antar provinsi. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran bahwa kondisi sosial dan ekonomi antar provinsi di Indonesia masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yang menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

C. Statistik Inferensial dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Pemilihan Model

Uji ini dilakukan untuk mendapatkan model estimasi yang terbaik antara FEM, CEM, dan REM. Model yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

a. Uji Chow

Dalam regresi data panel, Uji Chow digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah FEM atau CEM. Apabila ada *Prob. Cross Section Chi Square* dengan nilai > 0,05 berarti model yang dipilih adalah CEM. Disisi lain, bila nilai < 0,05 berarti model yang dipilih adalah FEM.[230] Hasil uji Chow pada studi ini yakni :

---

[230] Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views, 222*.

Tabel 4.8

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	595.690698	(32,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	827.955269	32	0.0000

Sumber : data diolah, 2026

Angka probabilitas uji Chow adalah 0,0000 < 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu model *FEM*. Bila model yang terpilih yaitu *FEM*, maka proses pemilihan model perlu dilanjutkan pada Uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dipergunakan untuk memilih antara *FEM* dengan *REM*. Bilamana angka *Prob. Cross Section Random* < 0,05, berarti modelnya yang terpilih yaitu FEM. Sebaliknya, bila nilai *Prob. Cross Section Random* > 0,05, berarti model yang terpilih yaitu REM.[231] Hasil Uji Hausman yakni :

Tabel 4.9

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.013137	5	0.1555

Sumber : Data diolah, 2026

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1555 > 0,05, sehingga model yang dipilih adalah REM dan proses pemilihan model masih harus dilanjutkan pada Uji *Lagrange Multiplier*.

[231] Ibid, 225.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* dipergunakan untuk menjamin model manakah yang akan terpilih untuk melakukan estimasi serta analisis diantara model *REM* atau model *CEM*. Bilamana angka *Prob.Value* dari Breusch-Pagan > 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu *CEM*. Sebaliknya, bila nilai < 0,05 berarti modelnya yang terpilih yaitu *REM*.[232] *Lagrange Multiplier* dalam studi ini yakni :

Tabel 4.10

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	315.7958 (0.0000)	1.355735 (0.2443)	317.1515 (0.0000)

Sumber : Data diolah, 2026

Angka probabilitas Uji Lagrange Multiplier sejumlah 0,0000 < 0,05, sehingga model yang sebaiknya terpilih yaitu model *REM*. Berbagai uji yang dilaksanakan dalam proses pemilihan model menampilkan *REM* adalah model yang terbaik dan akan dipergunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

2. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya mengamati apakah nilai residual terditribusi normal ataupun tidak.[233] Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.[234] Dengan ketentuan yakni :

H_0 : angka sig > 0,05 maka data residual terdistribusi normal

---

[232] Matondang and Nasution, *Praktik Analisis Data : Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews & SPSS, 167*.

[233] Duli, *Metodologi Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi Dan Analisis Data Dengan SPSS, 114*.

[234] Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis, 189*.

H_a : angka sig < 0,05 maka data residual tidak terdistribusi normal[235]

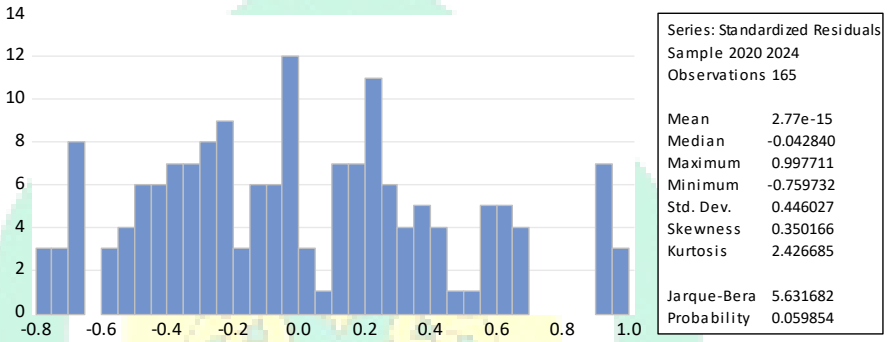

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Dari pengujian normalitas pada gambar di atas, didapat angka probability sejumlah 0,059854. Angka probability tersebut melampaui tingkat sig. 0,05. Berarti kesimpulannya residual pada regresi terdistribusikan normal, alhasil model regresi terpenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya keterkaitan antar residual dalam model regresi linier, khususnya antara periode t dan periode sebelumnya (t-1). Guna pendeteksian ada ataupun tidaknya autokorelasi bisa menggunakan pendekatan *Durbin-Watson* (DW). Kriteria memilih keputusan yakni:

Bila 0 < d < dL, artinya ditemukan autokorelasi positif

Bila 4 – dL < d < 4, artinya tidak ditemukan autokorelasi positif ataupun negatif

---

[235] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 138*.

Bila dU < d < 4 – dU, artinya tidak ditemukan autokorelasi positif ataupun negatif

Bila dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, pengujian tidak meyakinkan[236]

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	-0.401970
S.D. dependent var	0.802969
Sum squared resid	25.04273
Durbin-Watson stat	1.910581

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Diketahui N = 33 dan K ada 5 variabel, artinya dari tabel acuan DW dengan α = 5% mendapat hasil yakni :

1) Nilai DL : 1,1270
2) Nilai 4-DL : 2,8730
3) Nilai DU : 1,8128
4) Nilai 4-DU : 2,1872
5) Nilai DW : 1,910581

Hasil pengujian *Durbin-Watson* menunjukkan bahwa nilai DW berada dalam rentang DU dan (4−DU), yaitu DU < DW < 4-DU = 1,8128 < 1,910581 < 2,1872, yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilaksanakan untuk mengidentifikasikan terdapatnya hubungan yang kuat antarvariabel indepeden pada pemodelan regresi. Pengujian ini tujuannya menjamin tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen yang berpotensi memengaruhi keakuratan hasil estimasi.[237] Melalui matriks korelasi, deteksi multikolineritas dilaksanakan dengan mengamati nilai korelasi

[236] *Ibid, 138.*
[237] *Ibid, 139.*

antarvariabel independen. Bila koefisien korelasi diantara dua variabel bebas melampaui 0,8 maka kondisi tersebut menampilkan adanya potensi multikolinieritas yang dignifikan pada pemodelan regresi. Bilamana angka korelasi antarvariabel independen lebih rendah dibandingkan korelasi diantara variabel dependen dan masing-masing variabel independen, berarti kesimpulannya tidak ditemukan masalah multikolinieritas yang serius. Dengan demikian, nilai korelasi di bawah 0,8 menampilkan bawa model regresi terbebas dari permasalahan multikolinieritas.[238]

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinieritas

	Y KEMISKI...	X1 UPAH M...	X2 PENDID...	X3 INDEKS...	X4 PENGA...	Z JUMLAH ...
Y_KEM...	1.000000	-0.122425	-0.330053	-0.426216	-0.305596	-0.167770
X1_UP...	-0.122425	1.000000	0.398426	-0.094982	0.105984	0.020610
X2_PE...	-0.330053	0.398426	1.000000	0.425258	0.455536	0.198837
X3_IN...	-0.426216	-0.094982	0.425258	1.000000	0.233768	0.257504
X4_PE...	-0.305596	0.105984	0.455536	0.233768	1.000000	0.497168
Z_JUM...	-0.167770	0.020610	0.198837	0.257504	0.497168	1.000000

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Hasil tersebut menampilkan koefisien korelasi X_1 dan X_2 senilai 0,3998426 < 0,8, X_1 dan X_3 senilai -0,094982 < 0,8, X_1 dan X_4 senilai 0,105984 < 0,8, X_1 dan Z senilai 0,020610 < 0,8, X_2 dan X_3 senilai 0,425258 < 0,8, X_2 dan X_4 senilai 0,455536 < 0,8, X_2 dan Z senilai 0,198837 < 0,8, X_3 dan X_4 senilai 0,233768 < 0,8, X_3 dan Z senilai 0,257504 < 0,8, X_4 dan Z senilai 0,497168 < 0,8. Berarti kesimpulannya terbebas dari multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas karena seluruh nilai korelasi < 0,8.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas tujuannya digunakan untuk mengidentifikasi apakah varians residual bersifat tidak konstan antar observasi dalam model regresi. Karna data yang dipergunakan pada penelitian ini, adalah *time series*, maka metode yang tepat digunakan ialah metode *Scatter Plot*. Pada metode ini, analisis dilakukan melalui

---

[238] Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views, 142*.

pengamatan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Pada metode *Scatter Plot*, kriteria penelitian yakni :

1) Keberadaan pola tertentu pada sebaran titik, seperti pola yang teratur (bergelombang atau mengalami perubahan bentuk dari melebar ke menyempit), menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas
2) Sebaliknya, jika sebaran titik tidak menunjukkan pola yang sistematis dan tersebar secara acak di sekitar nilai nol pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas[239]

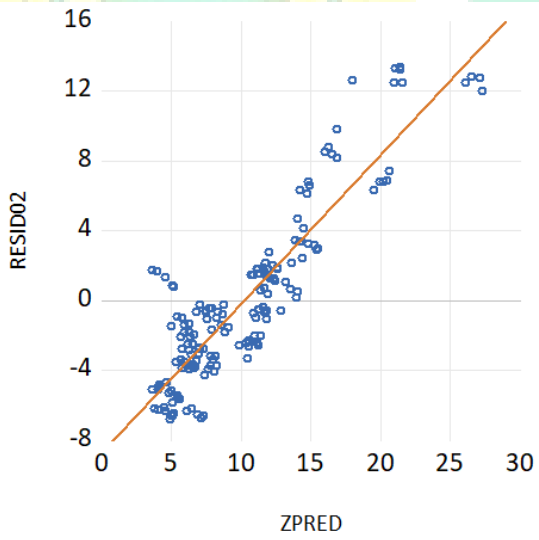

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Hasil menguji heteroskedastisitas menggunakan *scatter plot*. Sebaran titik pada hubungan antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (RESID) tampak acak dan tidak membentuk pola tertentu di sekitar garis regresi serta tidak menciptakan pola spesifik. Penyebaran titik

---

[239] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 139.*

yang tidak menciptakan pola sistematis tersebut menampilkan varians residual relatif konstan pada setiap tingkat nilai prediksi. Dengan demikian, model regresi yang dipergunakan pada penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi kesamaan varian residual dapat terpenuhi.

3. Uji Hipotesis dan Interprestasi

a. Uji T (Parsial)

Penelitian ini menguji pengaruh variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi. Terdapat empat hipotesis pada penelitian yang akan diuji secara parsial melalui uji T dengan angka sig. 0,05. Kriteria memilih keputusan yakni:

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya H_0 terima sedangkan H_a ditolak

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya H_0 tolak sedangkan H_a diterima[240]

Tabel 4.13

Hasil Uji T (Parsial)

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/13/26 Time: 01:04
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.70951	9.744520	3.972439	0.0001
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.29E-06	3.67E-07	-3.515972	0.0006
X2_PENDIDIKAN	-2.130842	0.415275	-5.131160	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.053219	0.148333	-0.358781	0.7202
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.052111	0.055987	-0.930767	0.3534

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini diperoleh dari k = 5 (jumlah variabel), n = 165 (jumlah observasi), nilai df = n-k = 165-5 = 160. Dengan mempertimbangkan nilai kritis distribusi t pada tingkat

[240] Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 138.

signifikansi sebesar 5% (0,05) dalam penelitian ini terletak pada df 160 sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,975. Pengujian parsial terhadap setiap variabel independen menunjukkan hasil, yakni :

1) Hipotesis pertama : Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

   Hipotesis pertama berfungsi untuk menguji hubungan UMP dalam mempengaruhi kemiskinan. Dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisien sejumlah -0,00000129 dengan angka t_{hitung} sejumlah -3,515972 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-3,515972 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,0006 < 0,05, berarti kesimpulannya UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga H_1 pada penelitian ini diterima.

2) Hipotesis kedua : Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

   Hipotesis kedua berfungsi untuk menguji hubungan pendidikan dalam mempengaruhi kemiskinan. Berdasarkan uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -2,130842 dengan angka t_{hitung} sejumlah -5,131160 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-5,131160 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,0000 < 0,05, berarti kesimpulannya pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga H_2 pada penelitian ini diterima.

3) Hipotesis ketiga : Hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

   Hipotesis ketiga berfungsi untuk menguji hubungan IPG dalam memengaruhi kemiskinan. Berdasarkan hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -0,053219 dengan angka t_{hitung} sejumlah -0,358781 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-0,358781 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,7202 > 0,05, berarti kesimpulannya

IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga H_3 pada penelitian ini ditolak.

4) Hipotesis empat : Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

Hipotesis ketiga berfungsi untuk menguji hubungan pengangguran terbuka dalam mempengaruhi kemiskinan. Dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -0,052111 dengan angka t_{hitung} sejumlah -0,930767 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-0,930767< 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,3534 > 0,05, berarti kesimpulannya pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga H_4 pada penelitian ini ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) pada penelitian ini dipergunakan untuk menguji variabel independen dengan bersimultan terhadap variabel dependen. Dengan kriteria memilih keputusan yakni :

Bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ataupun sig < 0,05 artinya H_0 tolak sedangkan H_a diterima

Bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ ataupun sig > 0,05 artinya H_0 terima sedangkan H_a ditolak[241]

[241] Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, 313*.

Tabel 4.14

Hasil Uji F (Simultan)

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/08/26 Time: 20:58
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.29E-06	3.67E-07	-3.515972	0.0006
X2_PENDIDIKAN	-2.130842	0.415275	-5.131160	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.053219	0.148333	-0.358781	0.7202
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.052111	0.055987	-0.930767	0.3534
C	38.70951	9.744520	3.972439	0.0001

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	4.808449	0.9927
Idiosyncratic random	0.413608	0.0073

Weighted Statistics			
R-squared	0.760383	Mean dependent var	0.394751
Adjusted R-squared	0.754393	S.D. dependent var	0.844708
S.E. of regression	0.418627	Sum squared resid	28.03973
F-statistic	126.9334	Durbin-Watson stat	1.292698
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Hipotesis kelima : Pengaruh UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka dalam memengaruhi kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024

Hipotesis kelima berfungsi untuk menguji pengaruh UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka dalam mempengaruhi kemiskinan. Berdasarkan hasil uji F (simultan) maka bisa dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,0000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum (UMP), pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga H_5 pada penelitian ini diterima.

c. Uji Determinasi (R^2)

Ukuran sampel dan jumlah variabel independen/prediktor dipertimbangkan oleh koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R-squared*). Angka ini seharusnya meningkat secara substansial ketika lebih banyak variabel independen diperkenalkan. Skor yang lebih besar (mendekati 1) menunjukkan bahwa model lebih akurat, ini sering digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model.[242]

Tabel 4.15

Hasil Uji Determinasi (R^2)

R-squared	0.761476
Adjusted R-squared	0.753975
S.E. of regression	0.418694
F-statistic	101.5200
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Dari hasil menguji determinasi (R^2) diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sejumlah 0,753975. Nilai tersebut menampilkan kemampuan variabel independen yang terdiri dari UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka dalam menjelaskan variasi kemiskinan masih berada pada tingkat yang relatif kuat, karena *Adjusted R-Square* mendekati angka 1. Dengan demikian, sekitar 75,39% variasi kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024 bisa diterangkan oleh variabel independen pada pemodelan, sedangkan, 24,61% sisanya terpengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

[242] Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset : Kuantitatif, Kualititatif, Gabungan*, Edisi I. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), 156.

d. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

1) Regresi Berganda

Tabel 4.16

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/08/26 Time: 20:58
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.29E-06	3.67E-07	-3.515972	0.0006
X2_PENDIDIKAN	-2.130842	0.415275	-5.131160	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.053219	0.148333	-0.358781	0.7202
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.052111	0.055987	-0.930767	0.3534
C	38.70951	9.744520	3.972439	0.0001

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = 38.70951 - 1{,}29E06X_1 - 2{,}130842X_2 - 0{,}053219X_3 - 0{,}052111X_4 + \varepsilon$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP), pendidikan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan pengangguran terbuka cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

2) Pengujian moderasi pada penelitian ini mempergunakan *MRA* dengan menciptakan variabel interaksi diantara variabel independen dan variabel moderasi, yaitu jumlah lembaga keuangan syariah. Variabel interaksinya yang dipergunakan pada pemodelan mencakup X_1Z (UMP x Jumlah LKS), X_2Z (Pendidikan x Jumlah LKS), X_3Z (IPG x Jumlah LKS), dan X_4Z (Pengangguran terbuka x Jumlah LKS).

Tabel 4.17

Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/13/26 Time: 01:56
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.60345	10.76535	3.957463	0.0001
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.42E-06	4.58E-07	-3.091860	0.0024
X2_PENDIDIKAN	-1.813607	0.483163	-3.753617	0.0002
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.124541	0.167767	-0.742341	0.4590
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.095878	0.074782	-1.282099	0.2017
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA..	-0.009561	0.018282	-0.522997	0.6017
X1Z	6.00E-09	5.12E-09	1.172534	0.2428
X2Z	-0.013676	0.008889	-1.538453	0.1260
X3Z	0.001265	0.000843	1.500107	0.1356
X4Z	0.000384	0.000630	0.609983	0.5428

Sumber : Data diolah oleh E-Views 12, 2026

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y = 42.60345 - 1.42E\text{-}06X_1 - 1.813607X_2 - 0.124541X_3 - 0.095878X_4 - 0.009561Z + 6.00E\text{-}09X_1Z - 0.013676X_2Z + 0.001265X_3Z + 0.000384X_4Z + \varepsilon$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan syariah berperan sebagai variabel moderasi yang diuji melalui variabel interaksi antara masing-masing variabel independen dengan jumlah lembaga keuangan syariah. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh moderasi tersebut, hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menampilkan nilai probablitas untuk masing-masing variabel interaksi yaitu :

a) Hipotesis keenam : Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

   Dari hasil menguji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_1Z sejumlah 0,2428. Angka itu melampaui sig. 0,05, berarti kesimpulannya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh UMP kepada kemiskinan di

Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga H_6 pada penelitian ini ditolak.

b) Hipotesis ketujuh : Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Dari hasil menguji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_1Z sejumlah 0,2428. Angka itu melampaui sig. 0,05, berarti kesimpulannya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh UMP kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga H_6 pada penelitian ini ditolak.

c) Hipotesis kedelapan : Hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Dari hasil menguji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_3Z sejumlah 0,1356. Angka itu melampaui sig. 0,05, berarti kesimpulannya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh IPG kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga H_8 pada penelitian ini ditolak.

d) Hipotesis kesembilan : Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020–2024

Dari hasil menguji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_4Z sejumlah 0,5428. Angka itu melampaui sig. 0,05, berarti kesimpulannya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga H_9 pada penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menampilkan seluruh variabel interaksi diantara variabel

independen dan variabel moderasi memiliki nilai probabilitas melampaui tingkat sig. 0,05. Kondisi ini menampilkan variabel jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi hubungan antara UMP, pendidikan, IPG, maupun pengangguran terbuka kepada kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024. Dengan demikian, keberadaan jumlah lembaga keuangan syariah pada penelitian ini tidak berperan dalam menguatkan maupun memperlemah pengaruh variabel independen kepada kemiskinan.

D. Pembahasan

1. Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024

Secara teoritis, kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu pendapatan (upah).[243] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi naik, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[244] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[245]

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisien sejumlah -0,00000129 dengan angka t_{hitung} sejumlah -3,515972 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-3,515972 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,0006 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima yang artinya UMP berpengaruh

---

[243] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, and Dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[244] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Ahlimedia Press* (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022), 41.

[245] Aris Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*, Cet. I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 92.

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024.

Temuan tersebut menampilkan peningkatan UMP relatif diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan UMP dapat melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah. Temuan ini, selaras terhadap penelitian yang dilaksanakan Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, dan Sri Indah Nikensari yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan upah minimum serta penyerapan tenaga kerja dengan tingkat kemiskinan.[246] Akan tetapi penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinta Marino Simbolon, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, dkk yang menyebutkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan.[247]

2. **Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024**

Secara teoritis, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendidikan.[248] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[249] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[250]

---

[246] Angraeni, Nurjanah, and Nikensari, "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia."

[247] Simbolon et al., "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia."

[248] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[249] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[250] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -2,130842 dengan angka t_{hitung} sejumlah -5,131160 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-5,131160 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,0000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 ditolak sedangkan H_2 diterima yang artinya pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024.

Temuan tersebut mampu membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan pendidikan cenderung diikuti oleh penurunan kemiskinan. Dalam jangka panjang, peningkatan pendidikan juga dapat memaksimalkan produktivitas tenaga kerja serta mendukung mobilitas sosial masyarakat. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan peluang ekonomi sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[251] Akan tetapi penelitian ini tidak sejalaras dengan penelitian Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J Masinambow, dan Agnes L.Ch. P. Lapian menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara pendidikan dan kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik.[252]

---

[251] Fadhilah, Muchtar, and Sihombing, "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

[252] Tompoh, Masinambow, and Lapian, "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara."

3. **Hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024**

Secara teoritis, gender merupakan faktor yang sangat mempengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas.[253] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[254] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam akses pendidikan dan ekonomi, punya peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[255]

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -0,053219 dengan angka t_{hitung} sejumlah -0,358781 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-0,358781 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,7202 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 terima sedangkan H_3 ditolak yang artinya IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender yang tercermin dalam IPG belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Kondisi ini dapat dipahami dari hasil analisis deskriptif, nilai IPG antar provinsi di Indonesia relatif tinggi dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu

---

[253] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[254] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

[255] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

besar, sehingga tingkat kesetaraan gender antar provinsi cenderung memiliki pola yang hampir seragam. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu menyebutkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPG.[256] Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wajid Ali, Ambiya, dan Devi Prasad Dash menyebutkan IPG dengan *outcome* pembangunan, menemukan peningkatan gender berkorelasi dengan perbaikan (penurunan) beberapa ukuran ketimpangan kemiskinan.[257]

4. **Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2020–2024**

Secara teoritis, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran.[258] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, sehingga menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya mempengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.[259] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[260]

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji T (parsial) bisa terlihat nilai koefisiensinya sejumlah -0,052111 dengan angka t_{hitung} sejumlah -0,930767 artinya tidak melampaui t_{tabel} (-0,930767 < 1,975). Di samping itu, angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,3534 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis

---

[256] Setiani, Saleh, and Payu, "Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi."

[257] Ali, Ambiya, and Dash, "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies."

[258] Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, 9*.

[259] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[260] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

ini H_0 terima sedangkan H_4 ditolak dengan artian pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024.

Temuan ini tidak sepenuhnya selaras terhadap teori yang mengungkapkan peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan. Jika dilihat dari data deskriptif, sebagian besar provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024 mengalami penurunan tingkat pengangguran yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten antar wilayah, karena terdapat beberapa provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran relatif rendah tetapi tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kondisi ini juga memperlihatkan pengaruh kemiskinan yang terjadi tidak semata-mata berasal dari tingkat pengangguran, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti produktivitas tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, besarnya sektor informal di Indonesia serta banyaknya penduduk yang tidak bekerja secara formal namun tetap memiliki pendapatan. Oleh sebab itu, dalam model regresi penelitian ini hubungan pengangguran dan kemiskinan tidak terlihat signifikan. Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aulia Rachman Marpaung, Iin Sintia, dan Fitri Rahayu menyebutkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.[261] Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.[262]

---

[261] Marpaung, Sintia, and Fitri, "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province."

[262] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

5. **Hubungan UMP, Pendidikan, IPG, dan Pengangguran Terbuka dalam memengaruhi Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024**

Secara teoritis, kemiskinan juga dipengaruhi beragam faktor yang saling berhubungan yaitu tingkat pendapatan, edukasi, akses terhadap barang serta pelayanan, gender, situasi lingkungan, geografis, serta lokasi.[263] Di samping itu, Bank Dunia menjelaskan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, pekerjaan, akses kepada layanan dan infrastruktur dasar, serta lokasi geografis.[264] Kemiskinan juga bisa dikarenakan beragam faktor lain seperti penghasilan yang rendah, pengangguran, kurangnya pendidikan atau ketrampilan yang tidak sesuai, serta ketidakstabilan ekonomi.[265]

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji F (simultan) bisa terlihat angka probabilitas signifikansinya sejumlah 0,0000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 tolak sedangkan H_5 diterima yang artinya UMP, pendidikan, IPG, serta pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024.

Temuan ini memperlihatkan faktor ekonomi dan sosial tersebut secara simultan memiliki peran dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, meskipun berdasarkan pengujian parsial tidak semua variabel menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, karakteristik pasar tenaga kerja di Indonesia yang ditandai dengan besarnya sektor informal juga turut mempengaruhi hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Banyak penduduk yang

---

[263] Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Cet. I. (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 15.

[264] Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 58-62*.

[265] Ade Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Cet. Perta. (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024), 9.

tidak bekerja pada sektor formal, namun tetap memperoleh pendapatan melalui berbagai aktivitas ekonomi informal, sehingga pengaruh beberapa variabel, khususnya pengangguran terbuka, tidak selalu terlihat signifikan secara individual terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa menyebutkan secara simultan jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan mempengaruhi kemiskinan.[266] Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shifa Nur Amalia dan Lestari Agusalim menyatakan bahwa ditemukan pengaruh yang signifikan dari pemberdayaan gender, rasio upah gender, pertumbuhan investasi, maupun tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.[267]

6. **Hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020-2024**

Secara teoritis, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendapatan (upah).[268] Dengan adanya upah minimum kelayakan hidup para pekerja menjadi naik, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.[269] Kenaikan upah minimum dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan dapat menekan angka kemiskinan.[270]

---

[266] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

[267] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

[268] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, and Dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[269] Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi, "Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Ahlimedia Press* (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022), 41.

[270] Aris Soelistyo, *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*, Cet. I. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 92.

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[271] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam mempengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[272] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [273] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[274]

Temuan ini diperkuat oleh hasil temuan Rahma Viona Angraeni, Siti Nurjanah, dan Sri Indah Nikensari, yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum serta penyerapan tenaga kerja dengan tingkat kemiskinan.[275] Berbeda dengan temuan oleh Cinta Marino Simbolon, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, dan lainnya, yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan.[276]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil

---

[271] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[272] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[273] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[274] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[275] Angraeni, Nurjanah, and Nikensari, "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia."

[276] Simbolon et al., "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia."

meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[277] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[278] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[279]

Secara konseptual dapat dipahami bahwa apabila tingkat upah minimum bertambah, maka pendapatan pekerja juga akan bertambah. Dampaknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik dan potensi kemiskinan dapat berkurang. Kebijakan UMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga. Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah diupayakan bisa semakin mendukung kesejahteraan tersebut melalui penyediaan akses pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan yang dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif. Dengan adanya akses tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha atau meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga dampak peningkatan upah terhadap penurunan kemiskinan dapat menjadi lebih kuat. Sehingga lembaga keuangan syariah seharusnya dapat menguatkan hubungan antara UMP dan kemiskinan.

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_1Z sejumlah 0,2428, angka itu melampaui sig. 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 terima sedangkan H_6 ditolak

---

[277] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[278] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[279] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

yang artinya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh UMP terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024.

Temuan ini memperlihatkan meskipun secara teoritis lembaga keuangan syariah diupayakan bisa menguatkan dampak peningkatan upah terhadap penurunan kemiskinan melalui penyediaan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, namun dalam penelitian ini peran tersebut belum terlihat secara signifikan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh distribusi lembaga keuangan syariah yang belum merata di seluruh wilayah atau keterbatasan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah pada penelitian ini belum mampu memperkuat hubungan antara UMP dan kemiskinan secara signifikan.

7. **Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020-2024**

Secara teoritis, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendidikan.[280] Seseorang yang dibekali pendidikan dengan disertai ide/gagasan yang kreatif mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan meminimalisir terjadinya kemiskinan dilingkungan sekitar.[281] Peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi di suatu wilayah berkaitan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lebih besar.[282]

---

[280] Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*; Bank, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*; Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*.

[281] Agus Nasrullah et al., *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*, Cet. I. (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 50-51.

[282] Dedi Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007), 33.

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[283] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam mempengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[284] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [285] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[286]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Kevin Visart Tompoh, Vecky A.J. Masinambow, dan Agnes L.Ch. P. Lapian menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara pendidikan dan kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik..[287] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing, yang menyatakan bahwa pendidikan secara parsial berkaitan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.[288]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang

---

[283] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[284] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[285] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[286] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[287] Tompoh, Masinambow, and Lapian, "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara."

[288] Fadhilah, Muchtar, and Sihombing, "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[289] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[290] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[291]

Secara konseptual dapat dipahami bahwa pendidikan memilki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga individu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan, peluang masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan juga semakin besar. Namun, keberadaan lembaga keuangan syariah diupayakan bisa semakin menguatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan dan dukungan terhadap kegiatan usaha produktif. Dengan adanya akses tersebut, individu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dapat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah seharusnya dapat menguatkan hubungan antara pendidikan dan kemiskinan.

Hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_2Z sejumlah 0,1260, angka itu melampaui sig. 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 terima sedangkan H_7 ditolak

---

[289] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[290] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[291] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

yang artinya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024.

Temuan ini memperlihatkan meskipun secara teoritis lembaga keuangan syariah diupayakan bisa menguatkan dampak pendidikan terhadap penurunan kemiskinan melalui penyediaan akses pembiayaan dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif, namun dalam penelitian ini peran tersebut belum terlihat signifikan. Kondisi ini bisa dikarenakan belum meratanya distribusi lembaga keuangan syariah oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah pada penelitian ini belum mampu memperkuat hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan secara signifikan.

8. **Hubungan antara IPG dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020-2024**

Secara teoritis, gender merupakan faktor yang sangat mempengaruhi norma sosial di sebagian masyarakat karena masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap tidak menjadi prioritas..[292] Rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan akan lebih rentan mengalami kemiskinan.[293] Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menekankan bahwa kesetaraan, khususnya dalam akses pendidikan dan ekonomi, punya peran penting dalam menurunkan kemiskinan.[294]

---

[292] Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*, *Intimedia*, Cet. I. (Malang: Intimedia, 2009), 24.

[293] Maulana, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, 62*.

[294] Amalia and Agusalim, "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia."

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[295] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam mempengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[296] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan pengembangan lembaga keuangan Islam [297] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[298]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Wajid Ali, Ambiya, dan Devi Prasad Dash menyebutkan IPG dengan *outcome* pembangunan, menemukan peningkatan gender berkorelasi dengan perbaikan (penurunan) beberapa ukuran ketimpangan kemiskinan.[299] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu menyebutkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPG.[300]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil

---

[295] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[296] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

[297] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[298] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[299] Ali, Ambiya, and Dash, "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies."

[300] Setiani, Saleh, and Payu, "Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi."

meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[301] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[302] Sementara penelitian yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[303]

Berdasarkan kedua konsep tersebut dapat dipahami bahwa apabila pembangunan gender meningkat dan didukung oleh akses keuangan melalui lembaga keuangan syariah, maka dampaknya terhadap penurunan kemiskinan seharusnya menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah diupayakan bisa menguatkan pengaruh IPG terhadap kemiskinan.

Namun, hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_3Z sejumlah 0,1356, angka itu melampaui sig. 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 terima sedangkan H_8 ditolak yang artinya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh IPG terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024.

Temuan ini memperlihatkan meskipun secara teoritis peningkatan kesetaraan gender yang didorong oleh akses keuangan melalui lembaga keuangan syariah diupayakan bisa menguatkan upaya penurunan kemiskinan, namun pada penelitian ini peran tersebut belum terlihat secara signifikan. Kondisi ini bisa dikarenakan belum meratanya distribusi lembaga keuangan syariah di berbagai wilayah

---

[301] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[302] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

[303] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

atau masih terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini belum mampu memperkuat hubungan antara IPG dan kemiskinan secara signifikan.

9. **Hubungan antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan dengan jumlah lembaga keuangan syariah sebagai variabel moderasi di Indonesia pada periode 2020-2024**

Secara teoritis, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran.[304] Jumlah pengangguran yang terlalu banyak dapat mengakibatkan perekonomian di suatu negara menjadi tidak bertumbuh, sehingga menyebabkan data pendapatan dan konsumsi menurun yang akhirnya mempengaruhi keagregatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.[305] Pengangguran juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan menimbulkan instabilitas sosial di tingkat masyarakat.[306]

Kemiskinan juga dapat dikurangi dengan adanya Lembaga Keauangan Syariah.[307] Bank syariah punya peran dan kontribusi yang penting dalam mempengaruhi perekonomian nasional, karena menggunakan prinsip syariah yang sistem operasional dan pengelolaannya mengutamakan prinsip maslahah atau kesejahteraan masyarakat.[308] Memperluas jaringan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi merupakan beberapa tujuan

---

[304] Komaludin et al., *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, 9*.

[305] Afriza Amir, *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*, Cet. I. (Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 34.

[306] Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 29.

[307] Nadya et al., "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty."

[308] Muhammad Nur Alam and Ambas Hamida, *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*, Cet. I. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 1.

pengembangan lembaga keuangan Islam [309] Upaya memperluas akses serta mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi penerapan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.[310]

Temuan ini diperkuat dengan hasil temuan dari Emilia Titah Nabibah dan Nurul Hanifa menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan[311] Namun, tidak sama dengan hasil temuan dari Rizky Aulia Rachman Marpaung, Iin Sintia, dan Fitri Rahayu menyebutkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.[312]

Temuan ini juga diperkuat dengan hasil temuan dari Antin Ayunda, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, dan Fitri Hayati yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya terpinggirkan dan membantu memerangi kemiskinan.[313] Serta hasil temuan dari Khoiriya Hasyim, Putri, Nur Himah dan Nani Hanifah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.[314] Sementara penelitian

---

[309] Y. Rahmat Akbar et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 12-13.

[310] Yuliana and Damayanti, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan."

[311] Nabibah and Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

[312] Marpaung, Sintia, and Fitri, "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province."

[313] Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat."

[314] Hasyim et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura."

yang dilaksanakan Dian Alasta Selian menyebutkan pembiayaan Bank Syariah tidak mempengaruhi kemiskinan.[315]

Secara konseptual dapat dipahami bahwa apabila tingkat pengangguran naik, maka potensi kemiskinan juga akan naik. Namun, keberadaan lembaga keuangan syariah diupayakan bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dan kegiatan usaha, sehingga dampak pengangguran terhadap kemiskinan dapat berkurang. Dengan demikian, secara logika penelitian, lembaga keuangan syariah seharusnya dapat menguatkan hubungan antara pengangguran dan kemiskinan.

Namun, hasil analisis empiris pada penelitian ini menampilkan dari hasil uji regresi moderasi didapat angka probabilitas pada variabel X_4Z sejumlah 0,5428, angka itu melampaui sig. 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini H_0 terima sedangkan H_9 ditolak yang artinya jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2020-2024.

Temuan ini memperlihatkan meskipun secara teoritis keberadaan lembaga keuangan syariah diupayakan bisa membantu mengurangi dampak pengangguran terhadap kemiskinan melalui penyediaan akses pembiayaan dan dukungan terhadap kegiatan produktif, namun pada penelitian ini peran tersebut belum terlihat secara signifikan. Kondisi ini bisa dikarenakan belum meratanya distribusi lembaga keuangan syariah di berbagai wilayah atau masih terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini belum mampu menguatkan hubungan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan secara signifikan.

---

[315] Selian and Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara."

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data yang didukung oleh pembahasan terkait UMP, pendidikan, IPG, pengangguran terbuka, kemiskinan, serta jumlah lembaga keuangan syariah, menghasilkan temuan penelitian yang mengarah pada beberapa kesimpulan, yakni :

1. UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024. Sehingga penelitian ini memperlihatkan peningkatan upah minimum cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.
2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2020-2024. Sehingga penelitian ini memperlihatkan peningkatan pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM, memperluas peluang kerja, serta memaksimalkan produktivitas tenaga kerja. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga potensi terjadinya kemiskinan dapat berkurang.
3. IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga penelitian ini memperlihatkan peningkatan kesetaraan gender yang tercermin dalam IPG belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dipahami dari hasil analisis deskriptif yang menampilkan nilai IPG antar provinsi di Indonesia relatif tinggi dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar, sehingga tingkat kesetaaran gender antar provinsi relatif mempunyai pola yang hampir seragam. Akibatnya, pengaruh IPG terhadap kemiskinan tidak terlihat signifikan dalam model penelitian.

4. Pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Sehingga penelitian ini memperlihatkan perubahan tingkat pengangguran terbuka tidak secara langsung merubah kemiskinan secara signifikan dalam periode 2020-2024. Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, tetapi juga oleh faktor lain seperti produktivitas tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.
5. Secara simultan, variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka mempengaruhi kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Disamping itu, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) pada model regresi utama sejumlah 0,753975 yang berarti bahwa sebesar 75,39% variasi tingkat kemiskinan bisa diterangkan oleh variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya sebesar 24,61% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
6. Jumlah lembaga keuangan syariah tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2024. Penelitian ini dibuktikan dari hasil *Moderated Regression Analysis (*MRA*)* yang memperlihatkan seluruh variabel interaksi memiliki nilai probablitias lebih besar dari 0,05, sehingga jumlah lembaga keuangan syariah tidak mampu menguatkan atau melemahkan pengaruh UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan keberadaan lembaga keuangan syariah dalam periode 2020-2024 belum secara optimal berperan dalam menguatkan hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan sosial tersebut terhadap penurunan kemiskinan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan cenderung berlangsung secara langsung tanpa dipengaruhi oleh keberadaan lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diupayakan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Saran praktis (bagi pemerintah dan pembuat kebijakan)
   a. Perlu peningkatan sinkronasi antara kebijakan upah minimum dan penciptaan lapangan kerja

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga kebijakan kenaikan UMP sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, tetapi juga kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja. Tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja, kenaikan UMP berpotensi menimbulkan pengangguran baru yang justru meningkatkan kemiskinan.
   b. Perlu menekankan kualitas pendidikan berbasis keterampilan (*Skill-based education*)

      Temuan penelitian menunjukkan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, namun peningkatan jumlah pendidikan saja tidak cukup apabila tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memperluas program bantuan pendidikan (seperti KIP/BOS) serta meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri guna menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif.
   c. Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) perlu diarahkan pada akses ekonomi produktif bagi perempuan

      Upaya pengentasan kemiskinan melalui perspektif gender harus diintegrasikan dengan penyediaan akses modal dan penelitian kerja yang inklusif bagi perempuan. Melalui strategi ini, peningkatan kualitas pembangunan gender diharapkan mampu berkontribusi secara langsung dalam menekan tingkat kemiskinan secara nasional.

d. Penguatan peran sektor informal

   Melihat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan, diduga karena besarnya proporsi pekerja sektor informal yang tetap rentan miskin, pemerintah sebaiknya memberikan perlindungan sosial dan kemudahan modal bagi UMKM dan sektor informal agar pendapatan mereka stabil dan produktif.

2. Bagi lembaga keuangan syariah

   a. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan efektivitas layanan, bukan hanya jumlah lembaga

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan syariah tidak mampu memoderasi pengaruh variabel UMP, pendidikan, IPG, dan pengangguran terhadap kemiskinanyang mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga saja belum cukup untuk memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

   b. Perlu penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan sektor mikro dan usaha produktif masyarakat miskin

      Lembaga keuangan syariah lebih fokus pada pembiayaan berbasis usaha mikro, pembiayaan tanpa anggunan besar, serta pendampingan usaha agar masyarakat miskin tidak hanya memperoleh akses keuangan, tetapi juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

   c. Perlu integrasi antara program keuangan syariah dan program sosial seperti zakat, infak, dan wakaf produktif

      Pendekatan integratif antara lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial Islam dapat meningkatkan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan secara lebih sistematis.

3. Bagi peneliti selanjutnya

   a. Penambahan variabel lain

      Melihat masih terdapat 24,61% variasi kemiskinan yang dipengaruhi faktor di luar model, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang relevan seperti inflasi, infrastruktur dasar (akses

air bersih/listrik), program bantuan sosial untuk memperkaya analisis dan faktor lainnya.

b. Analisis spasial atau klaster

Melihat adanya variasi data yang tinggi antar provinsi (terlihar dari standar deviasi yang besar pada variabel kemiskinan dan lembaga keuangan syariah), peneliti selanjutnya dapat menerapkan analisis klaster berdasarkan pembagian wilayah (Barat, Tengah, dan Timur Indonesia). Pendekatan ini penting untuk menangkap dinamika kemiskinan daerah secara lebih spesifik dan mendalam, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik unik di setiap wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggambarkan dinamika kemiskinan lebih komprehensif dan menangkap perubahan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Cet. I. Kota Makassar: CV. Syair Media Press, 2023.

Aini, Siti Nur, and Ris Yuwono Yudo Nugroho. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Buletin Ekonomika Pembangunan* 4, no. 1 (2023).

Akbar, Y. Rahmat, Jaidil Kamal, Irsyadi Zain, and Firman Surya Putra. *Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish Digital, 2023.

Alam, Muhammad Nur, and Ambas Hamida. *Bank Syariah : Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutus Rantai Kemiskinan)*. Cet. I. Riau: DOTPLUS Publisher, 2023.

Alam S. *Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas XI*. Sidoarjo: Penerbit Erlangga, 2007.

Ali, Wajid, Ambiya, and Devi Prasad Dash. "Examining the Perspectives of Gender Development and Inequality : A Tale of Selected Asian Economies." *MDPI* 13 (2023).

Amalia, Shifa Nur, and Lestari Agusalim. "Peran Gender Dalam Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lintas Provinsi Di Indonesia." *Sosio Informa* 9, no. 2 (2023): 119–134.

Amir, Afriza. *Pedoman Analisis Fundamental Makro Ekonomi Untuk Para Investor*. Cet. I. Kota Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Angraeni, Rahma Viona, Siti Nurjanah, and Sri Indah Nikensari. "The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption Adn The Covid-19 Pandemic

on Poverty in Indonesia." *International Journal of Management Finance* 1, no. 4 (2024): 43–48.

Anwer, Zaheer. "Shariah Compliant Financial Intermediation in Dual Banking System." *Turkish Journal of Islamic Economics* (2020).

Armini, Maudina, Wahyu Hidayat Riyanto, Dwi Nur Azizah, and Dkk. *Dari Angka Menuju Makna : Memahami Arah Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia*. Cet. I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Arum, Wahyu Sri Ambar. *Metodologi Penelitian Kontemporer Strategi, Teknologi, Dan Publikasi Di Era Digital*. Kota Padang: CV Dunia Perbitan Buku, 2025.

Aulia, Muhammad Reza, Hartini, Meutia Qudraty, Abdul Muzammil, and Yulia Windi Tanjung. *Ekonomi Hijau : Harmonisasi Keadilan Sosial Dan Lingkungan Di Provinsi Aceh*. Cet. I. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and Fitri Hayati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043–1052.

Badan Pusat Statistik. "Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2020-2024." *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2024. Accessed February 15, 2026. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html.

———. "Potret Pendidikan Indonesia (Statistik Pendidikan) Tahun 2020." *Badan Pusat Statistik* (2020).

———. "Statistik Pendidikan Tahun 2021." *Badan Pusat Statistik* (2021).

———. "Statistik Pendidikan Tahun 2022." *Badan Pusat Statistik* (2022).

———. "Statistik Pendidikan Tahun 2023." *Badan Pusat Statistik* 12 (2023).

———. "Statistik Pendidikan Tahun 2024." *Badan Pusat Statistik* 13 (2024).

———. “Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2020-2024.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2025.html.

Badan Pusat Statistik Indonesia. “Laju Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2019-2024.” *BPS*. Last modified 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0IzI=/pertumbuhan-ekonomi--tahun-2025.html.

———. “Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Dan Daerah Tahun 2019-2024.” *BPS*. Last modified 2024. Accessed February 15, 2026. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah--persen-.html.

Badan Pusat Statistik Kutai Timur. “Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Kutai Timur 2022” (2022).

Al Badri, Ziddan Muhammad. “Analisis Empiris Hubungan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kemiskinan Di Indonesia : Studi Pada Perbankan Syariah, Saham Syariah, Dan Asuransi Syariah.” *Jurnal Bisnis Net* 2023, no. 1 (2025): 164–171.

Bank, The World. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: The World Bank, 2007.

Berutu, Novita Sari, Asnawi, and Muhammad Roni. “Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 15 Provinsi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 8, no. 1 (2025).

BPS Provinsi Jawa Timur. “Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2024 Volume 3, 2024.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur* 3 (2024).

Christoper, Rio, and Rosmiyati Chodijah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2017): 35–52.

Dermawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Duli, Nikolaus. *Metodologi Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi Dan Analisis Data Dengan SPSS*. Cet. I. Sleman: Deepublish Publisher, 2019.

Fadhilah, Muhammad Hafiz, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing. "Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *JMPKP : Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 5 (2023): 1–18.

Fatkhurahman. *Buku Ajar : Metodologi Riset Manajemen Dan Bisnis*. Cet. I. Pekanbaru Riau: CV Karya Nofa, 2025.

Ferezagia, Debrina Vita. *Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

Feriyanto, Nur. *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Teori Dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025.

Fitriana, Ayu, Muna Sofiana, Siti Nahdiatun Nisa, and Satria Putra Arsibal. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Inisiatif :Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 3 (2024).

Ghozali, Imam. *Ekonometrika : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan IBM SPSS 24*. Cet. 3. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

Hair Jr., Joseph F., G.Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, Marko Sarstedt, Nicholas P.Danks, and Soumya Ray. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021.

Hanifuddin, Iza, and Nur Kasanah. *Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Nilai Budaya Lokal*. Cet. I. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025.

Hasyim, Khoiriya, Putri, Nur Hikmah, and Nani Hanifah. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memerangi Kemiskinan Di Jayapura." *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum islam, Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2025): 35–41.

Hayya, Aurelia Khoirunisa, Nairobi, and Arif Darmawan. "Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pembangunan Di Indonesia : Kajian Teoritis Dan Empiris." *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 5 (2025): 5934–5944.

Hermawan, Arif, Maziyyatul Mufiedah, Virginia Madina, Zukhrufiyah Mei Santika, Muhammad Faturahman Kasim, and Tiodora Hadumaon Siagian. "Kesenjangan Kondisi Pengangguran Lulusan SMK / MAK Di Indonesia : Analisis Antargender Dan Variabel-Variabel Yang Memengaruhinya." *J-naker (Jurnal Ketenagkerjaan)* 18, no. 3 (2023).

Ibrahim, Ali. *Ekonomi Makro*. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Indrawati. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. "Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020-2024." *Satudata Kemnaker*. Last modified 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252.

Khomsan, Ali, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarief, and Dadang Sukandar. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Cet. Perta. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015.

Khomsan, Ali, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, and Dkk. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Cet. I. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015.

Komaludin, Ade, Nanang Rusliana, Jumri, and Dodi Tirtana. *Ekonomi : Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Cet. Perta. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2024.

Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 315–339.

Kusumawati, Bella, and Sarjiyanto. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 22, no. 1 (2022): 1–10.

Li, Jian, Eryong Xue, Yukai Wei, and Yunshu He. "How Popularising Higher Education Affects Economic Growth and Poverty Alleviation: Empirical Evidence from 38 Countries." *Humanities & Social Sciences Communications* (2024).

Maipita, Indra. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Mardiansah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)* 1, no. 1 (2023): 37–51.

Marpaung, Riky Aulia Rachman, IIn Sintia, and Rahayu Fitri. "Analysis of the Effect of Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province." *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)* 2, no. 5 (2023): 361–376.

Masnita, Yolanda, Leila Husna Yusran, Willy Arafah, Anzori Tawakal, and Nirdukita Ratnawati. *Pengantar Kebijakan Publik Dalam Perspektif Ekonomi*. Cet. I. Kota Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2025.

Matara, Kusmawaty, Harun Daluku, Hijrah Lahaling, Prasaja Arifiyanto, Andi Inar Sahabat, Fida Yus Faizah, Nadjamudin, Freksi Gani, Titi Kristiani Margono, and Trisna Buntayo. *Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah*. Cet. I. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021.

Matondang, Zulaika, and Hanmi Fadillah Nasution. *Praktik Analisis Data : Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews & SPSS*. Edisi I. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Maulana, Dedi. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2007.

Millenia, Erliza, and Dewi Zaini. "Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di." *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 10, no. November (2021): 106–114.

Nabibah, Emilia Titah, and Nur Hanifa. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Independent : Journal of Economics* 2 (2022): 1–13.

Nadya, Eva, Maryam, Nelly, Rahma Yulianti, and Pritye Lala Sary. "Advancing Sharia-Compliant Loan Models For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) to Promote Financial Inclucion and Alleviate Poverty." *Proceeding 2nd Medan International Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 865–881.

Nasrullah, Agus, Novia Purnamasari, Loso Judijanto, Irianto, and Tri Wulandari Ginting. *Entrepreneurship Education (Teori Dan Penerapan Pendidikan Kewirausahaan)*. Cet. I. Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2020.” *Otoritas Jasa Keuangan* (2020).

———. “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021.” *Otoritas Jasa Keuangan* (2021).

———. “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022.” *Otoritas Jasa Keuangan* (2022).

———. “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023.” *Otoritas Jasa Keuangan*, no. December (2023).

———. “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2024.” *Otoritas Jasa Keuangan*, no. December (2024).

Pardita, Dewa Putu Yudi, I Gde Wedana Arjawa, Anak Agung Gde Krisna Paramita, and I Made Setena. “Anlysis of Poverty Structure in Indonesia Using a Multifactorial Approach.” *Jurnal ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* 13, no. 2 (2024): 184–198.

Prastyorini, Anik, Khuzaini, and Suwitho. “Pengaruh Pembangunan Manusia Dan Gender Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 02 (2025): 634–647.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021Tentang Pengupahan,” no. 086163 (2021).

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Farid Wajdi. “Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja.” *Ahlimedia Press*. Kota Malang: Ahlimedia Press, 2022.

Putri D, Damai, Salsabila Nurmasanti, Syifa Ramadhani P, and Windy Pradina R. “Analisis Garis Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Gini Ratio , Inflasi , GDP , Tingkat Pengangguran Terbuka , Upah Minimum Tahun 2010-2023.” *IKRAITH-HUMANIORA* 10, no. 1 (2023): 246–258.

Rabial, Kanada, and Zulkipli. *Perencanaan Pendidikan : Kajian Teori Dan Aplikasi*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2024.

Rachman, Arrijal. "Bukan Booming Pekerja Informal, Kementerian Ungkap Masalah Utama RI." *CNBC Indonesia*. Last modified 2025. https://www.cnbcindonesia.com/news/20251009140045-4-674385/bukan-booming-pekerja-informal-kemenkeu-ungkap-masalah-utama-ri.

Rahardja, Prathama, and Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar*. Edisi 4. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Raihan, Marsya, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. "Ketidaksesuaian Pendidikan Dan Lapangan Kerja Bagi Lulusan Perguruan Tinggi." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 4 (2025): 1385–1389.

Ramadhan, Anggia, Radiyan Rahim, and Nurul Nabila Utami. *Teori Pendapatan (Studi Kasus : Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*. Cetakan Pe. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.

Rhani, Ashya Ravika Mahar, Arini Salma Aulia, and Jesslyn Florencia Komala. "Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Implementasi SDGs Kelima Di Indonesia." *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)* 3, no. 2 (2024): 164–183.

Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif : Penelitian Di Bidang Manajamen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Cet. I. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.

Riyanto, Wahyu Hidayat. *Model Kelembagaan Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan*. Cet. I. Malang: UMMPRess, 2025.

Rohmah, Miftakhur, Turmudzi Basyir, Darul Abror, Fitria Nur Masitoh, and Afifah Azmiyati. "Dampak Globalisasi, Kemiskinan, Dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 9, no. 1 (2024): 1–24.

Rosyadi. “Pengaruh Daya Beli Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2017.” *Prosiding SATIESP* (2019): 45–55.

Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Bogor: Guepedia, 2021.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sari, Yolanda, Fakultas Ekonomi, and Universitas Muhammadiyah Jambi. “Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2026): 1330–1338.

Sari, Yulia Adella. “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Equilibirium* 10, no. 2 (2021): 121–130.

Sarwono, Jonathan. *Strategi Melakukan Riset : Kuantitatif, Kualititatif, Gabungan*. Edisi I. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.

Sekarwati, Dias, Wiwin Priana, and Wirya Wardaya. “Impact of Minimum Wage , Inflation, and Economic Growth on Poverty in Yogyakarta Province.” *Journal of Business Management and Economic Development* 2, no. 03 (2024): 1222–1233.

Selian, Dian Alasta, and Syahrul Ependi Siregar. “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara.” *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (2016): 90–104.

Setiani, Siska Agus, Sri Endang Saleh, and Bobby Rantow Payu. “Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP)* 1, no. 3 (2024): 127–137.

Simbolon, Cinta Marito, Fadila Nisa, Haifa Azalia Pinem, and Dkk. "Analysis of The Effect of Human Capital and Minimum Wage on Poverty in Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 213–226.

Soelistyo, Aris. *Macroeconometric Model : Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudencial Di Indonesia*. Cet. Perta. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Sudarwati, Ninik. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Keggagalan Penanggulan Kemiskinan*. *Intimedia*. Cet. I. Malang: Intimedia, 2009.

Sudaryana, Bambang, and Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet. I. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.

Sukmana, Oman, Gusti Pirandy, M. Kesos, and Dkk. *Sosiologi Masalah Sosial (Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggualangan)*. Cet. I. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.

Sukwiaty, Sudirman Jamal, and Slamet Sukamto. *Ekonomi SMA Kelas XI*. Edited by PT Ghalia Indonesia Printing. Cet. I. Bogor, 2009.

Sulaiman, and Ridwan. *Metodologi Penelitian Ilmiah Riset Dan Operasional*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2025.

Suparmoko. *Ekonomi SMA Kelas XI*. Edisi I. Bogor: Yudhistira, 2007.

Surbakti, Sinarta Putra P, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing, Prodi Manajemen, Keuangan Negara, Tangerang Selatan, and Badan Pusat Statistik. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode." *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 37–45.

Suryadin, Asyraf, Rusdi, Mardani, Maulina Hendrik, Yuanita, Dzihan Khilmi Ayu Firdausi, Atma Elfahdi, and Reggy Prakoso. *Sekolah Kesetaraan Dan Tantangan Global (Studi Analisis Kebutuhan Pengembangan Model Sekolah*

Kesetaraan Di Kepulauan Bangka Belitung. DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Tompoh, Kevin Visart, Vecky A.J Masinambow, and Agnes L. Ch. P Lapian. "Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal berkala Imliah Efisiensi* 24, no. 6 (2024): 58–69.

Wahyudi, Setyo Tri. *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Edisi I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Wardina, Yuli, and Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah*. Kota Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024.

Welang, Rizaldi Naftali, George Manuel Viktor Kawung, and Hanly Fenly Djohar Siwu. "Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Din Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2022." *Jurnal berkala Imliah Efisiensi* 24, no. 4 (2024): 61–71.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Widjajanta, Bambang, and Aristanti Widyaningsih. *Mengasah Kemampuan Ekonomi Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Bandung: Citra Praya, 2007.

Wijaya, Shadu Satwika, Guntur Gunarto, and Lilis Sri Sulistiani. *Pengentasan Kemiskinan : Agenda Yang Tidak Pernah Selesai*. Cet. I. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.

Wiranatakusuma, Dimas Bagus, and Ganjar Priambudi. "Determinants of Poverty in Indonesia." *Sociologia Y Tecnoceiencia* 2 (2021): 243–267.

Yuliana, Indah, and Aliya Damayanti. "Strategi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan." *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 2 (2025): 50–54.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ernis Prasetiyo Wati lahir di Ponorogo pada 31 Mei 1996. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Setiyo Widodo dan Ibu Dwi Erna Wati. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri Belang dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikandi SMP Negeri 1 Bungkal dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Slahung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada tahun 2019. Saat ini, Ernis Prasetiyo Wati tengah melanjutkan studi magister (S2) di Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besar Ponorogo sebagai bagian dari upaya dalam mengembangkan keilmuan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Panel Variabel Penelitian Tahun 2020-2024

No	Nama Provinsi	Periode	Y	X1	X2	X3	X4	Z		Jumlah LKS	X1Z	X2Z	X3Z	X4Z
			Kemiskinan	Upah Minimum Provinsi	Pendidikan	Indeks Pembangunan Gender	Pengangguran Terbuka	Jumlah Lembaga Keuangan Syariah						
								KPO/ KC	KCP/ UPS					
1	Aceh	2020	15,43	Rp 3.165.031,00	9,71	92,21	6,59	49	244	293	Rp 927.354.083,00	2845	27018	1931
	Aceh	2021	15,53	Rp 3.165.031,00	9,77	92,37	6,3	57	272	329	Rp 1.041.295.199,00	3214	30390	2073
	Aceh	2022	14,75	Rp 3.166.460,00	9,79	92,35	6,17	47	272	319	Rp 1.010.100.740,00	3123	29460	1968
	Aceh	2023	14,45	Rp 3.413.666,00	9,89	92,71	6,03	47	274	321	Rp1.095.786.786,00	3175	29760	1936
	Aceh	2024	12,64	Rp 3.460.672,00	9,95	92,84	5,75	48	274	322	Rp 1.114.336.384,00	3204	29894	1852

2	**Bali**	2020	4,45	Rp 2.494.000,00	9,31	94,54	5,63	6	9	15	Rp 37.410.000,00	139,7	1418	84,45
	Bali	2021	4,72	Rp 2.494.000,00	9,45	94,78	5,37	6	8	14	Rp 34.916.000,00	132,3	1327	75,18
	Bali	2022	4,53	Rp 2.516.971,00	9,74	95,19	4,8	4	10	14	Rp 35.237.594,00	136,4	1333	67,2
	Bali	2023	4,25	Rp 2.713.672,28	9,74	95,37	2,69	4	9	13	Rp 35.277.739,64	126,6	1240	34,97
	Bali	2024	3,8	Rp 2.813.672,00	9,87	95,8	1,79	5	9	14	Rp 39.391.408,00	138,2	1341	25,06
3	**Banten**	2020	6,63	Rp 2.460.996,54	9,22	92,39	10,64	20	58	78	Rp 191.957.730,12	719,2	7206	829,9
	Banten	2021	6,5	Rp 2.460.996,54	9,29	92,5	8,98	20	60	80	Rp 196.879.723,20	743,2	7400	718,4
	Banten	2022	6,24	Rp 2.501.203,11	9,46	92,94	8,09	15	62	77	Rp 192.592.639,47	728,4	7156	622,9
	Banten	2023	6,17	Rp 2.661.280,11	9,48	93,31	7,52	15	62	77	Rp 204.918.568,47	730	7185	579

	Banten	2024	5,7	Rp 2.727.812,11	9,55	93,41	6,68	15	66	81	Rp 220.952.780,91	773,6	7566	541,1
4	**Bengkulu**	2020	15,3	Rp 2.213.604,00	9,2	91,18	4,07	5	13	18	Rp 39.844.872,00	165,6	1641	73,26
	Bengkulu	2021	14,43	Rp 2.215.000,00	9,26	91,29	3,65	5	12	17	Rp 37.655.000,00	157,4	1552	62,05
	Bengkulu	2022	14,34	Rp 2.238.094,31	9,28	91,45	3,59	3	11	14	Rp 31.333.320,34	129,9	1280	50,26
	Bengkulu	2023	14,04	Rp 2.418.280,00	9,35	91,74	3,42	3	11	14	Rp 33.855.920,00	130,9	1284	47,88
	Bengkulu	2024	12,52	Rp 2.507.079,24	9,4	91,89	3,11	4	11	15	Rp 37.606.188,60	141	1378	46,65
5	**DI Yogyakarta**	2020	12,8	Rp 1.704.608,25	9,95	94,8	4,57	9	25	34	Rp 57.956.680,50	338,3	3223	155,4
	DI Yogyakarta	2021	11,91	Rp 1.765.000,00	10,04	94,93	4,56	9	25	34	Rp 60.010.000,00	341,4	3228	155
	DI Yogyakarta	2022	11,49	Rp 1.840.915,53	10,07	95,02	4,06	7	28	35	Rp 64.432.043,55	352,5	3326	142,1

	DI Yogyakarta	2023	11,04	Rp 1.981.782,39	10,16	94,98	3,69	7	31	38	Rp 75.307.730,82	386,1	3609	140,2
	DI Yogyakarta	2024	10,4	Rp 2.125.897,61	10,23	95,4	3,48	8	30	38	Rp 80.784.109,18	388,7	3625	132,2
6	**DKI Jakarta**	2020	4,69	Rp 4.276.349,91	11,17	95,7	10,95	65	141	206	Rp 880.928.081,46	2301	19714	2256
	DKI Jakarta	2021	4,67	Rp 4.416.186,55	11,2	95,93	8,5	64	129	193	Rp 852.324.004,15	2162	18514	1641
	DKI Jakarta	2022	4,61	Rp 4.641.854,00	11,3	96,03	7,18	52	159	211	Rp 979.431.194,00	2384	20262	1515
	DKI Jakarta	2023	4,44	Rp 4.901.798,00	11,42	96,4	6,53	52	159	211	Rp1.034.279.378,00	2410	20340	1378
	DKI Jakarta	2024	4,14	Rp 5.067.381,00	11,49	96,5	6,21	54	160	214	Rp1.084.419.534,00	2459	20651	1329
7	**Gorontalo**	2020	15,59	Rp 2.788.826,00	8,26	86,76	4,28	2	3	5	Rp 13.944.130,00	41,3	433,8	21,4
	Gorontalo	2021	15,41	Rp 2.788.826,00	8,32	87,52	3,01	2	4	6	Rp 16.732.956,00	49,92	525,1	18,06

	Gorontalo	2022	15,51	Rp 2.800.580,00	8,39	88,12	2,58	2	4	6	Rp 16.803.480,00	50,34	528,7	15,48
	Gorontalo	2023	15,15	Rp 2.989.350,00	8,48	88,24	3,06	2	3	5	Rp 14.946.750,00	42,4	441,2	15,3
	Gorontalo	2024	13,87	Rp 3.037.121,85	8,64	88,66	3,13	2	3	5	Rp 15.185.609,25	43,2	443,3	15,65
8	**Jambi**	2020	7,97	Rp 2.630.162,13	8,97	88,74	5,13	6	19	25	Rp 65.754.053,25	224,3	2219	128,3
	Jambi	2021	7,67	Rp 2.630.162,13	9,03	88,93	5,09	7	18	25	Rp 65.754.053,25	225,8	2223	127,3
	Jambi	2022	7,7	Rp 2.698.940,87	9,07	89,31	4,59	4	17	21	Rp 56.677.758,27	190,5	1876	96,39
	Jambi	2023	7,58	Rp 2.943.033,08	9,16	89,71	4,53	4	17	21	Rp 61.803.694,68	192,4	1884	95,13
	Jambi	2024	7,26	Rp 3.025.100,00	9,26	89,99	4,48	4	17	21	Rp 63.527.100,00	194,5	1890	94,08
9	**Jawa Barat**	2020	8,43	Rp 1.810.351,36	8,96	89,9	10,46	63	214	277	Rp 501.467.326,72	2482	24902	2897

	Jawa Barat	2021	7,97	Rp 1.810.351,36	9,03	90,17	9,82	64	217	281	Rp 508.708.732,16	2537	25338	2759
	Jawa Barat	2022	7,98	Rp 1.841.487,31	9,14	90,69	8,31	46	235	281	Rp 517.457.934,11	2568	25484	2335
	Jawa Barat	2023	7,62	Rp 1.986.670,17	9,16	90,91	7,44	46	225	271	Rp 538.387.616,07	2482	24637	2016
	Jawa Barat	2024	7,08	Rp 2.057.495,00	9,24	91,04	6,75	52	227	279	Rp 574.041.105,00	2578	25400	1883
10	**Jawa Tengah**	2020	11,84	Rp 1.742.015,22	8,19	92,58	6,48	37	88	125	Rp 217.751.902,50	1024	11573	810
	Jawa Tengah	2021	11,25	Rp 1.798.979,12	8,26	92,89	5,95	37	83	120	Rp 215.877.494,40	991,2	11147	714
	Jawa Tengah	2022	10,98	Rp 1.812.935,43	8,38	93,23	5,57	29	101	130	Rp 235.681.605,90	1089	12120	724,1
	Jawa Tengah	2023	10,77	Rp 1.958.169,69	8,44	93,31	5,13	29	96	125	Rp 244.771.211,25	1055	11664	641,3
	Jawa Tengah	2024	9,58	Rp 2.036.947,00	8,47	93,44	4,78	34	98	132	Rp 268.877.004,00	1118	12334	631

11	**Jawa Timur**	2020	11,09	Rp 1.768.777,08	8,31	91,73	5,84	44	142	186	Rp 328.992.536,88	1546	17062	1086
	Jawa Timur	2021	11,4	Rp 1.868.777,08	8,37	92,36	5,74	47	137	184	Rp 343.854.982,72	1540	16994	1056
	Jawa Timur	2022	10,38	Rp 1.891.567,12	8,5	92,86	5,49	32	163	195	Rp 368.855.588,40	1658	18108	1071
	Jawa Timur	2023	10,35	Rp 2.040.244,30	8,53	92,96	4,88	32	147	179	Rp 365.203.729,70	1527	16640	873,5
	Jawa Timur	2024	9,79	Rp 2.165.244,30	8,69	93,05	4,19	36	150	186	Rp 402.735.439,80	1616	17307	779,3
12	**Kalimantan Barat**	2020	7,24	Rp 2.399.698,65	7,9	87,1	5,81	9	13	22	Rp 52.793.370,30	173,8	1916	127,8
	Kalimantan Barat	2021	6,84	Rp 2.399.698,65	8	87,19	5,82	9	13	22	Rp 52.793.370,30	176	1918	128
	Kalimantan Barat	2022	6,81	Rp 2.434.328,19	8,1	87,92	5,11	6	15	21	Rp 51.120.891,99	170,1	1846	107,3
	Kalimantan Barat	2023	6,71	Rp 2.608.601,75	8,17	88,43	5,05	6	14	20	Rp 52.172.035,00	163,4	1769	101

	Kalimantan Barat	2024	6,25	Rp 2.702.616,00	8,28	88,67	4,86	7	14	21	Rp 56.754.936,00	173,9	1862	102,1
13	**Kalimantan Selatan**	2020	4,83	Rp 2.877.448,59	8,69	89,15	4,74	7	18	25	Rp 71.936.214,75	217,3	2229	118,5
	Kalimantan Selatan	2021	4,56	Rp 2.877.448,59	8,74	89,25	4,95	9	17	26	Rp 74.813.663,34	227,2	2321	128,7
	Kalimantan Selatan	2022	4,61	Rp 2.906.473,32	8,89	89,89	4,74	7	21	28	Rp 81.381.252,96	248,9	2517	132,7
	Kalimantan Selatan	2023	4,29	Rp 3.149.977,65	8,95	90,17	4,31	7	21	28	Rp 88.199.374,20	250,6	2525	120,7
	Kalimantan Selatan	2024	4,02	Rp 3.282.812,21	9,02	90,55	4,2	8	21	29	Rp 95.201.554,09	261,6	2626	121,8
14	**Kalimantan Tengah**	2020	5,26	Rp 2.903.144,70	8,95	89,26	4,58	6	7	13	Rp 37.740.881,10	116,4	1160	59,54
	Kalimantan Tengah	2021	5,16	Rp 2.903.144,70	9,03	89,03	4,53	7	6	13	Rp 37.740.881,10	117,4	1157	58,89
	Kalimantan Tengah	2022	5,22	Rp 2.922.516,00	9,03	89,45	4,26	4	6	10	Rp 29.225.160,00	90,3	894,5	42,6

	Kalimantan Tengah	2023	5,11	Rp 3.181.013,00	9,07	89,82	4,1	4	5	9	Rp 28.629.117,00	81,63	808,4	36,9
	Kalimantan Tengah	2024	5,26	Rp 3.261.616,00	9,17	90,04	4,01	4	5	9	Rp 29.354.544,00	82,53	810,4	36,09
15	**Kalimantan Timur**	2020	6,64	Rp 2.981.378,72	9,99	85,95	6,87	14	33	47	Rp 140.124.799,84	469,5	4040	322,9
	Kalimantan Timur	2021	6,27	Rp 2.981.378,72	10,09	86,18	6,83	14	30	44	Rp 131.180.663,68	444	3792	300,5
	Kalimantan Timur	2022	6,44	Rp 3.014.497,22	10,13	86,77	5,71	10	28	38	Rp 114.550.894,36	384,9	3297	217
	Kalimantan Timur	2023	6,11	Rp 3.201.396,04	10,17	87,13	5,31	10	27	37	Rp 118.451.653,48	376,3	3224	196,5
	Kalimantan Timur	2024	5,51	Rp 3.360.858,00	10,22	87,46	5,14	11	27	38	Rp 127.712.604,00	388,4	3323	195,3
16	**Kep. Bangka Belitung**	2020	4,89	Rp 3.230.023,66	8,49	89,28	5,25	2	6	8	Rp 25.840.189,28	67,92	714,2	42
	Kep. Bangka Belitung	2021	4,67	Rp 3.230.023,66	8,54	89,48	5,03	2	6	8	Rp 25.840.189,28	68,32	715,8	40,24

	Kep. Bangka Belitung	2022	4,61	Rp 3.264.884,00	8,57	89,95	4,77	2	5	7	Rp 22.854.188,00	59,99	629,7	33,39
	Kep. Bangka Belitung	2023	4,52	Rp 3.498.479,00	8,66	90,3	4,56	2	4	6	Rp 20.990.874,00	51,96	541,8	27,36
	Kep. Bangka Belitung	2024	5,08	Rp 3.640.000,00	8,78	90,75	4,63	2	4	6	Rp 21.840.000,00	52,68	544,5	27,78
17	**Kep. Riau**	2020	6,13	Rp 3.005.460,00	10,22	94,05	10,34	5	15	20	Rp 60.109.200,00	204,4	1881	206,8
	Kep. Riau	2021	5,75	Rp 3.005.460,00	10,38	94,25	9,91	6	13	19	Rp 57.103.740,00	197,2	1791	188,3
	Kep. Riau	2022	6,03	Rp 3.050.172,00	10,46	94,32	8,23	9	60	69	Rp 210.461.868,00	721,7	6508	567,9
	Kep. Riau	2023	5,69	Rp 3.279.194,00	10,52	94,83	6,8	9	62	71	Rp 232.822.774,00	746,9	6733	482,8
	Kep. Riau	2024	4,78	Rp 3.402.492,00	10,65	95,11	6,39	12	56	68	Rp 231.369.456,00	724,2	6467	434,5

18	**Lampung**	2020	12,76	Rp 2.432.001,57	8,51	90,78	4,67	10	29	39	Rp 94.848.061,23	331,9	3540	182,1
	Lampung	2021	11,67	Rp 2.432.001,57	8,56	90,85	4,69	10	26	36	Rp 87.552.056,52	308,2	3271	168,8
	Lampung	2022	11,44	Rp 2.440.486,18	8,61	91,1	4,52	7	26	33	Rp 80.536.043,94	284,1	3006	149,2
	Lampung	2023	11,11	Rp 2.633.284,59	8,72	91,33	4,23	7	23	30	Rp 78.998.537,70	261,6	2740	126,9
	Lampung	2024	10,62	Rp 2.716.497,00	8,8	91,57	4,19	8	23	31	Rp 84.211.407,00	272,8	2839	129,9
19	**Maluku**	2020	17,99	Rp 2.604.961,00	10,2	93,11	7,57	2	2	4	Rp 10.419.844,00	40,8	372,4	30,28
	Maluku	2021	16,3	Rp 2.604.961,00	10,25	93,31	6,93	2	2	4	Rp 10.419.844,00	41	373,2	27,72
	Maluku	2022	16,23	Rp 2.619.312,83	10,37	93,29	6,88	2	2	4	Rp 10.477.251,32	41,48	373,2	27,52
	Maluku	2023	16,42	Rp 2.812.827,66	10,38	93,55	6,31	2	1	3	Rp 8.438.482,98	31,14	280,7	18,93

	Maluku	2024	15,78	Rp 2.949.953,00	10,44	93,79	6,11	2	1	3	Rp 8.849.859,00	31,32	281,4	18,33
20	**Maluku Utara**	2020	6,97	Rp 2.721.530,00	9,42	89,6	5,15	3	6	9	Rp 24.493.770,00	84,78	806,4	46,35
	Maluku Utara	2021	6,38	Rp 2.721.530,00	9,51	89,79	4,71	3	7	10	Rp 27.215.300,00	95,1	897,9	47,1
	Maluku Utara	2022	6,37	Rp 2.862.231,00	9,6	90,32	3,98	2	8	10	Rp 28.622.310,00	96	903,2	39,8
	Maluku Utara	2023	6,46	Rp 2.976.720,00	9,61	90,6	4,31	2	6	8	Rp 23.813.760,00	76,88	724,8	34,48
	Maluku Utara	2024	6,03	Rp 3.200.000,00	9,7	90,87	4,03	2	6	8	Rp 25.600.000,00	77,6	727	32,24
21	**Nusa Tenggara Barat**	2020	14,23	Rp 2.183.883,00	8,08	90,64	4,22	22	52	74	Rp 161.607.342,00	597,9	6707	312,3
	Nusa Tenggara Barat	2021	13,83	Rp 2.183.883,00	8,13	90,67	3,01	21	45	66	Rp 144.136.278,00	536,6	5984	198,7
	Nusa Tengga	2022	13,82	Rp 2.207.212,00	8,31	91,17	2,89	16	46	62	Rp 136.847.144,00	515,2	5653	179,2

	ra Barat													
	Nusa Tenggara Barat	2023	13,85	Rp 2.371.407,00	8,39	91,47	2,8	16	47	63	Rp 149.398.641,00	528,6	5763	176,4
	Nusa Tenggara Barat	2024	11,91	Rp 2.444.067,00	8,5	91,62	2,73	17	46	63	Rp 153.976.221,00	535,5	5772	172
22	**Nusa Tenggara Timur**	2020	21,21	Rp 1.950.000,00	8,09	92,87	4,28	3	1	4	Rp 7.800.000,00	32,36	371,5	17,12
	Nusa Tenggara Timur	2021	20,44	Rp 1.950.000,00	8,2	92,77	3,77	3	1	4	Rp 7.800.000,00	32,8	371,1	15,08
	Nusa Tenggara Timur	2022	20,23	Rp 1.975.000,00	8,27	93,06	3,54	3	1	4	Rp 7.900.000,00	33,08	372,2	14,16
	Nusa Tenggara Timur	2023	19,96	Rp 2.123.994,00	8,31	93,43	3,14	3	1	4	Rp 8.495.976,00	33,24	373,7	12,56
	Nusa Tenggara Timur	2024	19,02	Rp 2.186.826,00	8,48	93,81	3,02	3	2	5	Rp 10.934.130,00	42,4	469,1	15,1

23	**Papua**	2020	26,8	Rp 3.516.700,00	6,96	79,82	4,28	2	5	7	Rp 24.616.900,00	48,72	558,7	29,96
	Papua	2021	27,38	Rp 3.516.700,00	7,05	80,37	3,33	2	4	6	Rp 21.100.200,00	42,3	482,2	19,98
	Papua	2022	26,8	Rp 3.561.932,00	7,31	81,16	2,83	2	4	6	Rp 21.371.592,00	43,86	487	16,98
	Papua	2023	26,03	Rp 3.864.696,00	7,32	81,69	2,67	2	4	6	Rp 23.188.176,00	43,92	490,1	16,02
	Papua	2024	18,09	Rp 4.024.270,00	10,7	90,26	6,48	2	4	6	Rp 24.145.620,00	64,2	541,6	38,88
24	**Papua Barat**	2020	21,7	Rp 3.134.600,00	10	83,09	6,8	2	2	4	Rp 12.538.400,00	40	332,4	27,2
	Papua Barat	2021	21,82	Rp 3.134.600,00	10,03	83,18	5,84	2	2	4	Rp 12.538.400,00	40,12	332,7	23,36
	Papua Barat	2022	21,43	Rp 3.200.000,00	10,14	83,67	5,37	2	2	4	Rp 12.800.000,00	40,56	334,7	21,48
	Papua Barat	2023	20,49	Rp 3.282.000,00	10,14	84,24	5,38	2	2	4	Rp 13.128.000,00	40,56	337	21,52

	Papua Barat	2024	21,09	Rp 3.393.500,00	9,87	82,3	4,13	2	2	4	Rp 13.574.000,00	39,48	329,2	16,52
25	**Riau**	2020	7,04	Rp 2.888.584,01	9,47	88,59	6,32	11	28	39	Rp 112.654.776,39	369,3	3455	246,5
	Riau	2021	7	Rp 2.888.564,01	9,52	88,85	4,42	10	29	39	Rp 112.653.996,39	371,3	3465	172,4
	Riau	2022	6,84	Rp 2.938.564,01	9,54	89,24	4,37	21	124	145	Rp 426.091.781,45	1383	12940	633,7
	Riau	2023	6,68	Rp 3.191.662,53	9,6	89,51	4,23	21	131	152	Rp 485.132.704,56	1459	13606	643
	Riau	2024	6,36	Rp 3.294.625,56	9,69	89,94	3,7	22	128	150	Rp 494.193.834,00	1454	13491	555
26	**Sulawesi Barat**	2020	11,5	Rp 2.678.863,10	8,33	89,58	3,32	2	2	4	Rp 10.715.452,40	33,32	358,3	13,28
	Sulawesi Barat	2021	11,85	Rp 2.678.863,10	8,39	89,73	3,13	2	3	5	Rp 13.394.315,50	41,95	448,7	15,65
	Sulawesi Barat	2022	11,92	Rp 2.678.863,10	8,47	89,89	2,34	2	3	5	Rp 13.394.315,50	42,35	449,5	11,7

	Sulawesi Barat	2023	11,49	Rp 2.871.794,82	8,48	90,34	2,27	2	3	5	Rp 14.358.974,10	42,4	451,7	11,35
	Sulawesi Barat	2024	10,71	Rp 2.914.958,08	8,56	90,69	2,68	2	3	5	Rp 14.574.790,40	42,8	453,5	13,4
27	**Sulawesi Selatan**	2020	8,99	Rp 3.103.800,00	8,86	93,02	6,31	13	39	52	Rp 161.397.600,00	460,7	4837	328,1
	Sulawesi Selatan	2021	8,53	Rp 3.165.876,00	8,95	93,04	5,72	12	35	47	Rp 148.796.172,00	420,7	4373	268,8
	Sulawesi Selatan	2022	8,66	Rp 3.165.876,00	9,09	93,45	4,51	11	35	46	Rp 145.630.296,00	418,1	4299	207,5
	Sulawesi Selatan	2023	8,7	Rp 3.385.145,00	9,12	93,56	4,33	11	38	49	Rp 165.872.105,00	446,9	4584	212,2
	Sulawesi Selatan	2024	7,77	Rp 3.434.298,00	9,22	93,98	4,19	12	38	50	Rp 171.714.900,00	461	4699	209,5
28	**Sulawesi Tengah**	2020	13,06	Rp 2.303.711,00	9,09	91,88	3,77	6	11	17	Rp 39.163.087,00	154,5	1562	64,09
	Sulawesi Tengah	2021	12,18	Rp 2.303.711,00	9,18	91,94	3,75	6	11	17	Rp 39.163.087,00	156,1	1563	63,75

	Sulawesi Tengah	2022	12,3	Rp 2.390.739,00	9,17	92,24	3	4	13	17	Rp 40.642.563,00	155,9	1568	51
	Sulawesi Tengah	2023	12,41	Rp 2.599.546,00	9,22	92,63	2,95	4	12	16	Rp 41.592.736,00	147,5	1482	47,2
	Sulawesi Tengah	2024	11,04	Rp 2.736.698,00	9,28	92,9	2,94	4	12	16	Rp 43.787.168,00	148,5	1486	47,04
29	**Sulawesi Tenggara**	2020	11,69	Rp 2.552.014,52	9,41	90,45	4,58	7	10	17	Rp 43.384.246,84	160	1538	77,86
	Sulawesi Tenggara	2021	11,74	Rp 2.552.014,52	9,52	90,66	3,92	7	10	17	Rp 43.384.246,84	161,8	1541	66,64
	Sulawesi Tenggara	2022	11,27	Rp 2.710.595,92	9,59	91,03	3,36	3	9	12	Rp 32.527.151,04	115,1	1092	40,32
	Sulawesi Tenggara	2023	11,43	Rp 2.758.984,54	9,62	91,22	3,15	3	9	12	Rp 33.107.814,48	115,4	1095	37,8
	Sulawesi Tenggara	2024	10,63	Rp 2.885.964,04	9,74	91,53	3,09	3	9	12	Rp 34.631.568,48	116,9	1098	37,08

30	**Sulawesi Utara**	2020	7,78	Rp 3.310.723,00	9,74	94,7	7,37	4	4	8	Rp 26.485.784,00	77,92	757,6	58,96
	Sulawesi Utara	2021	7,36	Rp 3.310.723,00	9,83	94,94	7,06	3	4	7	Rp 23.175.061,00	68,81	664,6	49,42
	Sulawesi Utara	2022	7,34	Rp 3.310.723,00	9,87	95,29	6,61	2	6	8	Rp 26.485.784,00	78,96	762,3	52,88
	Sulawesi Utara	2023	7,38	Rp 3.485.000,00	9,94	95,47	6,1	2	6	8	Rp 27.880.000,00	79,52	763,8	48,8
	Sulawesi Utara	2024	6,7	Rp 3.545.000,00	10,02	95,98	5,85	2	6	8	Rp 28.360.000,00	80,16	767,8	46,8
31	**Sumatera Barat**	2020	6,56	Rp 2.484.041,00	9,34	94,55	6,88	11	27	38	Rp 94.393.558,00	354,9	3593	261,4
	Sumatera Barat	2021	6,04	Rp 2.484.041,00	9,46	94,76	6,52	11	27	38	Rp 94.393.558,00	359,5	3601	247,8
	Sumatera Barat	2022	6,04	Rp 2.512.539,00	9,51	95,25	6,28	7	36	43	Rp 108.039.177,00	408,9	4096	270
	Sumatera Barat	2023	5,95	Rp 2.742.476,00	9,59	95,54	5,94	7	33	40	Rp 109.699.040,00	383,6	3822	237,6

	Sumatera Barat	2024	5,42	Rp 2.811.449,27	9,72	95,96	5,75	8	33	41	Rp 115.269.420,07	398,5	3934	235,8
32	**Sumatera Selatan**	2020	12,98	Rp 3.043.111,00	8,68	92,71	5,51	15	34	49	Rp 149.112.439,00	425,3	4543	270
	Sumatera Selatan	2021	12,79	Rp 3.144.446,00	8,78	92,73	4,98	16	35	51	Rp 160.366.746,00	447,8	4729	254
	Sumatera Selatan	2022	11,95	Rp 3.144.446,00	8,82	93,41	4,63	10	36	46	Rp 144.644.516,00	405,7	4297	213
	Sumatera Selatan	2023	11,78	Rp 3.404.177,24	8,9	93,8	4,11	10	35	45	Rp 153.187.975,80	400,5	4221	185
	Sumatera Selatan	2024	10,51	Rp 3.456.874,00	8,98	93,87	3,86	11	34	45	Rp 155.559.330,00	404,1	4224	173,7
33	**Sumatera Utara**	2020	9,14	Rp 2.499.423,06	9,83	90,84	6,91	25	51	76	Rp 189.956.152,56	747,1	6904	525,2
	Sumatera Utara	2021	8,49	Rp 2.499.423,06	9,88	90,95	6,33	24	52	76	Rp 189.956.152,56	750,9	6912	481,1
	Sumatera Utara	2022	8,33	Rp 2.522.609,94	9,99	91,34	6,16	18	55	73	Rp 184.150.525,62	729,3	6668	449,7

	Sumatera Utara	2023	8,15	Rp 2.710.493,93	10,07	91,7	5,89	18	56	74	Rp 200.576.550,82	745,2	6786	435,9
	Sumatera Utara	2024	7,19	Rp 2.809.915,00	10,18	92	5,6	19	55	74	Rp 207.933.710,00	753,3	6808	414,4

Lampiran 2 : Output Pengolahan Data Menggunakan E-Views 12

1. Hasil Pengolahan Data Statistik Deskriptif

	X1 UPAH M...	X2 PENDID...	X3 INDEKS...	X4 PENGA...	Y KEMISKI...	Z JUMLAH ...
Mean	2797862.	9.248788	91.24612	5.137152	10.26939	13.29091
Median	2788826.	9.220000	91.47000	4.780000	8.700000	7.000000
Maximum	5067381.	11.49000	96.50000	10.95000	27.38000	65.00000
Minimum	1704608.	6.960000	79.82000	1.790000	3.800000	2.000000
Std. Dev.	595740.9	0.825188	3.233810	1.753945	5.171490	15.64391
Skewness	0.716283	0.079566	-1.091891	0.919429	1.149400	1.814230
Kurtosis	4.620160	3.162857	4.711068	4.129030	4.095387	5.341645
Jarque-Bera	32.15552	0.356438	52.91451	32.01076	44.57990	128.2121
Probability	0.000000	0.836759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	4.62E+08	1526.050	15055.61	847.6300	1694.450	2193.000
Sum Sq. Dev.	5.82E+13	111.6734	1715.035	504.5172	4386.067	40136.04
Observations	165	165	165	165	165	165

2. Hasil Pengolahan Data Pemilihan Model

Uji Chow

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 02:12
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.94899	11.84465	1.768645	0.0794
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.59E-06	3.96E-07	-4.018127	0.0001
X2_PENDIDIKAN	-2.824688	0.493974	-5.718297	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	0.220974	0.181909	1.214750	0.2267
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.068785	0.059783	-1.150577	0.2521
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA...	0.006781	0.012904	0.525476	0.6002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995018	Mean dependent var	10.26939
Adjusted R-squared	0.993567	S.D. dependent var	5.171490
S.E. of regression	0.414783	Akaike info criterion	1.276724
Sum squared resid	21.84968	Schwarz criterion	1.992032
Log likelihood	-67.32971	Hannan-Quinn criter.	1.567092
F-statistic	685.5882	Durbin-Watson stat	1.680317
Prob(F-statistic)	0.000000		

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	595.690698	(32,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	827.955269	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 02:12
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.71452	10.80060	6.917626	0.0000
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.11E-06	6.90E-07	-1.603713	0.1108
X2_PENDIDIKAN	-0.164807	0.596969	-0.276073	0.7829
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.622697	0.130834	-4.759430	0.0000
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.624427	0.258900	-2.411843	0.0170
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA...	0.015088	0.026762	0.563796	0.5737

R-squared	0.247302	Mean dependent var	10.26939
Adjusted R-squared	0.223632	S.D. dependent var	5.171490
S.E. of regression	4.556689	Akaike info criterion	5.906756
Sum squared resid	3301.383	Schwarz criterion	6.019699
Log likelihood	-481.3073	Hannan-Quinn criter.	5.952603
F-statistic	10.44802	Durbin-Watson stat	0.019212
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.013137	5	0.1555

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-0.000002	-0.000001	0.000000	0.0431
X2_PENDIDIKAN	-2.824688	-2.141461	0.069356	0.0095
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	0.220974	-0.046716	0.010746	0.0098
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.068785	-0.057914	0.000127	0.3341
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA...	0.006781	0.004219	0.000008	0.3710

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 02:21
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.94899	11.84465	1.768645	0.0794
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.59E-06	3.96E-07	-4.018127	0.0001
X2_PENDIDIKAN	-2.824688	0.493974	-5.718297	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	0.220974	0.181909	1.214750	0.2267
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.068785	0.059783	-1.150577	0.2521
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA...	0.006781	0.012904	0.525476	0.6002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995018	Mean dependent var	10.26939
Adjusted R-squared	0.993567	S.D. dependent var	5.171490
S.E. of regression	0.414783	Akaike info criterion	1.276724
Sum squared resid	21.84968	Schwarz criterion	1.992032
Log likelihood	-67.32971	Hannan-Quinn criter.	1.567092
F-statistic	685.5882	Durbin-Watson stat	1.680317
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Lagrange Multiplier

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 02:25
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.71452	10.80060	6.917626	0.0000
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.11E-06	6.90E-07	-1.603713	0.1108
X2_PENDIDIKAN	-0.164807	0.596969	-0.276073	0.7829
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.622697	0.130834	-4.759430	0.0000
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.624427	0.258900	-2.411843	0.0170
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA..	0.015088	0.026762	0.563796	0.5737

R-squared	0.247302	Mean dependent var	10.26939
Adjusted R-squared	0.223632	S.D. dependent var	5.171490
S.E. of regression	4.556689	Akaike info criterion	5.906756
Sum squared resid	3301.383	Schwarz criterion	6.019699
Log likelihood	-481.3073	Hannan-Quinn criter.	5.952603
F-statistic	10.44802	Durbin-Watson stat	0.019212
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	315.7958 (0.0000)	1.355735 (0.2443)	317.1515 (0.0000)
Honda	17.77064 (0.0000)	-1.164361 (0.8779)	11.74242 (0.0000)
King-Wu	17.77064 (0.0000)	-1.164361 (0.8779)	4.825778 (0.0000)
Standardized Honda	19.35454 (0.0000)	-0.917395 (0.8205)	9.151615 (0.0000)
Standardized King-Wu	19.35454 (0.0000)	-0.917395 (0.8205)	2.742366 (0.0030)
Gourieroux, et al.	--	--	315.7958 (0.0000)

3. Hasil Pengolahan Data Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

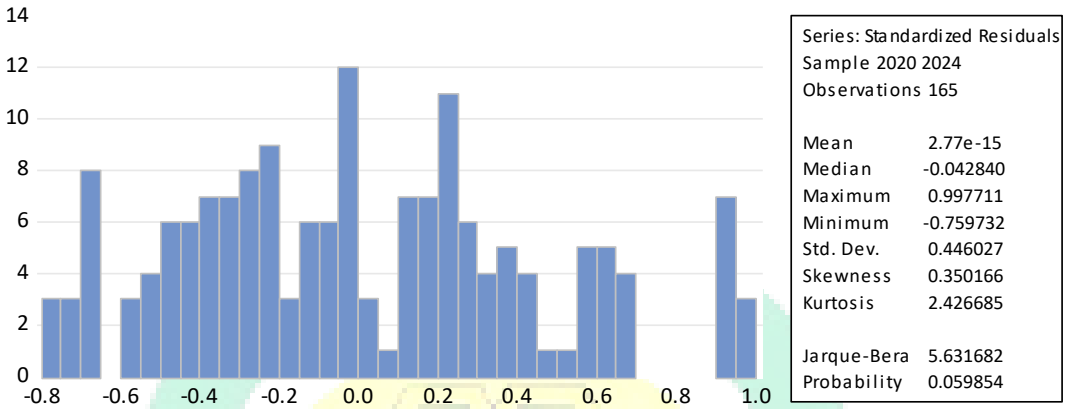

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: D(Y_KEMISKINAN)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/10/26 Time: 01:25
Sample (adjusted): 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 132
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.329806	0.078486	-4.202075	0.0000
D(X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI)	2.62E-07	5.07E-07	0.517366	0.6058
D(X2_PENDIDIKAN)	-2.313072	0.478859	-4.830381	0.0000
D(X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER)	0.133774	0.180136	0.742630	0.4591
D(X4 PENGANGGURAN TERBUKA)	-0.228051	0.089155	-2.557916	0.0117
D(Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_S...	-0.005651	0.012939	-0.436689	0.6631

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	0.465333	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.703508	Mean dependent var	-0.401970
Adjusted R-squared	0.691743	S.D. dependent var	0.802969
S.E. of regression	0.445816	Sum squared resid	25.04273
F-statistic	59.79391	Durbin-Watson stat	1.910581
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Multikolinieritas

		Y_KEMISKIN...	X1_UPAH_M...	X2_PENDIDI...	X3_INDEKS...	X4_PENGA...	Z_JUMLAH_...
Y_KEMI...	Y_KEMI...	1.000000	-0.122425	-0.330053	-0.426216	-0.305596	-0.167770
X1_UP...	X1_UP...	-0.122425	1.000000	0.398426	-0.094982	0.105984	0.020610
X2_PE...	X2_PE...	-0.330053	0.398426	1.000000	0.425258	0.455536	0.198837
X3_IND...	X3_IND...	-0.426216	-0.094982	0.425258	1.000000	0.233768	0.257504
X4_PE...	X4_PE...	-0.305596	0.105984	0.455536	0.233768	1.000000	0.497168
Z_JUM...	Z_JUM...	-0.167770	0.020610	0.198837	0.257504	0.497168	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

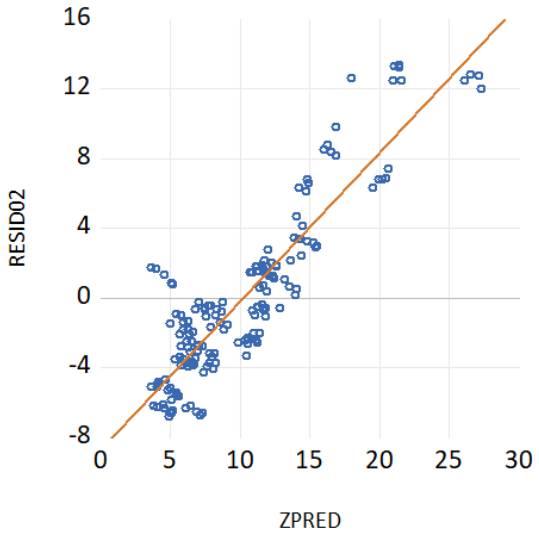

4. Hasil Pengolahan Data Hipotesis

Uji T (Parsial) dan Uji F (Simultan)

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/08/26 Time: 20:58
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.29E-06	3.67E-07	-3.515972	0.0006
X2_PENDIDIKAN	-2.130842	0.415275	-5.131160	0.0000
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.053219	0.148333	-0.358781	0.7202
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.052111	0.055987	-0.930767	0.3534
C	38.70951	9.744520	3.972439	0.0001

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	4.808449	0.9927
Idiosyncratic random	0.413608	0.0073

Weighted Statistics			
R-squared	0.760383	Mean dependent var	0.394751
Adjusted R-squared	0.754393	S.D. dependent var	0.844708
S.E. of regression	0.418627	Sum squared resid	28.03973
F-statistic	126.9334	Durbin-Watson stat	1.292698
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/15/26 Time: 02:49
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.21043	9.830658	3.886864	0.0001
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.30E-06	3.69E-07	-3.521314	0.0006
X2_PENDIDIKAN	-2.141461	0.417916	-5.124136	0.0000
X3 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	-0.046716	0.149481	-0.312522	0.7551
X4_PENGANGGURAN_TERBUKA	-0.057914	0.058714	-0.986379	0.3254
Z_JUMLAH_LEMBAGA_KEUANGAN_SYA...	0.004219	0.012582	0.335342	0.7378

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	4.884771	0.9928
Idiosyncratic random	0.414783	0.0072

Weighted Statistics			
R-squared	0.761476	Mean dependent var	0.389694
Adjusted R-squared	0.753975	S.D. dependent var	0.844127
S.E. of regression	0.418694	Sum squared resid	27.87350
F-statistic	101.5200	Durbin-Watson stat	1.303868
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.101158	Mean dependent var	10.26939
Sum squared resid	3942.381	Durbin-Watson stat	0.009219

Uji MRA

Dependent Variable: Y_KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/15/26 Time: 03:15
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.60345	10.76535	3.957463	0.0001
X1_UPAH_MINIMUM_PROVINSI	-1.42E-06	4.58E-07	-3.091860	0.0024
X2_PENDIDIKAN	-1.813607	0.483163	-3.753617	0.0002
X3_INDEKS_PEMBANGUNAN_GENDER	-0.124541	0.167767	-0.742341	0.4590
X4 PENGANGGURAN TERBUKA	-0.095878	0.074782	-1.282099	0.2017
Z JUMLAH LEMBAGA KEUANGAN SYA...	-0.009561	0.018282	-0.522997	0.6017
X1Z	6.00E-09	5.12E-09	1.172534	0.2428
X2Z	-0.013676	0.008889	-1.538453	0.1260
X3Z	0.001265	0.000843	1.500107	0.1356
X4Z	0.000384	0.000630	0.609983	0.5428

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	4.977639	0.9931
Idiosyncratic random	0.416368	0.0069

Weighted Statistics			
R-squared	0.766354	Mean dependent var	0.383893
Adjusted R-squared	0.752787	S.D. dependent var	0.843470
S.E. of regression	0.419377	Sum squared resid	27.26099
F-statistic	56.48848	Durbin-Watson stat	1.295203
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.094192	Mean dependent var	10.26939
Sum squared resid	3972.934	Durbin-Watson stat	0.008887